

ANALISA

1983—12

UNI SOVIET DAN RRC



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Dewan Redaksi

Kirdi DIPOYUDO

Daed JOESOEF

Rufinus LAHUR

J. PANGLAYKIM

A.M.W. PRANARKA

Pande Radja SILALAH

M. Hadi SOESASTRO

Harry TJAN SILALAH

Jusuf WANANDI

A. Sudiharto DJIWANDONO

J. Soedjati DJIWANDONO

Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Kirdi DIPOYUDO

Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat.
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

PENGANTAR REDAKSI

1047

RUSIA DAN UNI SOVIET DI ASIA

Dieter HEINZIG

1049

KEBIJAKSANAAN ASIA CINA DAN PERANAN ANTI-
HEGEMONISME

Rüdiger MACHETZKI (saduran oleh Kirdi DIPOYUDO)

1079

RRC DAN MASYARAKAT EROPA: HUBUNGAN POLITIK
DAN EKONOMI

Erhard LOUVEN (terjemahan oleh Ronald NANGOI)

1116

POLITIK LUAR NEGERI CINA TERHADAP ASIA TENGGARA

LIE Tek-ijeng (terjemahan oleh Kirdi DIPOYUDO)

1138

Pengantar Redaksi

Pada dasawarsa 1950-an terjadi krisis yang parah dalam gerakan komunis internasional akibat perpecahan antara dua negara komunis besar, RRC dan Uni Soviet, yang sebelumnya bersekutu menentang kapitalisme serta imperialisme dan berusaha mengobarkan revolusi di dunia. Sejak itu kedua kekuatan ini saling bermusuhan dan berusaha saling membendung.

Faktor utama perpecahan Cina-Soviet ini adalah terjadinya bentrokan kepentingan nasional dua negara besar. Perpecahan diwarnai oleh perbedaan ideologi. Khrushchev memperjuangkan koeksistensi damai dengan Amerika Serikat untuk menghindari pecahnya perang nuklir yang bisa menghancurkan segala kemajuan industri yang dicapai dengan susah payah oleh Uni Soviet. Karena memandang Amerika Serikat sebagai musuh nomor satu dan hambatan utama bagi gerakan komunis internasional, pemimpin-pemimpin Cina dengan keras menyerang politik koeksistensi damai Uni Soviet yang mengarah pada detente dan mengendurkan perjuangan revolusioner itu.

Selain itu, Cina marah karena Uni Soviet hanya memberi sedikit bantuan ekonomi dan teknologi kepadanya, tidak menepati janjinya untuk membantu mengembangkan kemampuan nuklirnya, tidak mendukung posisinya mengenai Formosa (Taiwan) dan mengecam agresinya terhadap India.

Perpecahan ini menjadi lebih parah akibat timbulnya sengketa perbatasan. RRC menuduh Uni Soviet menguasai wilayah Cina yang luas, lebih dari sejuta kilometer persegi. Oleh sebab itu Uni Soviet melihat Cina sebagai ancaman serius bagi keutuhan wilayahnya dan semakin memperkuat satuan-satuan militer di sepanjang perbatasan. Pada 1973 terdapat sekitar 50 divisi Soviet di daerah perbatasan. Untuk menghadapinya, Cina juga mengerahkan lebih banyak pasukan dan kemudian meluncurkan suatu program modernisasi angkatan bersenjata. Menurut "Time," 5 Maret 1979, pada waktu itu sekitar 6 juta pasukan Cina berhadapan dengan sekitar 1 juta pasukan Soviet.

Kedua negara itu juga saling bersaing dan berusaha saling membendung di dunia, termasuk Indocina. Untuk menahan perluasan pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara Uni Soviet membantu Vietnam menjatuhkan rezim Khmer Merah sekutu Cina. Sebagai tanggapan, Cina melancarkan serangan "hukuman" terhadap Vietnam yang dilihatnya sebagai kaki tangan Uni Soviet di Asia. Kemenangan Vietnam di Indocina menyebabkan Cina semakin merasa dikepung oleh Uni Soviet.

Oleh sebab itu Cina berusaha menjalin hubungan baik dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat dan Jepang, yang sebelumnya dikecamnya sebagai negara-negara imperialis. Di samping untuk menghadapi Uni Soviet, Cina merasa perlu mendekati negara-negara maju ini untuk memperoleh bantuan bagi usaha-usaha modernisasi dan pembangunannya.

Uni Soviet masih merupakan kekuatan dominan dalam kubu komunis tetapi tidak lagi menguasainya. Cina merupakan musuh nomor satu dan hambatan utama bagi strategi globalnya. Hambatan itu menjadi lebih berat karena Cina berhasil mengadakan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat dan menjalin hubungan baik dengan Jepang maupun negara-negara Barat.

Kendati perpecahan itu, gerakan komunis internasional tetap merupakan ancaman bagi negara-negara non-komunis. Politik luar negeri kedua raksasa komunis itu didasarkan atas komunisme yang bersifat ekspansionis dan revolusioner.

Politik luar negeri kedua raksasa komunis itulah tema ANALISA bulan ini yang memuat empat buah karangan. Karangan-karangan ini umumnya diambil dari makalah-makalah yang disampaikan pada Konperensi Indonesia-Jerman di Sanur, Bali, 5-7 Juli 1982, yang diselenggarakan bersama oleh CSIS (Jakarta) dan Institut für Asienkunde (Hamburg). Karangan yang pertama membahas secara panjang lebar kebijakan luar negeri Uni Soviet di Asia ditinjau dari segi budaya dan sejarah. Karangan yang kedua menyoroti kebijakan Asia Cina dan peranan anti-hegemonisme secara luas. Karangan yang ketiga membahas hubungan politik dan ekonomi antara RRC dan Masyarakat Eropa. Dan karangan yang terakhir membahas manifestasi-manifestasi konkrit kebijakan luar negeri Cina terhadap Asia Tenggara sejak Perang Dingin antara Cina dan Amerika Serikat.

Rusia dan Uni Soviet di Asia*

Dieter HEINZIG

Rusia Soviet adalah suatu negeri Eropa-Asia. Pernyataan ini menunjuk pada suatu kenyataan yang membuat rumit topik ini. Akan tetapi, Rusia Soviet lebih dari suatu negeri Eropa-Asia saja; tiga perempat wilayahnya terdapat di Asia. Oleh sebab itu bahkan dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan Moskwa terhadap Asia sebagian besar adalah kebijaksanaan domestik Soviet. Kalau juga diperhatikan bahwa bagian Asia Uni Soviet lebih dari sepertiga Asia, maka menjadi jelas dari segi geografi politik saja betapa mendalam negara ini terlibat di Asia.

ERUSIA ANTARA EROPA DAN ASIA

Akan tetapi kesulitan-kesulitan yang sepiantas lalu timbul sebagai akibat sifat Eropa-Asia Rusia Soviet menjadi kurang serius kalau diingat bahwa garis perbatasan geografi yang ditarik antara Eropa dan Asia adalah artifisial (dibuat manusia). Manakah "sifat-sifat khusus (Pegunungan Ural) sehingga hanya pegunungan itu di antara pegunungan-pegunungan di dunia harus diberi kehormatan menjadi perbatasan antara dua benua, suatu kehormatan yang dalam kasus-kasus lainnya hanya diberikan kepada samudra-samudra dan ada kalanya kepada suatu laut?" -- suatu pertanyaan yang diajukan pada pertengahan abad ke-19 oleh seorang pan-Slavis Rusia yang terkemuka waktu

*Diambil oleh Redaksi dari makalah yang disampaikan pada Konperensi Indonesia-Jerman di Sanur, Bali 5-7 Juli 1982 yang diselenggarakan bersama oleh CSIS (Jakarta) dan Institut für Asienkunde (Hamburg). Dieter HEINZIG adalah anggota staf riset dan kepala Kelompok Kerja mengenai Komunisme Cina pada Institut Studi Eropa Timur dan Internasional di Köln dan Wakil Ketua Perhimpunan Studi Asia-Jerman.

itu.¹ Dalam penyelidikan yang lebih saksama, timbul keragu-raguan bukan saja mengenai pembatasan geografis Eropa dari Asia. Bahkan istilah "Asia" itu sendiri menjadi kabur kalau kita bertanya kaitan budaya dan sejarah manakah terdapat antara Irak dan Korea misalnya.

Namun, pendekatan budaya/sejarah adalah yang paling tepat untuk membenarkan garis pemisah antara Eropa dan Asia. Dan kalau kita menganut pendekatan ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa Rusia terutama berakar pada tradisi-tradisi Eropa. Ini terutama adalah akibat Kristianisasi negara Rusia pertama yang berlangsung pada abad ke-10, yaitu tidak lama setelah pembentukannya. Sekitar waktu itu sudah berlangsung yang pertama dari perang-perang yang harus diadakan oleh para petani sedenter Rusia pada abad-abad berikutnya melawan tetangga-tetangga Asia mereka: melawan orang-orang Prototurki kafir, Yahudi atau Muslim seperti orang-orang Khazar, Polovtsy dan Pecheneg yang hidup mengembara di padang-padang rumput di sebelah tenggara.

Akan tetapi pertarungan historis yang paling penting dengan "Asia" dan pertarungan yang dirasakan paling traumatis bahkan sampai sekarang adalah penaklukan Rusia oleh orang-orang Mongol pada pertengahan abad ke-13. Sebagai akibatnya untuk pertama kalinya dan satu-satunya kali dalam sejarah Rusia dikuasai sepenuhnya oleh suatu kekuatan asing selama beberapa generasi. Kekejaman-kekejaman "invasi Tatar-Mongol" itu diceritakan dari generasi ke generasi selama berabad-abad dan dikaitkan secara umum -- biarpun sebagian besar di bawah kesadaran -- dengan suatu ancaman sayup kebiadaban yang berasal dari Asia.

Betapa mudah perasaan syak akibatnya dapat disesuaikan dengan keadaan sekarang dan dikerahkan untuk tujuan-tujuan politik diilustrasikan oleh suatu insiden tahun 1967. Ketika pada waktu itu perasaan anti-Cina di Rusia Soviet mencapai puncaknya, massa Cina yang dibangkitkan dan dihasut oleh Revolusi Kebudayaan mengepung Kedutaan Besar Soviet di Beijing, penyair terkenal Andrei Voznesenskii menerbitkan sebuah syair yang memuat baris-baris berikut:

"Saya mencium bau Kuchum,
 Saya mencium bau air kencing ...
 Dengarkan, ia mulai ...,
 Juru masak dengan tulang pipi yang menonjol
 Memotong otak dari anjing hidup yang memeking ...
 Brutalitas Genghiz

¹Nikolai Danilevskii, *Russii i Evropa*, ditulis tahun 1865-1867, dikutip dari N.J. Danilevskij, *Rusland and Europe*, Penterjemahan dan pengantar oleh Karl Nötzel, cetak ulang edisi tahun 1920 (Onasbrück, 1965), hal. 17 dst.

Bangun seperti adonan dalam periuk ...
 Kuchumisme, itulah perang ...
 Berdoalah kepada Rusia
 karena nasibnya yang tak terpercaya ...
 Rusia Penyelamat kita! Tidak peduli Batu mana datang
 selamanya Rusia, sekali lagi Rusia, selamanya Rusia.”¹

Dua dari orang-orang yang disebutkan dalam syair itu dimaksud untuk membangkitkan rasa ngeri dan jijik pada pembaca Rusia: Genghiz Khan, lambang ekspansionisme Mongol dan puteranya Batu, penakluk Rusia. Akan tetapi memasukkan Kuchum dalam deretan ini memerlukan banyak sinisme atau ketidaktahuan karena Tatar Khan Siberia yang terakhir itu ditindak secara brutal oleh orang-orang Rusia ketika ia mencoba menghalang-halangi ekspansi mereka menuju Timur.

Dalam syairnya itu Voznesenskii mengenangkan ”bahaya kuning” atau lebih tepat semacam ”bahaya Asia.” Dengan menyamakan Cina dengan Kerajaan Mongol yang memperluas wilayahnya ia menekuk sejarah -- secara sengaja atau tidak sadar. Apakah ia benar-benar tidak sadar bahwa bangsa Cina juga menjadi korban gerombolan-gerombolan Mongol sekitar waktu yang sama seperti bangsa Rusia? Ataupun ia berspekulasi dengan ketidaktahuan sejarah di pihak para pembacanya? Kemungkinan yang terakhir ini adalah lebih besar. Bagaimanapun, sovini Rusia Raya Voznesenskii mengetahui dengan tepat bagaimana menyentuh syaraf asiophobi sesama warga bangsanya, bagaimana merangsang ketakutan irasional orang-orang Rusia yang berakar dalam akan bahaya yang mengancam dari Asia, dan bagaimana mengarahkan ketakutan itu terhadap Cina. Ia juga bukan satu-satunya penyair yang menyuarakan nada semacam itu pada jamannya. Misalnya rekan-nya Evgenii Evtushenko, yang umumnya dianggap sebagai seorang ahli sastra liberal, juga memperingatkan dalam suatu syair² ancaman kebiadaban dari Cina yang mengancam akan menghancurkan kebudayaan Rusia (dan Eropa).

Akan tetapi pada tahap ini harus dikatakan bahwa dari perspektif sejarah hubungan bangsa Rusia dengan Asia itu terlalu bermacam-macam untuk diringkas menjadi trauma dominasi Mongol. Suatu segi lain tampak ketika, pada abad ke-16, Rusia mulai mendorong perbatasannya semakin jauh ke arah Asia dan pada abad ke-17 dan, khususnya setelah Peter Agung menaiki takhta kekaisaran, menjadi semakin Eropa. Makin lanjut perkembangan ini makin banyak bangsa Rusia mengembangkan suatu arogansi kolonial yang mirip dengan arogansi kolonial yang menjadi ciri negara-negara kolonial Eropa Barat. Sikap ini terutama terungkap dengan jelasnya dalam sentimen-

¹ *Literaturnaia Rossiia* (Moskwa), 24 Maret 1967, hal. 15.

² *Literaturnaia Gazeta* (Moskwa), 15 Februari 1967.

sentimen yang disuarakan sejarawan berpengaruh Mikhail Pogodin yang pada awal abad ke-19 berpendapat bahwa:

"Tidak mungkinlah mendidik Afrika dan Asia, kecuali dengan memperlengkapi suatu tentara dari seluruh Eropa dan mengirimkannya untuk suatu kampanye melawan mereka. Biarlah orang-orang Eropa menduduki takhta bangsa Ashanti, bangsa Birma, bangsa Cina, bangsa Jepang dan biarlah mereka membangun suatu tata Eropa."¹

Dan reaksinya terhadap pemberontakan para sepoy India terhadap pemerintah kolonial Inggris adalah sebagai berikut:

"Kita serta merta melupakan bahwa orang-orang Inggris adalah musuh kita, dan dalam diri mereka hanya melihat orang-orang Eropa, Kristen, penderita; kita melihat dalam diri mereka orang-orang terdidik yang diancam oleh orang-orang biadab -- dan suatu belas kasihan umum, suatu simpati umum menyatakan dirinya di mana-mana ... Dari segi kemanusiaan, sebagai orang-orang Eropa, Kristen dan terdidik, kita mengharapkan sukses untuk orang-orang Inggris, mengharapkan bahwa mereka akan memperkuat pemerintahannya di India, dan bahwa mereka akan memperluasnya sejauh mungkin di Asia, di Afrika dan di Amerika."²

Di lain pihak, di antara para cendekiawan abad ke-18 dan ke-19 di Rusia seperti di lain-lain negara Eropa muncul suatu kecenderungan untuk mengagumi kebudayaan Asia, khususnya kesenian, etika dan agama Asia. Sebagai akibatnya misalnya pada tahun 1810 diajukan suatu usul kepada Menteri Pendidikan untuk mendirikan suatu Akademi Asia karena sementara itu Timur "diakui secara unanims sebagai buaian segala peradaban dunia."³ Pembukaan "Museum Asia" di St. Petersburg pada tahun 1818 mengungkapkan usaha-usaha untuk menempatkan pemikiran akademis tentang Timur pada landasan sistematis.

Trend di pihak orang-orang Rusia untuk lebih banyak melibatkan diri di Asia selanjutnya mendapat dorongan pada abad ke-19 oleh persepsi menonjol mereka bahwa mereka tidak disenangi oleh orang-orang Eropa, tidak diterima sebagai orang-orang Eropa. Buktinya yang khususnya mengesankan didapat dari catatan-catatan yang dibuat novelis besar Dostoyevsky yang menulis pada tahun 1881, tidak lama sebelum ia meninggal, dalam semacam wasiat politik:

¹N. Barsukov, *Zhizn' i trudy Pogodina* (St. Petersburg, 1888-1910), Vol. 2, hal. 17, dikutip dari Nikolas V. Riasanovsky, "Asia through Russian Eyes," dalam Wayne S. Vucinich (ed.), *Russia and Asia, Essays on the Influence of Russia on the Asian Peoples* (Stanford, California, 1972), hal. 14.

²M. Pogodin, *Stat'i politicheskie i pol'skii vopros, 1856-1867* (Moskwa, 1876), hal. 16, 21, dikutip dari Riasanovsky, *op. cit.*, hal. 14.

³Sergei Uvarov dalam "Project of an Asiatic Academy," dikutip dari Riasanovsky, *op. cit.*, hal. 11, 12. Mengenai perlakuan filsafat Cina bagian akhir abad ke-18 lihat Marc Raeff, *Russian Intellectual History* (New Jersey/Sussex, 1966), hal. 87.

"Apa yang tidak kita coba dalam usaha kita membuat Eropa memikirkan kita seperti orang-orangnya sendiri, seperti orang-orang Eropa, hanya sebagai orang Eropa dan bukan sebagai orang Tartar. Kita menonjolkan diri kepada Eropa tanpa mengenal lelah dan terus-menerus dan mencampuri segala urusannya ... Akan tetapi ia (Eropa) tidak mau mengakui kita seperti warganya sendiri, ia meremehkan kita secara diam-diam dan terang-terangan, memikirkan kita sebagai suatu ras yang lebih rendah dan kadang-kadang bahkan merasa jijik dengan kita, khususnya bilamana kita memeluk lehernya dengan ciuman persaudaraan."¹

Dan sebagai jalan keluar dari dilema ini, Dostoyevsky menganjurkan agar Rusia berpaling ke Asia:

"Sesungguhnya, kalau kita masih mempunyai akar penting mana pun yang membutuhkan pengobatan, maka ini adalah hubungan kita dengan Asia. Kita harus membuang jauh-jauh ketakutan bahwa orang-orang di Eropa bisa menamakan kita orang-orang biadab Asia dan mengatakan tentang kita bahwa kita lebih Asia daripada Eropa. Ketakutan bahwa Eropa akan memikirkan kita sebagai orang-orang Asia telah mengikuti kita hampir selama dua ratus tahun."²

Akan tetapi yang dimaksudkannya dengan berpaling ke Asia ini bukanlah pertama-tama suatu proses intelektual tetapi suatu proses perluasan politik kekuasaan, dan dalam sikap dasar ini ia hampir tidak berbeda dengan mayoritas politisi Rusia jamannya yang diresapi gagasan-gagasan imperialis, khususnya sesudah Perang Krimea:

"Akan tetapi nama Czar Putih adalah di atas para Khan dan Emir, di atas Maharani India, bahkan di atas nama Khalif ... Kita memerlukan (perebutan Asia) karena Rusia tidak hanya terletak di Eropa tetapi juga di Asia; karena orang Rusia bukan saja orang Eropa tetapi juga orang Asia. Dan lebih dari itu harapan kita mungkin lebih banyak terletak di Asia daripada di Eropa. Dan kami berkata lebih banyak lagi: mungkin adalah Asia yang merupakan tempat pelarian kita yang paling penting dalam nasib mendatang kita."³

Untuk mengakhiri pembicaraan mengenai dalam dan bermacam-macamnya persepsi tentang Asia oleh orang-orang Rusia, perhatian pembaca akan tertarik pada ide yang sekaligus baru dan utopis mengenai "orang-orang 'Eurasia'" yang meluas dalam Perang Dunia I dan diberi status resmi pada tahun 1921. Para eksponennya, sebagian besar kaum cendekiawan Rusia yang beremigrasi, berusaha menemukan suatu jalan keluar yang integratif dan organis dari status orang-orang Rusia yang terbelah antara Asia dan Eropa. Mereka melihat Rusia sebagai suatu unsur ketiga yang otonom, produk suatu ramuan darah Slavis, Finno-Ugria dan Turki. Kredo mereka adalah sebagai berikut:

¹F.M. Dostoyevskii, "Geok-Tepe. Chto takoe dlia nas Aziia?" dalam *Polnoe sobranie sochinenii F.M. Dostoevskogo*, Vol. 21 (St. Petersburg, 1896), hal. 515, 517.

²*Ibid.*, hal. 514.

³*Ibid.*

"Orang-orang Rusia yang termasuk bangsa-bangsa dunia Rusia bukan orang Eropa dan bukan orang Asia. Bercampur dengan unsur pribumi kebudayaan dan kehidupan yang mengelilingi kita, kita tidak malu menyatakan diri kita sebagai orang-orang Eurasia."¹

Kaum simbolis seperti Andrei Belyi dan Aleksandr Blok melangkah lebih jauh lagi, bahkan sampai mengidentifikasi orang Rusia dengan orang Asia. Blok menyampaikan nosi-nosi ini secara yang sangat mengesankan dalam syairnya "Orang-orang Scythe," yang dibuat pada tahun 1918, di mana ia menulis sambil mengarahkan baris-barisnya ke Eropa:

"Anda berjuta-juta. Kami gerombolan dan gerombolan dan gerombolan.
Cobalah saja, bertarunglah dengan kami!
Ya, kami orang Scythe! Ya, kami orang Asia,
dengan mata yang sipit dan serakah."²

Posisi-posisi mental yang dilukiskan di sini seperti dipegang oleh kaum cendekiawan Rusia merupakan bukti luasnya spektrum di mana diskusi-diskusi mengenai topik provokatif "Asia" diadakan. Spektrum ini membentang dari ketakutan dan kebencian sampai identifikasi penuh. Suatu sikap kontemplasi, kebimbangan dan ketidakpastian tersebar luas. Kesadaran akan stratifikasi yang mendalam ini sangat penting untuk memahami perilaku intelektual-psikologis orang-orang Rusia Soviet mengenai Asia bahkan sekarang. Setiap orang yang tinggal di Uni Soviet untuk waktu yang cukup lama tahu bahwa gagasan-gagasan yang digariskan di atas ini masih hidup hari ini. Suatu sikap yang lebih kurang rasialis dan kuasi-kolonial terhadap orang-orang Asia rupanya dominan di antara para pejabat dan rakyat banyak non-Asia, sedangkan pandangan-pandangan yang lain sering dibicarakan khususnya di antara para cendekiawan.³

EKSPANSI RUSIA KE ASIA

Pada bagian terakhir abad ke-19, Rusia adalah suatu Imperium kolonial luas yang muncul dari perluasan konstan selama sekitar 350 tahun. Jajahan-jajahan St. Petersburg hampir semuanya di Asia dan di benua ini meliputi suatu wilayah yang tiga kali lebih luas dari negeri induk Eropanya. Mayoritas penduduk Imperium Czar itu adalah orang bukan Rusia (55,7%).⁴

¹Ishkod k Vostoku, *Predchuvstviia i sversheniia* (Sofia, 1921), hal. VII, dikutip dari Riasanovsky, *op. cit.*, hal. 19.

²A. Blok, *O rodine* (Moskwa, 1945), hal. 88-91, dikutip dari Riasanovsky, *op. cit.*, hal. 28.

³Terdapat banyak kasus tendensi "asiophil" yang disuarakan dalam literatur Soviet, hanya untuk dikritik oleh para Russophil." Misalnya lihat A. Kuz'min, "Pisatel' i istoriia," dalam *Nash Sovremennik*, 1982, No. 4, hal. 154 dst.

⁴Menurut sensus 1897. Lihat Richard Pipes, *The Formation of the Soviet Union* (Cambridge, Mass., 1964), hal. 2.

Pada waktu itu ekspansi kolonial imperium yang lebih lanjut leluasa maju, selain ke arah Laut Hitam, hanya ke jurusan timur karena jalannya ditutup di barat oleh negara-negara Eropa, di selatan oleh Turki Usmaniyah, dan di utara oleh Swedia dan daerah Kutub Utara yang membeku. Ekspansi Rusia ke Asia mulai pada akhir abad ke-16. Pada waktu itu ekspedisi-ekspedisi pedagang melintasi Pegunungan Ural di bawah perlindungan negara dan sampai memasuki Siberia Timur pada dasawarsa-dasawarsa berikutnya. Sekitar 1640 mereka mencapai Pasifik, sekitar 80.000 km jauhnya, dan memasuki Lembah Amur. Secara demikian dalam periode 60 tahun yang sangat singkat, Rusia berkembang dari suatu negara Eropa juga menjadi suatu negara Asia. Kecepatan ekspansi ini pertama-tama adalah akibat kenyataan bahwa negeri-negeri Siberia sedikit penduduknya dan bahwa bangsa-bangsa Mongol, Manchuria dan Prototurki yang tinggal di situ tidak mampu memberikan perlawanan yang serius (busur dan panah lawan senapan).

Para kolonis Rusia untuk sementara dicegah bergerak lebih jauh ke Selatan oleh Cina dengan mana St. Petersburg mengadakan suatu perjanjian pada tahun 1689 dan 1727. Perluasan wilayahnya sampai Sungai Amur/Usuri, penguasaan wilayah yang kini Asia Tengah Soviet, dan aneksasi wilayah-wilayah Kaukasus tidak menyusul sampai abad ke-19.

Perilaku Rusia terhadap Cina sangat imperialistis dalam arti bahwa Cina adalah negara asing yang wilayahnya paling banyak dicaploknya. Dengan mengambil manfaat dari kelemahan Beijing menyusul Perang Candu, Czar memaksa Cina mengadakan "perjanjian-perjanjian tak berimbang." Secara demikian Rusia mencaplok suatu wilayah sekitar 1,5 juta km² yang sejauh itu dianggap sebagai wilayahnya oleh Cina.

Sebagai keseluruhan, perilaku Rusia di Asia tidak kurang imperialis daripada perilaku saingan-saingan paling besarnya, yaitu Inggris dan Jepang. Ideologi espansionisme Rusia terhadap Asia harus dilihat sebagai luasnya konsekuensi kompensasi berlebihan untuk frustrasinya karena gagal mencapai kemajuan diplomasi dan militer di Eropa dan tidak mampu menguasai krisis internnya yang permanen. Ideologi ini bisa dibuktikan berdasarkan banyak dokumen sejamin. Cukuplah di sini hanya memberikan dua contoh. Keduanya diambil dari mernoranda yang disampaikan kepada Czar Nikolai II pada musim panas tahun 1903 oleh penasihat-penasihat dekatnya. Menteri Sergei menulis dalam sebuah memo:

"Sesuai dengan itu, masalah setiap negeri yang bersangkutan ialah mendapatkan bagian sebesar mungkin dari negara-negara Timur yang masih hidup lebih lama, khususnya raksasa Cina. Rusia, baik secara geografis maupun historis, mempunyai hak yang tidak disangah atas bagian terbesar mangsa yang diperkirakan ..."¹

¹Sergei I. Witte, *The Memoirs of Count Witte* (New York, 1921), hal. 121-122, dikutip dalam Atwant Singh, *The Struggle for Power in Asia* (London, 1971), hal. 35.

Dan dalam suatu dokumen yang ditulis oleh Penasihat Kaisar Ivan Bezobrazov dapat dibaca:

"Timur Jauh masih dalam periode di mana suatu perjuangan sengit masih diperlukan untuk menjamin konsolidasi negara kita; dominasi oleh kita adalah tujuan akhir perjuangan itu; tanpa dominasi itu kita tidak mampu memerintah ras kuning ataupun mengawasi pengaruh bermusuhan saingan-saingan Eropa kita."¹

Ekspansi wilayah Rusia Czar berhenti menjelang akhir abad ke-19. Pada waktu itu bangsa Rusia merupakan 44% seluruh penduduk dan bangsa-bangsa Asia hanya 15%.² Akan tetapi dari segi wilayah, tiga perempat kekaisaran terletak di Asia. Rencana-rencana lebih lanjut Czar, misalnya untuk mencaplok Manchuria, Korea, Tibet, Iran, Bosporus dan Dardanella³ terutama kandas akibat perlawanan Inggris, Cina dan Jepang dan Rusia bahkan dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1905.

Di Asia Rusia berhasil merebut suatu wilayah jajahan yang berkali-kali lebih besar daripada jajahan-jajahan negara-negara besar lain yang giat menjajah di Asia. Separuh Benua Asia dikuasai Eropa dan sekitar empat perlimanya di tangan Rusia dan seperlima di tangan Inggris.⁴ Kendati kenyataan ini, telah menjadi kebiasaan untuk mengklasifikasi Rusia Soviet, yang tidak pernah melepaskan jajahan-jajahan Czar, sebagai "non-kolonial" atau paling tidak "kurang kolonial." Jelas ada bermacam-macam alasan. Salah satu yang paling penting kiranya ialah bahwa Rusia telah meluas di daratan dengan hanya mendorong perbatasannya semakin jauh ke Asia. Ini memungkinkan St. Petersburg mengintegrasikan wilayah-wilayah jajahannya dengan menciptakan ikatan-ikatan ekonomi yang erat antara mereka dan negeri induk. Dalam periode Soviet, banyak daerah non-Rusia dalam jangka panjang mendapat keuntungan dari perkembangan integrasi ini sehingga taraf hidup mayoritas penduduk di negeri-negeri itu tinggi dibandingkan dengan taraf hidup di negeri-negeri tetangga (misalnya Asia Tengah Soviet dibandingkan dengan Iran, Afghanistan, Sinkiang).

Kolonialisme klasik, di lain pihak, umumnya berkaitan dengan penaklukan di seberang lautan. Sudah barang tentu sifat penaklukan didapatnya wilayah-wilayah jajahan masing-masing sama dalam kedua kasus. Dengan demikian mengenai pokok yang menentukan ini tidak dibenarkan membeda-

¹Laporan Bezobrazov 23 Juli 1903, dalam *Dnevnik Kuropatkina*, dikutip dalam David J. Dallin, *The Rise of Russia in Asia* (London, 1950), hal. 70.

²Sensus 1897. Lihat Richard Pipes, *op. cit.*, hal. 2.

³Lihat David J. Dallin, *op. cit.*, hal. 42.

⁴Lihat Otto Hoetzsch, *Rusland in Asien, Geschichte einer Expansion* (Stuttgart, 1966), hal. 124.

kan antara kolonialisme "kontinental" dan "maritim." Bahwa perbedaan ini diadakan juga dalam praktek dengan cerdas dimanfaatkan oleh propaganda Soviet sehingga Uni Soviet sebagian besar mampu menghindari tuduhan kolonialisme dan bahkan, tidak jarang dengan keberhasilan tertentu, menawarkan jasa-jasanya kepada negara-negara Dunia Ketiga sebagai suatu "sekutu alamiah."

Baru setelah Cina putus hubungan dengan Moskwa dan melancarkan serangan-serangan polemiknya terhadap "Czar-czar baru" perhatian dunia sekali lagi ditarik pada kenyataan bahwa Rusia Soviet sampai sekarang tidak melepaskan satu pun dari bekas jajahan-jajahan Czar akan tetapi sebaliknya mencaplok wilayah-wilayah lain seluas setengah juta km² lebih pada dasawarsa 1940-an, yaitu negara-negara Baltik, bagian-bagian Finlandia, Jerman, Polandia, Cekoslowakia, Rumania, Mongolia (Tannu Tuva) dan Jepang ((Kepulauan Kurile Selatan, Habomai dan Shikotan).

Mengenai wilayah-wilayahnya di Eropa, Moskwa mendapatkan kembali seluruh atau bagian-bagian daerah-daerah yang dilepaskannya menyusul Perang Dunia I, akan tetapi juga memperluas kekuasaannya melintasi perbatasan bekas-bekas milik Czar. Akan tetapi wilayah-wilayah di Asia yang bersangkutan tidak pernah menjadi milik Rusia. Namun secara tidak langsung, artinya tanpa melakukan aneksasi formal, Uni Soviet juga memperluas daerah hegemoninya lebih jauh, yaitu dengan menciptakan sejumlah kuasi-protektorat di seberang perbatasannya di Eropa (negara-negara satelit di Eropa Timur) dan di Asia (Republik Rakyat Mongolia dan Afghanistan). Secara demikian Uni Soviet meneruskan tradisi ekspansionisme Rusia yang telah berusia 350 tahun.

KEBIJAKSANAAN SOVIET TERHADAP BANGSA-BANGSA ASIA: PENINDASAN GERAKAN-GERAKAN NASIONAL MERDEKA

Pemberontakan Bolshevik 7 Nopember 1917 yang dalam sejarah dikenal sebagai Revolusi Oktober Rusia seharusnya menandai suatu perbalikan kebijaksanaan Rusia terhadap Asia karena perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme merupakan salah satu asas politik luar negeri Bolshevik yang menonjol. Pembalikan ini seharusnya menguntungkan bangsa-bangsa Asia baik dalam wilayah bekas Imperium Czar maupun di luarnya. Bagian ini lebih dahulu akan membicarakan kelompok yang pertama, yaitu kebijaksanaan Soviet terhadap nasionalitas-nasionalitasnya dan komponen-komponen Asia-nya. Khususnya akan dibahas tahun-tahun pertama sesudah Revolusi Oktober dalam rangka melukiskan secara terperinci teknik-teknik yang dipakai oleh kaum Bolshevik dalam usaha mereka menguasai daerah-daerah non-Rusia.

Lenin mengakui pada tahap awal sifat kolonial daerah-daerah Asia Rusia. Pada tahun 1899 ia melukiskan statusnya sebagai berikut: "Bagian-bagian Selatan dan Tenggara Rusia Eropa, Kaukasus, Asia Tengah dan Siberia melayani kapitalisme Rusia sebagai jajahan-jajahan ..."¹ Ia mengklasifikasikan sekitar 76% seluruh daratan Rusia sebagai jajahan,² dan ia menyerang sifat memeras kebijaksanaan kolonial Czar dengan kata-kata berikut:

"Akan tetapi dalam kenyataan seluruh dunia mengetahui bahwa rezim Czar puluhan tahun menundukkan lebih dari seratus juta orang bangsa-bangsa asing di Rusia itu sendiri, bahwa Rusia puluhan tahun menganut suatu kebijaksanaan merampas terhadap Cina, Iran, Armenia dan Galisia."³

Beberapa bulan sebelum Revolusi Oktober ia melukiskan dengan kata-kata penuh janji bagaimana kebijaksanaan Bolshevik terhadap milik-milik kolonial Rusia harus dibayangkan: "Orang-orang Rusia Raya tidak akan menggunakan kekerasan untuk tetap menguasai Polandia atau Kurelia, atau Finlandia, atau Armenia, atau bangsa lain mana pun."⁴ Dan di lain tempat ia menegaskan: "Kita, para pekerja dan petani Rusia, *tidak* akan menggunakan kekerasan untuk tetap menguasai *satu pun* dari daerah-daerah bukan Rusia Raya (seperti Turkestan, Mongolia, Iran)."⁵

Sudah barang tentu, yang dimaksud Lenin dengan "kita" *bukanlah* para pekerja dan petani Rusia melainkan Partai Bolshevik yang menunjuk dirinya sebagai barisan depan proletariat. Namun referensi pada sifat Rusia Raya elite kekuasaan komunis di masa mendatang tepat karena pada waktu itu anggota-anggota Partai sekitar tiga perempat terdiri atas orang-orang Rusia Raya (dan misalnya hanya sekitar 6% dari orang-orang etnis Asia).⁶

Lenin secara terang-terangan mengakui hak bangsa-bangsa atas penentuan-diri.⁷ Akan tetapi dalam penyelidikan yang lebih saksama⁸ menjadi jelas bahwa ia mengubah hak itu dan membatasinya menjadi suatu "hak sesesi" yang pelaksanaannya tidak diinginkannya karena tujuannya ialah mendirikan negara yang sebesar mungkin. Jadi pengakuannya atas hak penentuan-diri itu tidak dimaksudkan secara serius akan tetapi lebih bersifat taktis. "Bagi Lenin,

¹V.I. Lenin, *Polnoe sobranie sochinenii*, Vol. 4 (Moskwa, 1960), hal. 86.

²*Ibid.*, Vol. 27 (Moskwa, 1962), hal. 377.

³*Ibid.*, hal. 231.

⁴*Ibid.*, Vol. 32 (Moskwa, 1962), hal. 4.

⁵*Ibid.*, hal. 305.

⁶Lihat T.H. Rigby, *Communist Party Membership 1917-1967* (Princeton, New Jersey, 1968), hal. 366.

⁷V.I. Lenin, *Polnoe sobranie sochinenii*, Vol. 25 (Moskwa, 1961), hal. 255 dst.

⁸*Ibid.*, Vol. 34 (Moskwa, 1962), hal. 378-379.

soal kebangsaan adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan dan bukan sesuatu yang harus dipecahkan" (Samad Shaheen).¹ Ia mengharapkan agar propagandanya mengenai hak penentuan-diri akan membantu menggalakkan disintegrasi "bangsa-bangsa penjara" Czar dan secara demikian mempercepat proses revolusioner. Ia yang menganggap nasionalisme semata-mata sebagai hasil sampingan kapitalisme, tidak bisa membayangkan pemisahan jangka panjang daerah-daerah non-Rusia akan tetapi yakin bahwa daerah-daerah itu akan kembali secara sukarela ke dalam Rusia yang telah mengalami revolusi sosialis. Ini akan ternyata suatu perhitungan salah.

Proklamasi pertama Pemerintah Soviet yang baru dibentuk mengenai hal itu, "Deklarasi Hak-hak Bangsa-bangsa Rusia" seperti ditandatangani oleh Lenin dan Stalin, kemudian menjamin semua nasionalitas bekas Imperium Czar persamaan, kedaulatan, perkembangan bebas dan hak atas "penentuan-diri bebas sampai sesesi dan pembentukan suatu negara merdeka."²

Secara lebih konkrit, sejak semula Lenin hanya memberikan hak sesesi kepada bangsa Fin dan Polandia -- paling tidak di atas kertas -- dan memandang perjuangan penentuan-diri bangsa-bangsa Non-Rusia lain dengan kecurigaan dan ketidakrelaan. Mayoritas bangsa-bangsa ini diwakili dalam suatu "Kongres Bangsa-bangsa Rusia" yang diadakan di Kiev pada bulan September 1917 dan secara unanimitas menuntut transformasi negara Rusia menjadi suatu federasi.

Dari bangsa-bangsa besar adalah bangsa Ukraina yang pertama mengambil langkah-langkah serius menuju implementasi tuntutan ini dan hak penentuan-diri yang dijamin untuk mereka dalam "Deklarasi Hak-hak Bangsa-bangsa Rusia" tersebut. Rada Pusat, badan politik yang paling representatif di Ukraina, tidak lama setelah kaum Bolshevik mengambil alih kekuasaan di Petrograd menggagalkan suatu usaha pemberontakan Bolshevik di Kiev dan memproklamasikan pembentukan Republik Rakyat Ukraina sebagai bagian suatu federasi pan-Rusia mendatang.³ Reaksi kaum Bolshevik menunjukkan, kali ini juga dalam praktek, bahwa pengakuan hak penentuan-diri adalah suatu manuver taktis. Pemerintah Soviet di Petrograd, setelah mula-mula mengakui Republik Rakyat Ukraina, menyampaikan suatu ultimatum kepada Rada Pusat dan ketika Rada menolak untuk tunduk mengirimkan Tentara Merah. Jawaban Rada atas ultimatum itu bisa diambil sebagai contoh tang-

¹Samad Shaheen, *The Communist (Bolshevik) Theory of National Self-determination* (Den Haag-Bandung, 1956), hal. 145.

²*Dekrety sovetsskoi vlasti*, Vol. 1 (Moskwa, 1957), hal. 40.

³Mengenai perkembangan di Ukraina lihat James Bunyan dan H.H. Fisher, *The Bolshevik Revolution 1917-1918* (Stanford, California, 1934), hal. 432 dst.

gapan bangsa-bangsa non-Rusia terhadap pengkhianatan asas-asas penentuan diri oleh kaum Bolshevik. Jawaban itu memuat baris-baris berikut:

"Tidaklah mungkin secara yang bersamaan mengakui hak suatu bangsa atas penentuan-diri termasuk pemisahan dan pada waktu yang sama melanggar hak itu dengan memaksakan suatu jenis pemerintahan tertentu atas bangsa tersebut ..."¹

Sejalan dengan ultimatum itu, Pemerintah Soviet di Petrograd mulai memperjuangkan pembentukan suatu pemerintah tandingan Bolshevik di Ukraina dan memberinya bantuan militer. Pada akhir Januari 1918, Tentara Merah mengusir Rada dari Kiev tetapi tidak sebelum Rada memproklamasikan kemerdekaan Ukraina dari Rusia.

Cara pengambilalihan kekuasaan di daerah-daerah non-Rusia oleh kaum Bolshevik ini untuk pertama kalinya bisa dilacak pada contoh Ukraina, di mana evolusinya lebih kurang spontan. Kemudian cara ini akan dimasukkan dalam prosedur kebijaksanaan ekspansi Soviet yang sering dipraktekkan, kadang-kadang dengan tambahan suatu unsur pengesahan antara pembentukan suatu pemerintah tandingan dan intervensi militer dalam bentuk suatu "seruan akan bantuan" dari pemerintah tandingan itu yang harus dipenuhi demi kepentingan "internasionalisme sosialis" atau sebagai suatu tindakan "bantuan persaudaraan." Cukuplah di sini menyebutkan contoh-contoh Mongolia (1921), Finlandia (1939) dan Afghanistan (1979).

Pengabaian hak penentuan-diri yang untuk pertama kalinya terungkap secara spektakuler di Ukraina itu sudah barang tentu harus diberi pembenaran ideologis. Bahwa pembenaran ini ditemukan pertama-tama adalah jasa Stalin, waktu itu Komisaris Urusan Nasional. Pada hari pembentukan pemerintah tandingan di Ukraina, ia menulis bahwa kaum Bolshevik di Petrograd bersedia untuk mengakui setiap daerah nasional Rusia sebagai suatu republik merdeka "asal penduduk pekerja daerah itu menginginkannya."² Tidak lama kemudian formulasinya menjadi sedikit lebih mengena ketika ia menyatakan bahwa asas penentuan diri harus ditafsirkan "bukan sebagai suatu hak kaum borjuis tetapi sebagai suatu hak massa pekerja bangsa yang bersangkutan."³ Pada tahun 1923 ia melepaskan segala reservasinya dan menyerukan agar hak penentuan-diri tunduk pada diktator kelas pekerja, artinya dalam praktek diktator Partai Komunis: "Kita harus memperhatikan bahwa hak bangsa-bangsa atas penentuan-diri juga terdapat suatu hak kelas pekerja untuk meneguhkan kekuasaannya, dan hak penentuan diri tunduk pada hak ini."⁴

¹*Ibid.*, hal. 441.

²I. V. Stalin, *Sochineniia*, Vol. 4 (Moskwa, 1954), hal. 8.

³*Ibid.*, hal. 31-32.

⁴*Ibid.*, Vol. 5, hal. 265.

Lenin tidak pernah mendukung teori suatu "hak proletariat atas penentuan diri" ini dalam bentuk itu. Dengan cara taktisnya sendiri ia membiarkan segala kemungkinan terbuka dan mempertahankan bahwa Partai Komunis harus bebas mengambil keputusan atas dasar kasus demi kasus yang dipandang mempunyai hak penentuan-diri. Dalam bentuk inilah hak penentuan-diri dimasukkan dalam suatu resolusi yang diterima pada Kongres Partai tahun 1919.¹

Namun dalam praktek segala usaha di pihak nasionalitas-nasionalitas untuk mendapatkan kemerdekaan mereka dari Imperium Rusia yang buyar pada 1917 pada pokoknya diperlakukan sesuai dengan teori Stalin mengenai "hak proletar atas penentuan-diri."² Hanya Finlandia, Polandia dan negara-negara Baltis mampu melaksanakan hak mereka untuk membentuk negara mereka sendiri, dan hanya setelah berjuang untuk hak itu dalam konflik bersenjata dengan kaum Bolshevik. Tendensi-tendensi untuk memisahkan diri di lain tempat mana pun di bagian-bagian non-Rusia Imperium umumnya ditumpas secara berdarah dalam perang saudara (1918-1921) menurut pola Ukraina: Tentara Merah bergerak dari pusat bagian Rusia Eropa ke daerah-daerah periferi dan di situ sering dibantu oleh kaum Bolshevik lokal dalam pengambilalihan kekuasaan. Aspirasi-aspirasi kemerdekaan yang pertama sudah muncul di daerah-daerah non-Rusia dalam periode menyusul abdikasi (turun takhta) Czar pada musim semi 1917. Aspirasi-aspirasi ini menjadi lebih kuat akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan sentralisasi Pemerintah Sementara dan perlakuan kaum Bolshevik terhadap lawan-lawan politik mereka sesudah Revolusi Oktober seperti terlihat dalam invasi militer Ukraina dan paksaan membubarkan Konstituante, hasil pemilihan umum, pada bulan Januari 1918.

Dari bagian-bagian Asia bekas Imperium Czar, Kaukasus dan Asia Tengah menghasilkan kebanyakan gerakan kemerdekaan. Kaum elite nasional, mayoritasnya anti-Bolshevik, menginginkan kemerdekaan wilayah, suatu status federal atau paling tidak otonomi.

Di Transkaukasia, suatu "Republik Federal Transkaukasia" memproklamasikan kemerdekaannya pada bulan April 1918 akan tetapi hanya berdiri satu bulan akibat persaingan antara tiga bangsa yang terlibat. Bulan Mei Georgia, Armenia dan Azerbaijan menyatakan kemerdekaannya akan tetapi kemerdekaan ini dibatasi oleh kehadiran pasukan-pasukan Jerman dan Turki dan kemudian pasukan-pasukan Inggris sampai tahun 1920. Menyusul pe-

¹Untuk perinciannya lihat Richard Pipes, *op. cit.*, hal. 109-110.

²Mengenai perkembangan di beberapa daerah non-Rusia seperti dilukiskan di bawah ini, *ibid.*, dan lihat Edward Hallet Carr, *The Bolshevik Revolution 1917-1923*, Vol. 1 (London, 1950), hal. 286-363.

narikan pasukan-pasukan ini, kaum Bolshevik lokal merebut kekuasaan di Azerbaijan pada bulan April 1920, sedangkan di Armenia di mana hampir tiada aparaturnya partai Bolshevik, Tentara Merah yang bergerak masuk dari jurusan Utara menumpas segala perlawanan lokal menjelang akhir tahun. Georgia di bawah pemerintah Menshevik yang mantap mampu mempertahankan kemerdekaannya sedikit lebih lama. Mula-mula Moskwa bahkan mengakuinya dan negara itu baru menjadi korban Tentara Merah pada awal 1921. Ini menandai selesainya penguasaan kembali seluruh Kaukasus oleh Rusia Soviet.

Di Asia Tengah,¹ dua pusat gerakan nasional, biarpun lemah dibandingkan dengan gerakan nasional di Transkaukasus, muncul di bawah pimpinan para cendekiawan konservatif dan liberal: gerakan Bashkir dan Kazakh di satu pihak dan gerakan Turkestan di lain pihak. Keduanya Muslim dan anti-Rusia, sebagai akibat kebijaksanaan pemukiman brutal Rusia yang pada tahun 1916 memuncak dalam penindasan berdarah suatu pemberontakan Kazakh-Kirghiz. Pusat-pusat ini bekerja sama dengan Gerakan Muslim se-Rusia yang menyerukan pada dua konperensi yang diadakan di Moskwa dan Kazan pada tahun 1917 suatu status federal untuk semua bangsa Muslim yang tinggal di wilayah-wilayah yang koheren. Pada bagian akhir 1917 badan-badan perwakilan politik bangsa Bashkir dan Kazakh (Alash-Orda dalam kasus Kazakh) dalam kerja sama dengan bangsa Kosak anti-Bolshevik menyatakan di Orenburg otonomi Kashkiria dan Kazakh. Hampir pada waktu yang sama diproklamasikan suatu Turkestan Otonomi di Kokand oleh Kongres Muslim Turkestan sebagai bagian Republik Federal Rusia mendatang. Prakarsa di sini diambil oleh "Dewan Islam" (Shura-yi Islam) dan "Masyarakat Keagamaan" (Ulema Gemiyati).

Dalam perang saudara segera menjadi jelas bahwa pasukan-pasukan Rusia anti-Bolshevik hanya menunjukkan sedikit kecenderungan untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus minoritas-minoritas nasional. Ketika Tentara Merah bergerak ke Asia Tengah banyak anggota gerakan Bashkir dan Kazakh menyatakan bersedia bekerja sama dengan kaum Bolshevik sebagai imbalan jaminan bahwa hak-hak otonomi mereka akan dihormati. Ketika pada musim semi tahun 1920 gerakan nasional Bashkir dirampas juga semua hak otonominya oleh suatu dekret Pemerintah Soviet, akibatnya ialah suatu pemberontakan anti-Bolshevik yang hanya bisa ditumpas dengan teror berdarah. Penyingkiran seluruh pengaruh lokal kemudian ternyata lengkap: dalam Pemerintah Republik Bashkiria yang dibentuk pada bagian akhir 1920 tiada seorang wakil Bashkir pun.

¹Mengenai perkembangan di Asia Tengah lihat juga H. Carrère d'Encausse, dalam Edward Allworth (ed.), *Central Asia, A Century of Russian Rule* (New York-London, 1967), hal. 224 dst.; Baymirza Hayit, *Turkestan zwischen Russland und China* (Amsterdam, 1971), hal. 206-297.

Bangsa Kazakh secara organisasi maupun militer tidak dalam posisi untuk memberikan perlawanan serius terhadap perampasan hak-hak mereka oleh kaum Bolshevik. Pada tahun-tahun berikutnya substansi nasional mereka lebih lanjut diperlemah akibat kelaparan yang dilaporkan minta sejuta korban pada tahun 1921 saja. Pengambilalihan kekuasaan di Turkestan oleh kaum Bolshevik lebih berdarah. Pemerintah Nasional di Kokand disingkirkan dari kekuasaan dengan kekerasan oleh tentara Soviet Tashkent pada bulan Pebruari 1918. Bagian Muslim kota Kokand dibakar sampai rata dengan tanah dan sekitar 10.000 orang dikatakan meninggal. Banyak orang Turkestan kemudian bergabung dengan gerakan perampok Basmachi yang taktik gerilyanya mengingatkan kita akan cara-cara kelompok Mujahidin di Afghanistan kini dan mendatangkan banyak kesulitan untuk pemerintah komunis di Asia Tengah sampai tahun 1926.

Di Siberia dan Timur Jauh, karena tiada kebudayaan nasional yang koheren, tidak terdapat banyak bukti gerakan nasional. Untuk mencapai penarikan pasukan-pasukan intervensi Jepang yang bekerja sama dengan orang-orang Rusia "Putih," Pemerintah Soviet melakukan suatu gerak tipu yang cerdik, yaitu menyetujui pembentukan suatu "Republik Timur Jauh."¹ Ini diproklamasikan di Verkhne-Udinsk pada bulan April 1920 atas perintah Moskwa sebagai suatu "negara penyangga" yang kelihatannya merdeka tetapi kenyataannya dikuasai kaum Bolshevik. Ia dimaksud meliputi daerah-daerah Transbaikalia, Amur, Sakhalin dan Propinsi Pantai akan tetapi mula-mula hanya terdiri atas Transbaikalia. Pemerintah terdiri atas lima orang komunis dan dua orang independen.² Namun ternyata mungkin memuaskan opini dunia paling tidak sampai batas-batas tertentu bahwa negara baru itu adalah suatu republik demokratis-borjuis yang merdeka. Ketika Tokyo selesai menarik tentara-tentara terakhir Jepang dari Timur Jauh Rusia di bawah tekanan Amerika pada bulan Oktober 1922, hanya soal beberapa minggu sebelum Republik Timur Jauh itu dihapus dan dimasukkan dalam Republik Soviet Federal Sosialis Rusia.

KEBIJAKSANAAN SOVIET TERHADAP NASIONALITAS-NASIONALITAS

Secara demikian kaum Bolshevik pada awal 1920-an telah berhasil menyelesaikan proses "menghimpun bumi Rusia," sebagian terbesar dengan

¹Lihat Carr, *op. cit.*, hal. 355-356. Laporan Carr diperkuat oleh suatu karya yang lebih baru, B.M. Shereshevskii, "Sibbiuro TsK RKP(b) i sozdanie Dal'nevostochnoi respubliki," dalam *Voprosy istorii KPSS* (Moskwa), 1972, No. 11, hal. 83.

²S. Kaplin, *Bol'sheviki na Dal'nem Vostoke* (Moskwa, 1960), hal. 62; dan M.A. Persic, *Dal'nevostochnaia respublika i Kitai* (Moskwa, 1962), hal. 43.

menggunakan kekerasan. Bulan Desember 1922 Republik-republik Soviet yang ada waktu itu dengan paksa disatukan dalam suatu federasi semu yang diperintah oleh Partai Komunis yang terpusat secara ketat.

Akan tetapi sesudah akhir perang saudara, kaum komunis Soviet untuk sementara waktu memandang perlu memberikan konsesi-konsesi kepada bangsa-bangsa non-Rusia dalam rangka mendapatkan dukungan mereka, sekalipun terlambat, untuk Revolusi.¹ Kebijakanaksanaan kebangsaan yang menyusul pada tahun-tahun terakhir 1920-an dan awal 1930-an dalam pandangan ke belakang mestinya tampak agak menarik bagi bangsa-bangsa non-Rusia Uni Soviet. Bahasa dan kebudayaan pribumi dimajukan, peraturan-peraturan mengenai pemakaian bahasa Rusia dalam lembaga-lembaga pemerintah dikendurkan. Proporsi bahasa-bahasa non-Rusia dalam seluruh penerbitan buku Uni Soviet meningkat dari 5,1% tahun 1913 menjadi 29,3% tahun 1934.

Sasaran utama kebijakanaksanaan ini ialah Sovietisasi daerah-daerah non-Rusia, artinya pertama-tama konsolidasi diktatur satu partai komunis. Proses ini akan dijalankan bukan dengan "mencangkokkan" suatu kasta pejabat keturunan Rusia yang lebih tinggi melainkan dengan menyiapkan dan menggunakan penduduk pribumi, atau paling tidak anggota-anggota tertentu. Metode ini pada waktu itu disebutkan sebagai "korenizaciia" (dari "koren" = akar, yaitu membuat berakar) atau "nation-building." Inti kebijakanaksanaan ini ialah "nasionalisasi" administrasi Partai dan Negara, yaitu peningkatan kerja sama orang-orang non-Rusia dalam aparatur-aparatur ini. Sesuai dengan itu proporsi pribumi dalam organisasi-organisasi partai wilayah-wilayah nasional meningkat menjadi 53,8% tahun 1932. Akan tetapi kebijakanaksanaan ini juga mempunyai akibat-akibat sampingannya, dalam arti bahwa proses asimilasi dihentikan (misalnya asimilasi orang-orang Bashkir dengan bangsa Tartar) dan bahwa muncul suatu kesadaran nasional yang kuat di mana sebelumnya hanya terdapat kesadaran yang lemah (misalnya di antara bangsa-bangsa Muslim di Asia Tengah).

Dengan awal Stalinisme pada bagian akhir 1920-an, tanda-tanda pertama perubahan mulai tampak. Usaha kolektivisasi sejak 1929, pemukiman paksa kaum nomad di Asia Tengah, pengasingan dan kelaparan khususnya berat

¹Untuk pengertian berikut mengenai kebijakanaksanaan-kebijaksanaan 1920-an kami ingin mengucapkan terima kasih khusus kami kepada rekan kami Gerhard Simon yang mengizinkan kami membaca naskah sebuah buku yang akan terbit mengenai kebijakanaksanaan nasionalitas-nasionalitas Soviet. Lihat juga G. Simon, "Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion seit Stalin," dalam G. Brunner dan B. Meissner (ed.), *Nationalitätenprobleme in der Sowjetunion und Osteuropa* (Köln, 1982), hal. 42-66; Richard Pipes, "Solving the Nationality Problem," dalam *Problems of Communism*, September-Oktober 1967, hal. 125-131; dan R. Szporluk, "Nationalities and the Russian Problem in the USSR," dalam *Journal of International Affairs*, 1973, No. 1, hal. 22-40.

bagi bangsa-bangsa non-Rusia (Ukraina, Kazakh). Kebencian akibatnya di wilayah-wilayah nasional terutama diarahkan pada orang-orang Rusia sebagai personifikasi kekuasaan pemerintah pusat. Bekas elite bangsa-bangsa tradisi Islam misalnya tidak mau ikut dalam kolektivisasi dan dalam perlakuan jahat terhadap para mullah dan mesjid-mesjid. Stalin memutuskan bahwa telah tiba waktunya untuk suatu pembalikan. Pada tahun 1934 pimpinan partai melepaskan aksioma yang berlaku sejak hari-hari Lenin bahwa hambatan utama untuk koeksistensi damai bangsa-bangsa Uni Soviet adalah sovinsisme Rusia Raya. Dengan dilancarkannya "patriotisme Soviet" dimulai kebijaksanaan Rusifikasi yang akan mencapai puncaknya dalam likuidasi fisik elit pimpinan bangsa-bangsa non-Rusia yang hampir sempurna dalam teror tahun 1936 dan 1937 dan deportasi bangsa-bangsa seluruhnya dalam Perang Dunia II.

Menyusul kebijaksanaan Rusifikasi muncul pada dasawarsa 1930-an suatu rasisme Rusia Raya putih baru yang masih kelihatan bahkan kini. Sejak itu istilah "Rusia murni" dipakai lagi dengan senang hati dan kebanggaan. Dan ucapan "pantat hitam" menjadi sebutan umum dalam bahasa kolokial untuk semua orang yang gelap kulitnya dan, bila diterapkan pada Uni Soviet, khususnya orang-orang Transkaukasia dan Asia Tengah, maupun istilah diskriminasi "chuchmeki" khususnya untuk orang-orang Muslim Uni Soviet.

Sesudah Stalin meninggal, kelihatan tendensi-tendensi menuju liberalisasi, juga di bidang kebijaksanaan kebangsaan. Tindakan-tindakan desentralisasi Khrushchev tahun 1957 mengungkapkan maksud pimpinan baru untuk kembali ke kebijaksanaan dasawarsa 1920-an. Akan tetapi tidak lama kemudian mulai suatu trend ke arah yang berlawanan yang menghasilkan re-sentralisasi paling tidak dalam kebijaksanaan pendidikan dan di sektor ekonomi. Pada gilirannya ini menyebabkan giatnya kembali gerakan oposisi nasional yang mempunyai beberapa titik temu dengan aliran-aliran pembangkangan yang bermotivasi keagamaan dan politik.¹ Oposisi nasional muncul di bagian Eropa Uni Soviet khususnya di Ukraina dan Republik-republik Baltis, dan di wilayah-wilayah Asia khususnya di Georgia dan Armenia. Akan tetapi hidupnya kembali minat atas kebudayaan Islam yang waktu belakangan ini dapat dilihat di Azerbaijan dan -- sampai tingkat tertentu -- di Asia Tengah juga ikut menyebabkan munculnya oposisi nasional di antara bangsa-bangsa yang bersangkutan.

Suatu trend lain, yaitu trend demografis, di Uni Soviet memusingkan pimpinan Kremlin. Proporsi bangsa-bangsa non-Rusia dari seluruh penduduk Uni

¹Mengenai gerakan pembangkangan di Uni Soviet lihat Peter Hübner, "The Political and Social Relevance of the Dissidents," dalam *The Soviet Union 1978-1979* (New York, 1980), hal. 83-93.

Soviet hampir mencapai dan bahkan melampaui 50%.¹ Suatu aspek lain khususnya berkaitan dengan bangsa-bangsa Asia Tengah Uni Soviet. Sejak akhir Perang Dunia II angka kelahiran bangsa-bangsa Slavis dan Baltis menurun sedangkan angka kelahiran bangsa-bangsa tradisi Islam (kecuali bangsa Tartar) meningkat. Dengan demikian bukan saja bobot demografi melainkan juga bobot politik bangsa-bangsa Muslim meningkat. Persentase bangsa Rusia dalam penduduk menurun sejak 1950-an bukan saja di republik-republik Asia Tengah dan di Azarbaijan tetapi juga di Georgia dan Armenia.

Sebagai keseluruhan, dapat dikatakan bahwa masalah nasional di Uni Soviet masih jauh dari "penyelesaiannya." Sebaliknya, meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa non-Rusia, yang benih-benihnya ditaburkan oleh de-Stalinisasi, terus mengumpulkan kekuatan dan dalam jangka panjang bisa menjadi suatu faktor penting dalam merangkaknya destabilisasi sistem politiknya.

KEBIJAKSANAAN SOVIET AWAL TERHADAP ASIA

Menjelang akhir perang saudara Rusia, Moskwa mulai menaruh minat yang lebih besar atas bagian-bagian Asia yang di seberang perbatasan bekas Imperium Czar. Minat baru ini berkembang di bawah tanda kembar diplomasi tradisional dan revolusi dunia.

Adalah permusuhan timbal-balik dengan negara-negara Barat dan ketegangan hubungannya dengan Jerman yang membuat diplomasi Soviet mengarahkan pandangannya ke Timur. Trend ini terungkap dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan Iran, Afghanistan dan Turki pada musim semi 1921. Sejak pemberontakan golongan komunis Jerman buyar pada musim semi 1920 dan gerak maju Tentara Merah berhenti di pintu gerbang Warsawa pada musim panas 1920, harapan kaum Bolshevik bahwa revolusi dunia akan berlangsung terus pertama di Eropa ternyata suatu impian belaka. Dalam ukuran harapan ini menghilang perhatian diarahkan ke Asia.

Secara demikian, sekalipun karena alasan-alasan yang berlainan, kedua lembaga kebijaksanaan luar negeri Soviet yang besar, yaitu Komisariat Urusan Luar Negeri Rakyat (Narkomindel) dan Internasional Komunis (Komintern) sepakat pada prinsipnya mengenai tekanan regional yang harus diletakkan pada kegiatan-kegiatan mendatang mereka. Namun terdapat perbedaan di sana-sini. Ini dapat diterangkan dengan kenyataan bahwa sementara Komintern tetap menganggap dirinya terikat untuk memajukan Revolusi

¹Menurut sensus 1979. Mengenai ini dan berikutnya lihat Gerhard Simon, "The Non-Russian Peoples as Elements of Change in Soviet Society," dalam *The Soviet Union 1978-1979* (New York, 1980), hal. 65-74; dan karyanya *Russen und Nicht-russen in der UdSSR*, Laporan Institut Federal untuk Studi Eropa Timur dan Internasional (Köln), No. 11, 1981).

Internasional, Pemerintah Soviet dan Narkomindel semakin berusaha untuk menjamin keamanan Negara Soviet yang baru didirikan itu dan memperluas pengaruh Soviet melintasi perbatasan.

Pemahaman Lenin mengenai konstelasi kekuatan yang kompleks dan terus-menerus berubah di negara-negara Asia -- seperti pemahaman lain-lain pemimpin Soviet -- terbatas dan putusan-putusannya biasanya didasarkan atas teori dan bukan atas bukti, skematis dan dangkal. Sampai hari ia meninggal, ia tidak pernah menganggap berguna mengembangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan terpisah yang disesuaikan dengan masing-masing negara Asia. Bukan soal luar biasa baginya menyebutkan Cina, Turki dan Iran dalam satu nafas. Ia bertindak atas asumsi dasar bahwa mungkinlah memasukkan mayoritas negara-negara Asia dalam kerangka model-model revolusioner yang disusun untuk negeri-negeri koloni dan semi koloni.

Lenin melihat sebagai tugas pokoknya memajukan revolusi proletar. Karena menurut ajaran Karl Marx ini akan pecah di negara-negara yang maju ekonominya, perspektifnya sudah barang tentu Eropasentris. Mula-mula Lenin sama sekali tidak melihat adanya potensi revolusi "negara-negara Timur"¹ tetapi memandang mereka semata-mata sebagai korban pemerasan kapitalis.² Kalau ia menggunakan istilah "Asia," hal itu hanya dilakukan dengan maksud untuk menyebutkan ciri keadaan yang bersifat reaksioner, despotis dan tak berkembang di Rusia.³

Baru pada tahun 1908 ia menemukan unsur-unsur revolusioner di Cina dan India dan meramalkan bahwa kekuatan-kekuatan proletariat Asia dan Eropa akan bersatu dalam perjuangan melawan kapitalisme.⁴ Ia sangat terkesan dengan revolusi Cina tahun 1911 dan mengembangkan nosi bahwa dunia menyaksikan awal serangkaian revolusi demokratis di negeri-negeri semi koloni (Cina, Iran, Turki) dan negeri-negeri koloni (India, Indonesia) Asia yang akan bertemu dengan perebutan kekuasaan proletariat di Eropa dan

¹Yang dimaksud dengan "negeri-negeri Timur" di Uni Soviet sampai Perang Dunia II adalah negeri-negeri koloni dan semi koloni Asia dan Afrika Utara. Lihat *Bol'shaia sovetskaia entsiklopediia*, Vol. 13 (Moskwa, 1929), hal. 290 dan Vol. 9 (Moskwa, 1951), hal. 193. Kini istilah itu digunakan untuk "negeri-negeri Asia dan Afrika (terutama Afrika Utara)," lihat *ibid.*, Vol. 5 (Moskwa, 1971³), hal. 389.

²V.I. Lenin, *Sochineniia*, Vol. 3 (Moskwa, 1950³), hal. 522; *ibid.*, Vol. 4 (Moskwa, 1946), hal. 182; dan *ibid.*, Vol. 5 (Moskwa, 1951), hal. 74-75.

³*Ibid.*, Vol. 21 (Moskwa, 1950), hal. 345-346.

⁴Mengenai paragraf ini lihat *ibid.*, Vol. 15 (Moskwa, 1947), hal. 162, 164-165; *ibid.*, Vol. 17 (Moskwa, 1950), hal. 499-500; *ibid.*, Vol. 19 (Moskwa, 1948), hal. 65-66; dan *ibid.*, Vol. 22 (Moskwa, 1948), hal. 296-298.

melancarkan suatu era baru dalam sejarah dunia. Antara 1914 dan 1916 ia sampai pada keyakinan bahwa perang-perang kemerdekaan nasional mendatang di Asia akan memperlemah negara-negara imperialis dan meningkatkan harapan suatu revolusi proletar di negara-negara ini.

Dari semuanya itu Lenin menarik kesimpulan bahwa untuk waktu itu dan waktu sesudahnya "gerakan-gerakan borjuis-demokratis" di Asia harus dianggap sebagai salah satu sekutu penting suatu proletariat Eropa yang memberontak.¹ Teori ini berbeda secara radikal dengan Marxisme klasik abad ke-19. Secara demikian, bahkan sebelum Revolusi Oktober Rusia, Lenin meletakkan landasan untuk strategi kebijaksanaan Soviet mendatang terhadap Asia. Ia mengajukan inti teori ini, yaitu bahwa dukungan prioritas harus diberikan kepada gerakan borjuis-nasional sambil menunggu timbulnya gerakan massa proletariat yang kuat, sebagai bahan pembicaraan pada Kongres Komintern II pada musim panas 1920. Dilawan oleh M.N. Roy dari India dan didukung oleh H. Sneevliet dari Negeri Belanda, ia mampu menggoalkan pokok-pokoknya. Dengan demikian "Dalil-dalil mengenai masalah nasional dan kolonial" yang diterima baik oleh Kongres memuat baris-baris berikut:

"Semua partai komunis harus mendukung dengan tindakan gerakan-gerakan pembebasan revolusioner negeri-negeri ini. Bentuk dukungan semacam itu harus dibicarakan dengan partai komunis negeri yang bersangkutan kalau ada partai semacam itu."²

Ini meratakan jalan bagi golongan komunis di seluruh dunia untuk bergabung dengan kekuatan-kekuatan "non-proletar" yang besar jumlahnya. Kekuatan-kekuatan ini akan membebaskan negeri-negeri mereka dari pengaruh negara-negara imperialis dan mengadakan suatu revolusi borjuis-demokratis. Tujuan jangka panjangnya ialah revolusi proletar yang akan menempatkan golongan komunis dalam kekuasaan. Adalah maksud Komintern bahwa aliansi golongan komunis setempat dengan kekuatan-kekuatan borjuis-demokratis secara *a priori* harus bersifat taktis, sementara dan instrumental.

Lapangan percobaan pertama di mana strategi yang dikembangkan pada Kongres Komintern II itu dicoba adalah Cina. Di sini dapat dilihat dengan

¹Mengenai paragraf ini lihat *ibid.*, Vol. 18 (Moskwa, 1948), hal. 143-146; *ibid.*, Vol. 20 (Moskwa, 1950), hal. 378; *ibid.*, Vol. 21 (Moskwa, 1950), hal. 368; V.I. Lenin, *Polnoe sobranie sochinenii*, Vol. 41 (Moskwa, 1963), hal. 166-167; H. Carrère d'Encausse dan S.R. Schram, *Marxism and Asia* (London, 1969), hal. 150 dst.; A.S. Whiting, *Soviet Policies in China 1917-1924* (Stanford, 1968), hal. 42 dst; *Der Zweite Kongress der Kommunistischen Internationale, Protokoll der Verhandlungen vom 19. Juli in Petrograd und vom 23. Juli bis 7. August 1920 in Moskau* (Hamburg, 1921), *passim*.

²*Ibid.*, hal. 230.

jelas tiga sasaran global kebijaksanaan Soviet.¹ Pertama, antara 1920 dan 1924 Narkomindel merayu Pemerintah Beijing untuk mendapatkan pengakuan diplomatik dan ditandatanganinya suatu perjanjian perdagangan dan untuk mempertahankan dan memulihkan pengaruh Rusia di Manchuria dan Mongolia berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional. Kedua, pada waktu yang sama Komintern dalam suasana komplotan di Shanghai membantu mendirikan suatu partai komunis dengan penggulingan Pemerintah Beijing sebagai salah satu tujuan terpentingnya. Pada waktu yang sama ini mengungkapkan sasaran Soviet jangka panjang, yaitu menjadikan Cina suatu negara komunis. Ketiga, sejak 1922 Moskwa mendekati Kuomintang (sebagai gerakan "borjuis-demokratis" yang paling penting) dan memaksa kaum komunis Cina untuk membentuk satu blok dengan gerakan ini. Dari 1924 sampai 1927 Uni Soviet memperlakukan blok ini sebagai sekutu Cina utamanya.² Aliansi dengan Kuomintang yang dimaksud sebagai suatu alat jangka menengah dalam pencapaian tujuan-tujuan Soviet itu didasarkan atas harapan bahwa partai ini paling mampu menyatukan Cina, menjauhkannya dari semua pengaruh asing (non-Soviet), dan secara demikian menyiapkannya untuk pengambilalihan kekuasaan oleh kaum komunis (di bawah pimpinan Soviet).

Strategi tiga sasaran yang untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam kasus model Cina ini menggambarkan dengan jelas keluwesan taktis tetapi juga ketidakjujuran ekstrim dengan mana pimpinan Kremlin beroperasi, khususnya sehubungan dengan "sekutu-sekutu" borjuis-demokratisnya. Strategi ini kemudian akan diterapkan terhadap lain-lain negara Asia juga, sekalipun dengan tekanan yang berbeda dan dalam sejumlah variasi. Dalam kasus Cina ia gagal. Kuomintang kanan Chiang Kaishek, yang dimaksud oleh Stalin untuk "dimanfaatkan sampai akhirnya, diperas seperti sitrun, dan kemudian dibuang"³ pada waktunya melihat permainan ganda Moskwa itu dan memutuskan hubungan sama sekali dengan kaum komunis Soviet maupun Cina pada tahun 1927.

Pada waktu itu komponen-komponen revolusi internasional dan nasional Rusia dalam politik luar negeri Soviet dalam praktek telah lama membaur. Suatu perubahan dalam trend ke arah komponen nasional sudah menjadi jelas

¹Untuk perinciannya lihat D. Heinzig, *Sowjetische Militärberater bei der Kuomintang 1923-1927* (Baden Baden, 1978), hal. 23-40, 56-98.

²Mengenai ini dan berikutnya lihat komentar Borodin dalam L. Fischer, *Russia's Road from Peace to War, Soviet Foreign Relations 1917-1941* (New York-Evanston-London), 1969), hal. 118-119.

³Dikutip dari *Die chinesische Frage auf dem 8. Plenum der Exekutive der kommunistischen Internationale*, (Hamburg-Berlin, 1928, cetak ulang Feltrinelli, Milan, 1967), hal. 124.

pada musim panas 1919. Pada waktu itu "Deklarasi Karakhan" asli yang memuat tawaran untuk menyerahkan pemilikan Kereta Api Timur Cina kepada Cina tanpa tuntutan kompensasi mana pun, direvisi.¹ Menyusul buyarnya aliansi dengan Kuomintang, Stalin memecahkan dikotomi antara kedua komponen itu dan secara demikian pada waktu yang sama memberikan pembenaran teoretis untuk predominasi komponen nasional: ia mendekritkan dalam suatu ramuan realisme dan pokrul bambu bahwa seorang revolusioner dan internasionalis adalah seorang yang bersedia untuk bangkit dan membela Uni Soviet tanpa reserva maupun syarat.² Kendati sejumlah lip service kepada partai-partai komunis luar negeri yang lebih liberal, itu sampai sekarang merupakan kredo politik luar negeri pimpinan Kremlin.

EKSPANSIONISME SOVIET DI ASIA

Sekitar waktu itu Uni Soviet telah memberikan cukup bukti bahwa ia ber tekad bukan saja untuk mempertahankan *status quo* milik-milik wilayah Rusia di Asia melainkan juga untuk menguasai dan bahkan memperluas lingkungan pengaruh Soviet ke luar wilayah-wilayah ini.

Usaha untuk mempertahankan hak-hak khusus Rusia di Manchuria telah disebutkan. Di antaranya konversi Mongolia Luar menjadi suatu kuasi-protektorat Soviet dan usaha-usaha serupa yang diarahkan pada Sinkiang merupakan contoh-contoh yang menyolok. Mongolia jatuh di bawah kedaulatan Manchu pada tahun 1691. Menyusul revolusi Cina tahun 1911, bangsa Mongol mula-mula menyatakan kemerdekaan mereka akan tetapi di bawah tekanan Rusia dan Cina dipaksa menandatangani suatu perjanjian dengan St. Petersburg dan Beijing pada tahun 1915 yang *de jure* membentuk suatu status otonom dalam batas-batas kedaulatan Cina.

Bulan Juni 1921 pasukan-pasukan Soviet memasuki Mongolia Luar. Moskwa membenarkan intervensinya ini dengan menyatakannya sebagai tanggapan atas seruan akan bantuan dari "Pemerintah Rakyat Sementara Mongolia" yang dibentuk tidak lama sebelumnya dengan dukungan Soviet di bumi Soviet.³ Janji bahwa Rusia Soviet akan menarik pasukan-pasukannya

¹Naskah asli dalam V. Vilenskii, *Kitai i Sovetskaia Rossiia*, dikutip dari J. Degras (ed.), *Soviet Documents on Foreign Policy*, Vol. 1 (1917-1924) (London-New York-Toronto, 1951), hal. 158 dst.; dan naskah yang direvisi dalam *Dokumenty vneshnei politiki*, Vol. 2 (Moskwa, 1958), hal. 221 dst.

²Stalin pada 1 Agustus 1927. Lihat I.V. Stalin, *Sochineniia*, Vol. 10 (Moskwa, 1954), hal. 51.

³Mengenai ini dan berikutnya lihat J. Eudin dan R.C. North, *Soviet Russia and the Far East, 1920-1927* (Stanford, 1957), hal. 124 dst.; dan *Dokumenty vneshnei politiki*, Vol. 4 (Moskwa, 1960), hal. 179-180.

segera setelah pasukan-pasukan Pengawal Putih yang menduduki Mongolia dikalahkan tidak pernah dipenuhi. Sebaliknya, Moskwa menjadikan Mongolia Luar suatu kuasi-protektorat. Biarpun perjanjian Cina-Soviet tanggal 31 Mei 1924 mengukuhkan kembali kedaulatan Cina, perjanjian Mongolia-Soviet 5 Nopember 1921 di mana pemerintah baru Mongolia diakui sebagai "satu-satunya pemerintah Mongolia yang sah" tetap berlaku. Pasukan-pasukan Soviet ditarik pada musim semi 1925, setelah "Republik Rakyat Mongolia" diproklamasikan, tanda selesainya Sovietisasi. *De jure* Pemerintah Cina tidak mengakui pemisahan Mongolia Luar dari Cina sampai tahun 1945 dan hanya di bawah tekanan sekutu-sekutunya. Usaha Soviet semacam itu yang dilakukan sejak awal 1930-an sampai akhir Perang Dunia II dengan maksud untuk menjadikan Sinkiang sebagai satelit Soviet akhirnya gagal.¹

Contoh-contoh lain kebijaksanaan aneksasi Soviet di Asia diberikan oleh Tannu Tuva dan "Wilayah-wilayah Utara" Jepang. Tannu Tuva, pada perbatasan Soviet-Mongolia sekarang ini, jelas termasuk Cina sampai 1911 akan tetapi diduduki oleh pasukan-pasukan Rusia menyusul penggulingan Dinasti Manchu dan secara formal dijadikan sebuah protektorat. Pada tahun 1921 Moskwa menegakkan klaimnya atas warisan Czar-nya itu dan mendirikan -- setelah empat tahun lagi kedaulatan Cina -- suatu kuasi-protektorat Soviet. Pada tahun yang sama Pemerintah Soviet "secara khidmat" berjanji bahwa ia "sama sekali tidak menganggap Tannu Tuva ... sebagai wilayahnya dan tidak mempunyai aspirasi apa pun."² Pada 13 Oktober 1944 janji ini dilanggar dan Tannu Tuva dicaplok secara formal. "Wilayah-wilayah Utara" Jepang, yaitu pulau-pulau Kunashiri, Etorofu, Habomai dan Shikotan, tidak pernah termasuk Rusia. Pulau-pulau itu diduduki oleh pasukan-pasukan Soviet pada akhir Perang Dunia II. Setelah suatu periode singkat ketika Khrushchev menunjukkan suatu sikap yang lebih luwes, Pemerintah Soviet secara konsisten sampai sekarang menolak untuk berunding dengan Tokyo mengenai pulau-pulau itu -- terutama untuk tidak menciptakan suatu preseden untuk klaim-klaim teritorial mendatang di pihak Cina dan negara-negara Eropa masing-masing.

Kasus terakhir ekspansionisme Soviet di Asia, invasi militer ke Afghanistan, dalam banyak hal mengingatkan kita pada contoh Mongolia. Seperti dalam kasus Mongolia tahun 1921, Uni Soviet menanggapi "seruan bantuan" dari suatu pemerintah tandingan pro-Soviet yang khusus dibentuk dengan maksud itu. Metode ini, tetapi juga konversi Afghanistan menjadi suatu kuasi-protektorat Soviet membuat wajar bicara tentang "Mongolisasi" Afghanistan. Kita hanya bisa berspekulasi mengenai alasan-alasan intervensi Soviet itu. Suatu ramuan hal-hal berikut kiranya paling masuk akal:

¹D.J. Dallin, *Soviet Russia and the Far East* (New Haven, Conn., 1948), hal. 91-103, 361-368.

²*Ibid.*, hal. 85.

- Afghanistan di bawah Amin mengancam akan keluar dari lingkungan pengaruh Soviet;
- Pendudukan Afghanistan membawa Moskwa satu langkah maju untuk mewujudkan impian lama Rusia untuk mencapai Samudra Hindia;
- Mengingat intensifikasi pertarungan global untuk menjamin bagian suplai minyak dunia kelihatan lebih penting kini untuk mencapai tujuan ini dalam rangka mengamankan akses yang lebih baik ke negara-negara penghasil minyak Teluk Parsi/Arab;
- Kesempatannya tampak baik karena Amerika Serikat sibuk dengan krisis Iran.

Tidak diragukan bahwa Moskwa juga mengejar sasaran-sasaran ekspansionis dengan menjalin hubungan kuasi-aliansi dengan Vietnam pada tahun 1978. Akan tetapi berbeda dengan Afghanistan, berkat letak jauhnya dari Uni Soviet Vietnam tidak perlu takut bahwa ia akan menjadi korban berikut "bantuan persaudaraan" Soviet.

KEBIJAKSANAAN ASIA SOVIET DI BAWAH STALIN

Dalam pertikaianya dengan Trotsky, sampai saat terakhir Stalin menganjurkan agar aliansi dengan Kuomintang dipertahankan. Tampaknya terutama fiasko akibat kebijaksanaan terhadap Cina inilah yang membuatnya mengambil suatu sikap yang acuh tak acuh dan bahkan curiga terhadap gerakan-gerakan borjuis-demokratis dan bahkan terhadap gerakan-gerakan komunis di negara-negara Asia, terhadap gerakan-gerakan borjuis-demokratis karena contoh Cina menunjukkan bahwa tidaklah mudah mengikat mereka untuk menarik kereta komunis, dan terhadap gerakan-gerakan komunis karena mereka terlalu lemah. Stalin mempertahankan sikap ini sampai ia meninggal dan hal itu terungkap dalam tiadanya perhatian di pihak Uni Soviet untuk gelanggang Asia. Moskwa kembali lebih menangani masalah-masalah domestiknya dan Eropa.

Menyusul perebutan kekuasaan oleh kaum Nazi di Jerman, "strategi front rakyat" diresmikan pada Kongres Komintern VII tahun 1935. Ini disertai strategi "front rakyat anti-imperialis" yang akan diterapkan pada negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial dan mempunyai nada bawah hidupnya kembali formula aliansi Lenin yang diterima pada Kongres Komintern II. Akan tetapi mengenai Asia, semuanya itu kebanyakan tinggal teori. Dan menyusul perumusan teori "dua kubu" oleh Zhudanov pada bulan September 1947, kaum borjuis nasional beberapa negara Asia bahkan dituduh memandang "para pekerja sebagai musuh yang lebih besar daripada dominasi oleh kaum imperialis

asing.”¹ Hanya di Indonesia dan Vietnam terdapat suatu front anti-imperialis di mana golongan komunis memainkan peranan utama. Gerakan-gerakan seperti Kemalisme, Ghandisme, Zionisme dan Pan-Arabisme harus dilawan sebagai ideologi-ideologi reaksioner dan Nehru adalah contoh utama seorang borjuis yang telah menjadi seorang ”budak lihay” yang melayani Inggris dan Amerika Serikat.² Kesimpulan yang ditarik oleh Moskwa dari pandangan dunia bipolar Zhudanov itu adalah bahwa dukungan untuk kekuatan-kekuatan komunis dan para simpatisan mereka di negara-negara ”bermusuhan” harus diperkuat.

KEBIJAKSANAAN ASIA SOVIET SESUDAH STALIN

Pandangan dunia Soviet yang berurat-berakar ini tidak mulai berubah sampai kematian Stalin. Pada pertengahan 1950-an Uni Soviet mulai menjalin hubungan dengan pemerintah-pemerintah negara-negara Dunia Ketiga yang baru lahir dan sedang lahir. Perdagangan dengan negeri-negeri ini diperluas dan dalam beberapa kasus (India, Mesir, Afghanistan, Indonesia) diberikan bantuan konkrit.³ Akan tetapi bahkan pada tahun 1980 perdagangan dengan negeri-negeri berkembang hanya mencapai sekitar 10% dari seluruh perdagangan luar negeri Soviet.⁴ Sekitar 12% seluruh perdagangan Soviet adalah dengan negeri-negeri Asia.⁵ Rekan-rekan dagang Asia Soviet yang paling besar adalah Jepang (dengan 26% seluruh perdagangan dengan Asia) dan India (17%), disusul oleh Mongolia (8%), Iran, Vietnam, Korea Utara dan Afghanistan.

Kaum komunis pribumi di negara-negara berkembang didorong oleh Moskwa untuk bekerja atas dasar hukum di hari depan dan secara berangsur-angsur merongrong lain-lain partai di negeri masing-masing. Keterangan yang diberikan untuk kenyataan bahwa mayoritas negeri-negeri ini tidak menempuh jalan sosialis dirumuskan oleh Moskwa dalam teori-teori ”jalan non-kapitalis” dan ”negara-negara demokrasi nasional.”⁶ Negara-negara yang

¹Mengenai ini dan berikutnya lihat *Bol'shevik* (Moskwa), 15 Desember 1947, dikutip dari Carrère d'Encausse dan Schram, *op. cit.*, hal. 262-263.

²*Voprosy ekonomiki* (Moskwa, 1949), No. 9, dikutip dari Carrère dan Schram, *op. cit.*, hal. 266-267.

³Lihat G. Jukes, *The Soviet Union in Asia* (Sidney-London-Melbourne-Brisbane-Singapura, 1973), hal. 252 dst.

⁴”Vneshnaia torgovlia SSSR v 1980 g.,” *Statisticheskii sbornik* (Moskwa, 1981), *passim*.

⁵Mengenai ini dan berikutnya, *ibid.*, hal. 8, 10-12.

⁶Lihat Th. W. Robinson, ”Soviet Policy in Asia,” dalam W.E. Griffith (ed.), *The Soviet Empire: Expansion and Detente* (Lexington, Mass.-Toronto, 1976), hal. 290.

relatif pro-Soviet pada waktu mana pun tahun-tahun belakangan ini diberi julukan "negeri-negeri yang berorientasi sosialisme." Negeri-negeri ini kini berjumlah 20 di Asia dan Afrika, termasuk Afghanistan, Birma, Irak, Kamboja, Suriah dan Yaman Selatan di Asia.¹

Suatu alat penting yang digunakan oleh Uni Soviet untuk mengumpukan negara-negara ini ke Blok Soviet adalah diadakannya perjanjian-perjanjian kerja sama. Kecuali Birma dan Kamboja, semua "negeri yang berorientasi sosialisme" di Asia yang disebutkan di atas mengadakan "perjanjian-perjanjian persahabatan dan kerja sama" semacam itu dengan Moskwa: Irak tahun 1972, Afghanistan tahun 1978, Yaman Selatan tahun 1979, dan Suriah tahun 1980. Contoh India, negara Asia pertama yang menandatangani perjanjian semacam itu pada tahun 1971, menunjukkan bahwa Uni Soviet juga berminat untuk menjalin hubungan berdasarkan perjanjian semacam itu dengan negeri-negeri terpilih dari Dunia Ketiga yang tidak (belum) dihitung sebagai "berorientasi sosialisme" akan tetapi paling tidak dianggap "anti imperialis," yaitu anti-Barat dalam arti yang luas. Sebagai imbalan bantuan ekonomi dan militer, negara-negara ini diharap mendukung politik luar negeri Blok Soviet, mengizinkan propaganda Soviet yang leluasa di negeri-negeri mereka, dan mengizinkan Moskwa membina hubungan dengan partai-partai komunis dan lain-lain kelompok kiri pribumi yang pro-Moskwa. Di Asia kini terdapat 12 partai dan 8 kelompok semacam itu dalam "gerakan pembebasan nasional."²

Tujuan jangka panjang kebijaksanaan Soviet terhadap negeri-negeri berkembang ialah: (1) meningkatkan jumlah "negeri yang berorientasi sosialisme"; (2) mengubah mereka dari negeri "generasi pertama" menjadi "negeri generasi kedua" (dengan "kekuasaan demokratis rakyat" dan dengan "partai-partai rakyat revolusioner sebagai pemimpin");³ dan (3) mengembangkan mereka lebih lanjut menjadi negara-negara "sosialis penuh" dan akhirnya mengikat mereka dengan Blok Soviet.

Contoh-contoh Indonesia, Mesir dan Somalia menunjukkan bahwa langkah-langkah mundur dapat diambil pada jalan ini. Dan bahkan di mana negara-negara muncul di Asia yang harus diakui oleh Moskwa sebagai

¹R.A. Ul'ianovskii, "O stranakh sotsialisticheskoi orientatsii," dalam *Kommunist* (Moskwa), 1979, No. 11, hal. 117; dan *Spravozhnik propagandista-mezhdunarodnika* (Moskwa, 1979), hal. 116.

²Lihat *Problems of Communism*, Maret-April 1982, hal. 73, 78, 79.

³E. Primakov, "Strany sotsialisticheskoi orientatsii: trudnyi no real'nyi perekhod k sotsializmu," dalam *Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia* (Moskwa), 1981, No. 7, hal. 14.

“sosialis” bahkan kini, hal itu tidak mencegah sengketa antara Moskwa dan Beijing mempengaruhi negara-negara ini dan membuat mereka mengambil sikap anti-Soviet (Cina) atau paling tidak sikap independen (Vietnam sampai 1978 dan Korea Utara). Di sini, seperti reaksi terhadap intervensi Soviet di Afghanistan dan intervensi Vietnam yang didukung Uni Soviet di Kamboja telah menunjukkan, trend-trend berlawanan menjadi jelas yang kadang-kadang menghambat kebijaksanaan ekspansionis Soviet di Dunia Ketiga.

Bahkan pada waktu Stalin masih hidup terjadi suatu peristiwa yang akan menentukan kebijaksanaan Asia Moskwa: kemenangan komunis Cina dan pembentukan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Stalin tidak menduga perkembangan ini. Ia memandangnya dengan perasaan bercampur kalau tidak dengan syak wasangka. Mao Zedong telah menyatakan keinginannya akan kemerdekaan dari Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) pada beberapa kesempatan sebelumnya. Berbeda dengan Mongolia dan Korea Utara, kaum komunis Cina (seperti juga kaum komunis Vietnam tahun 1945) tidak mendapatkan kekuasaan dengan bantuan Tentara Merah. Yang sama berlaku untuk Yugoslavia di Eropa Timur, dan Stalin jelas takut bahwa Mao akan menjadi seorang “Tito Cina.”

Pada tahun 1949 Cina sudah mulai memuji “jalan Cina” sebagai suatu model untuk banyak negeri Dunia Ketiga, khususnya di Asia.¹ Ucapan-ucapan itu tidak dibantah oleh Moskwa. Bahkan mungkin bahwa di belakang layar dicapai semacam “gentlemen’s agreement” antara Moskwa dan Beijing pada pertengahan 1950-an bahwa bagian-bagian Asia Tenggara (Birma, Muangthai, Laos, Kamboja, Malaya, Vietnam) dialokasikan untuk lingkungan pengaruh Cina, sedangkan India, Afghanistan dan seluruh Asia Barat dibiarkan untuk lingkungan pengaruh Soviet; dan Indonesia dikecualikan sebagai “tanah tak bertuan.”² Akan tetapi sebagai keseluruhan, dapat diasumsikan bahwa Kremlin merasa peri laku Cina sebagai suatu tantangan yang harus ditanggapinya dengan meningkatkan keterlibatannya di Asia.

Menyusul putusnya hubungan dengan Cina, Uni Soviet menghadapi suatu situasi yang sama sekali baru di Asia. Ia sekarang harus menghadapi dua saingan, kekuatan global Amerika Serikat dan kekuatan regional besar Cina. Ketika pada tahun 1969 Presiden Nixon mengakui prospek penarikan Amerika dari daratan Asia, Moskwa melihatnya sebagai suatu kesempatan baik untuk mengisi kekosongan kekuatan akibatnya dengan potensinya sendiri. Ia menempuh suatu pendekatan ganda. Di satu pihak, Kremlin memutuskan un-

¹*Narodnyi Kitai* (Beijing), Vol. 4, No. 1-2 (Juli 1951), hal. 14; dan *Pravda* (Moskwa), 4 Januari 1950, hal. 3.

²Aleksandr Kaznacheev, *Inside a Soviet Embassy, Experiences of a Soviet Diplomat in Burma* (London, 1962), hal. 106.

tuk meningkatkan keterlibatannya di Vietnam. Di lain pihak Brezhnev mengusulkan suatu "sistem keamanan kolektif untuk Asia" dan secara demikian melakukan suatu usaha (yang sejauh ini tidak berhasil) untuk mendapatkan hak suara di Asia untuk Uni Soviet dan sekaligus memencilkan Cina.

Suatu bobot tandingan tertentu ditambahkan pada perkembangan ini oleh pemulihan hubungan Cina-Amerika yang mendapat momentum menyusul konflik Ussuri yang hampir menyeret Uni Soviet dan Cina ke dalam peperangan. Secara tiba-tiba Moskwa menemukan dirinya dalam isolasi pada permainan segi tiga strategis. Para pemimpin Kremlin berreaksi dengan meningkatkan usahanya pada akhir Perang Indocina Kedua untuk memperluas pengaruhnya di Hanoi. Kedua pendekatan itu diarahkan pada tujuan menahan Cina secara lebih kuat. Pendekatan terhadap Tokyo, yang disertai suatu kebijaksanaan ancaman-ancaman kasar, mengalami kegagalan. Jepang tidak mau menandatangani perjanjian "bertetangga baik dan kerja sama" yang diusulkan Moskwa sampai sengketa teritorial antara kedua negara itu diselesaikan. Sebaliknya, Jepang menandatangani suatu "Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama" dengan Cina pada bulan Agustus 1978 yang memuat suatu pasal anti-hegemoni yang diarahkan pada Moskwa.

Akan tetapi usaha Soviet untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh di Indocina lebih berhasil. Usaha itu mencapai puncaknya dalam penerimaan Vietnam sebagai anggota Comecon pada bulan Juni 1978 dan dalam penandatanganan suatu perjanjian politik kuasi-aliansi dengan Vietnam pada bulan Nopember 1978.¹ Keberhasilan Soviet ini banyak dan bermacam-macam alasannya dan pembicaraannya di sini akan makan terlalu banyak waktu.² Tetapi apa pun alasan ikatan itu, yang pasti adalah bahwa tanpa ikatan itu dan tanpa janji bantuan Soviet yang menyertainya, Hanoi tidak akan melancarkan intervensi militernya di Kamboja pada bulan Desember 1978.

Dukungan Uni Soviet untuk pengambilalihan Kamboja secara militer oleh Vietnam dan invasi Soviet ke Afghanistan pada bulan Desember 1979 mempunyai reperkusi-reperkusi yang merugikan untuk hubungan Moskwa dengan hampir semua negara Asia dan untuk citranya dalam pandangan dunia umumnya. Keberhasilan militer adalah sebab frustrasi diplomasi. Uni Soviet sekarang harus membatasi kerugiannya dan mempertahankan sisa "sahabat-sahabatnya" di pihaknya. Ini misalnya berarti menggunakan segala sarana

¹Mengenai perjanjian ini lihat Lau Teik Soon, "The Soviet-Vietnamese Treaty," dalam *Southeast Asia Affairs*, 1980 (Singapura, 1980), hal. 54-66.

²Lihat D. Heinzig, "The Role and Interests of the USSR in Indochina," dalam Khien Theeravit dan MacAlister Brown (eds.), *Indochina and Problems of Security and Stability in Southeast Asia* (Bangkok, 1981), hal. 148-149.

yang tersedia baginya untuk mencegah India, yang jengkel dengan petualangan Uni Soviet di Afghanistan, memperbaiki hubungannya dengan Cina dan Pakistan. Meningkatnya usaha sejak awal 1982 untuk memulihkan hubungannya dengan Cina sulit diharapkan membawa hasil yang besar.

Moskwa dan Hanoi berhasil membentuk pemerintah-pemerintah boneka di Afghanistan dan Kamboja dan secara militer menguasai paling tidak sebagian-bagian negara-negara ini. Namun perlawanannya sangat kuat, khususnya di Afghanistan di mana akhir pertempuran belum kelihatan.¹ Akan tetapi hal ini meletakkan beban tambahan yang berat atas ekonomi Soviet, yang krisis permanennya menjadi lebih parah lagi sejak dinyatakan hukum darurat militer di Polandia pada bulan Desember 1981. Suatu analisa saksama yang dilakukan sebelumnya akan memungkinkan para pemimpin Kremlin meramalkan reperkusi-reperkusi ekonomi dan internasional petualangan di Afghanistan dan Kamboja. Kalau dalam kenyataan mereka melakukan analisa semacam itu dan sampai pada kesimpulan tak terhindarkan ini, maka intensitas impetus ekspansionis mereka pasti melebihi perkiraan sebelumnya. Dapat dibayangkan bahwa para pemimpin Kremlin melihat aksi mereka di Afghanistan -- secara subyektif -- sebagai suatu langkah preventif yang dimaksud untuk mencegah perubahan mana pun dalam warna merah tetangga Selatannya. Kalau demikian halnya, maka harus ditandaskan kepada Moskwa bahwa tingkah laku semacam itu tidak dapat diterima sebagai soal pola sah pemikiran keamanan mana pun. Mengalah di sini akan berarti mengulurkan tangan kepada suatu perkembangan yang pada akhirnya Uni Soviet bisa mengklaim bahwa keadilan penuh hanya akan bisa dilaksanakan untuk kepentingan keamanannya apabila seluruh dunia, dari Artika sampai Antartika, telah menjadi Soviet.

Politik luar negeri Moskwa mengejar sasaran menjamin keamanan Uni Soviet dan juga memperluas pengaruh Soviet sejauh mungkin di seberang perbatasan Uni Soviet dan (sejak dasawarsa 1950-an) Blok Soviet. Kremlin agak menahan diri dalam usaha ini, khususnya di mana ada bahaya pecahnya perang besar dengan Amerika Serikat (dan NATO) atau dengan Cina. Reservasi ini juga berlaku untuk kebijaksanaan Asia-nya. Dalam kasus Afghanistan Moskwa tidak melihat bahaya semacam itu, dalam kasus dukungannya untuk intervensi Vietnam di Kamboja juga tidak. Akan tetapi apa yang pantas diingat di masa lampau dan mendatang ialah taktik berhati-hatinya di Timur Dekat karena Moskwa memperhatikan kemungkinan terlibat dalam suatu konflik bersenjata dengan Amerika Serikat. Reserve Soviet pada waktu Cina melancarkan "kampanye pendidikan"-nya terhadap Vietnam pada musim

¹Mengenai prospek Afghanistan lihat analisa yang meyakinkan dalam "A Nearby Observer, The Afghan-Soviet War: Stalemate or Revolution?" dalam *The Middle East Journal* (Washington, D.C.), Vol. 36, No. 2, 1982, hal. 151 dst., khususnya 163.

semi 1979 karena Moskwa bermaksud menghindari suatu konfrontasi militer besar dengan Beijing dengan segala biaya, juga menyolok.

Sasaran-sasaran jangka panjang konkrit kebijaksanaan Soviet terhadap Asia belum jelas. Ketakutan Cina bahwa Uni Soviet bermaksud melakukan suatu gerak gunting dengan maksud untuk menguasai Teluk Parsi dan Selat Malaka dalam rangka memotong suplai energi dan bahan mentah yang vital bagi Eropa Barat dan Jepang (teori pencekikan) sepintas-lalu tampak dibesar-besarkan. Di lain pihak, keterlibatan militer Moskwa di Afghanistan dan (secara tidak langsung) di Indocina bersama pengembangan angkatan lautnya di Asia secara terus-menerus sejak pertengahan dasawarsa 1960-an¹ jelas merupakan sumber kecemasan. Bagaimanapun, negara-negara yang bersangkutan harus menegaskan kepada Uni Soviet dengan tindakan-tindakan mereka yang terpusat dan tegas, bahwa ia harus membayar harga yang lebih tinggi daripada harga yang diminta sejauh ini kalau ia berusaha meneruskan tradisi ekspansionisme Rusia di Asia.

¹Th.W. Robinson, "The Soviet Union and Asia in 1980," dalam *Asian Survey*, Januari 1981, hal. 19; lihat Noel Gayler, *Security Implications of the Soviet Military Presence in the 1980* (Cambridge, Mass., 1979), hal. 54-64.

Kebijaksanaan Asia Cina dan Peranan Anti-Hegemonisme*

Rüdiger MACHETZKI

PANDANGAN-PANDANGAN DARI CINA: POSISI INTERNASIONAL RRC

”Ketepatan segala perumusan teoretis tunduk pada keterbatasan-keterbatasan temporal dan tidak dapat diterapkan tanpa referensi pada latar belakang temporal yang dipaksakan oleh keadaan pada waktu ia dibuat” (Ji Pengfei, Direktur Departemen Perhubungan Internasional, Komite Sentral, PKC (Partai Komunis Cina)).”

Pada awal 1980 *Sejarah Dunia*, suatu majalah Cina mengenai hubungan internasional yang baru diterbitkan, memuat suatu karangan dengan judul ”Dasawarsa 1980-an dipandang dari dasarwarsa 1970-an.”¹ Karangan ini bermaksud menilai tiga trend penting yang menentukan situasi internasional dasawarsa 1970-an.

Pertama, perimbangan kekuatan global mengalami pergeseran-pergeseran yang tidak dapat dibalik. Amerika Serikat (AS) kehilangan kedudukan dominannya. GNP Uni Soviet meningkat dengan cepat sampai dua pertiga tingkat AS waktu itu. Jepang dan MEE telah menjadi pusat-pusat dunia ekonomi baru, sementara kehidupan di negara-negara Dunia Ketiga bercirikan meningkatnya kemiskinan. *Kedua*, Uni Soviet secara sistematis melaksanakan pembangunan kekuatan militernya. Ia telah menggantikan AS sebagai superpower yang lebih ofensif dan secara demikian memaksanya ke dalam suatu ke-

*Diambil dari makalah yang disampaikan pada Konperensi Indonesia-Jerman di Bali, 5-7 Juli 1982, yang disponsori bersama oleh CSIS (Jakarta) dan *Institut für Asienkunde* (Hamburg). Rüdiger MACHETZKI adalah anggota staf riset Institut für Asienkunde (Hamburg) dengan wilayah studi Cina dan Asia Tenggara. Telah menerbitkan beberapa buku. Diambil oleh Kirdi DIPOYUDO.

¹*Sjijie zhi shi (Sejarah Dunia)*, 1980, No. 2, hal. 2-5.

dudukan global yang defensif. *Ketiga*, kendati meningkatnya kekuatan materialnya, "hegemonisme" Soviet menghadapi kesulitan-kesulitan yang semakin besar. Negara-negara seperti Mesir, Sudan dan Somalia berhasil melepaskan diri mereka dari bahaya dominasi Soviet.

Apakah arti trend-trend ini untuk dasawarsa 1980-an? Perimbangan kekuatan internasional masih mengalami pergeseran-pergeseran lebih lanjut yang menguntungkan Uni Soviet, sekalipun tidak sekuat dasawarsa 1970-an. Akibat menyusutnya basis sumber dayanya, Uni Soviet secara berangsur-angsur mendekati batas-batas pertumbuhan tinggi. Kenaikan GNP kemungkinan besar tidak akan melebihi 2,5% per tahun. Lagi pula, perlawanan terhadap ambisi "ekspansionis" Soviet akan banyak meningkat. Mengingat garis-garis depan "anti-hegemonis" di Eropa dan Asia Timur, Uni Soviet akan lebih senang mencoba menerobos lingkaran geopolitik lemah yang membentang dari kawasan Laut Tengah sampai Asia Selatan untuk merusak *urat nadi ekonomi* negara-negara industri Barat. Selanjutnya ia akan mencoba merongrong pengaturan-pengaturan "anti-hegemoni" antara Cina, Jepang dan AS untuk melumpuhkan Jepang. Mengenai Dunia Ketiga, Uni Soviet bermaksud membuat semakin banyak negara bergantung pada dukungan Soviet untuk menggunakan mereka bagi maksud-maksud strategi kekuatan globalnya. Ketiga, ketegangan-ketegangan akibat ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang menyolok antara negara-negara Utara dan Selatan akan meningkat. Perang-perang terbatas akan sering terjadi.

Apakah yang harus dilakukan? Menurut karangan Cina itu hanya ada satu jalan ke luar, yaitu pembentukan *suatu front dunia anti-hegemoni bersatu* untuk menggagalkan usaha mendatang Soviet. Kebijakan-kebijaksanaan mengalah demi perdamaian hanya akan mendatangkan bencana global.

Evaluasi itu jelas menunjukkan bagaimana Cina memandang dinamika percaturan internasional sekarang ini dan bagaimana tingkah laku yang diinginkannya dari bermacam-macam aktor itu. Ia tidak banyak menceritakan sikap-sikap dan kebijakan-kebijaksanaan Cina. Cina rupanya hampir tidak mempunyai kepentingan-kepentingan dan sasaran-sasaran khusus. Untung, politisi Cina tidak selalu bungkam mengenai peranan internasional Cina seperti rekan-rekan ilmuwan mereka. Waktu Sidang Kedua Kongres Rakyat Nasional PKC bulan Juni 1979 Ji Pengfei, "menteri luar negeri Partai" Cina menyampaikan suatu pidato pada suatu simposium untuk personal diplomasi mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami kebijakan luar negeri Cina menyusul perang perbatasan Cina-Vietnam.¹

¹Diterbitkan dalam terjemahan Inggris oleh Institute of Current China Studies dalam *Inside Mainland China* (Taibei), Maret 1980, hal. 1-6.

"Banyak negeri, terutama AS, negara-negara MEE dan Jepang, memusatkan tingkat perhatian tinggi pada perubahan-perubahan cepat yang terjadi di Cina. Akan tetapi psikologi ketakutan bahwa Cina bisa menjadi suatu superpower masih hidup. Ketakutan ini meningkatkan akibat tindakan kita meningkatkan suatu sengketa perbatasan menjadi suatu perang terbatas serangan balasan untuk membela diri terhadap Vietnam baru-baru ini ... Harapan kita perang ini membuktikan sesuatu kepada lain-lain negara. Akan tetapi kita tidak dalam posisi untuk menentukan tafsir mereka ... Hal pertama yang harus kita lakukan ialah menyingkirkan keraguan-keraguan yang masih ada mengenai kita. Salah satu sebab sikap ini ialah potensi kita untuk menjadi suatu superpower yang telah saya sebutkan. Tetapi ini bukan satu-satunya sebab."

Selanjutnya Ji menjelaskan bahwa sebagian besar keengganan internasional untuk bekerja sama dengan Cina adalah akibat *kesalahan-kesalahan* dalam orientasi dan implementasi kebijaksanaan luar negeri Cina. Ia menyebutkan beberapa jenis "kesalahan kita":

1. Kesalahan dalam "teori dan slogan-slogan kita":

"Unsur tak cocok dalam garis kebijaksanaan luar negeri kita di masa lampau ialah menggunakan teori-teori dan slogan-slogan yang tidak dapat diterima oleh mayoritas negara-negara. Ini menimbulkan kesan buruk pada negara-negara asing ... Banyak negara di dunia masih pada tahap demokratis revolusi dan belum mencapai tahap sosialis revolusi. Kita mengatakan bahwa sosialisme pasti akan menggantikan sistem kapitalis sekarang ini dan bahwa masyarakat kini pada tahap transisi dari yang satu menjadi yang lain. Teori ini tidak cocok untuk situasinya."

2. Kesalahan mengacaukan "pandangan-pandangan jangka panjang" dengan evaluasi-evaluasi "menganalisa situasi sekarang":

"Misalnya tidak dapat disangkal bahwa sebagai akibat kekacauan mengenai garis kebijaksanaan luar negeri kita, kita membantu Uni Soviet selama sepuluh tahun lebih. Secara demikian kita memungkinkannya melaksanakan strategi globalnya atas asas bahwa semua bangsa sosialis harus membentuk satu keluarga. Secara demikian kita juga menimbulkan ketakutan dan kecurigaan yang mendalam terhadap Cina pada negara-negara Barat yang membuat mereka menempatkan kita pada jarak yang besar ... Untuk suatu periode yang sangat panjang dalam hubungan kita dengan pemerintah-pemerintah asing, kita menekankan perjuangan dan meletakkan tekanan atas asas-asas sambil menolak solidaritas dan mengabaikan keluwesan dalam asas-asas kita sendiri ... Misalnya kita mengutuk imperialisme Jepang, menuduh Mobutu di Kongo menjadi anjing Belgium, mendukung Sockarno dalam perlawanannya terhadap Malaysia dan seterusnya. Semua contoh ini lebih kurang berkaitan erat dengan kesalahan-kesalahan tersebut di atas."

3. Kesalahan mempertahankan suatu garis kebijaksanaan jangka panjang yang dapat diandalkan:

"Dalam pelaksanaan politik luar negeri kita, tiada kebijaksanaan yang mapan, hanya serangkaian strategi yang terus-menerus berubah. Ini secara tak kelihatan menggerogoti segala landasan untuk kerja sama jangka panjang dengan negara lain mana pun. Dengan berlalunya waktu hal itu membuat kita kehilangan sejumlah negara."

4. Kesalahan menggunakan secara salah lembaga-lembaga diplomasi pemerintah untuk memajukan kegiatan-kegiatan revolusioner di luar negeri dan mengabaikan pola-pola psikologis negara-negara asing:

”Dalam kunjungannya ke Muangthai-bulan Nopember tahun yang lalu (1981), Wakil Perdana Menteri Deng, ketika menjelaskan dalam suatu konperensi pers hubungan-hubungan kita dengan sesama partai kita di negara-negara asing, jelas menerangkan bagaimana kita mengadakan suatu perbedaan tajam antara soal-soal pemerintah dan Partai. Kita mendukung perjuangan sesama partai kita di luar negeri, tetapi hal ini tidak mencampuri pertukaran bersahabat dengan pemerintah-pemerintah dan partai-partai negeri-negeri itu. Lagi pula kita tidak akan mencampuri urusan intern negara mana pun dengan maksud untuk mendukung sesama partai kita di situ. Ini adalah suatu asas pokok hubungan luar negeri ... Departemen Perhubungan, Pusat Kementerian Luar Negeri, Dewan Perdagangan Luar Negeri, Institut Hubungan Internasional ... semuanya bekerja di bidang hubungan luar negeri dan merupakan satu keluarga besar. Akan tetapi mereka menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda ... Akan tetapi di masa lampau fungsi-fungsi Kementerian Luar Negeri dan fungsi-fungsi Departemen Perhubungan Luar Negeri kadang-kadang dicampur-adukkan ... Oleh sebab itu, sesudah Sidang Pleno Ketiga tahun yang lalu, dalam rangka melaksanakan dengan saksama kebijaksanaan pimpinan Partai di atas kebijaksanaan pemerintah dan dengan jelas membedakan hubungan-hubungan antara Partai dan pemerintah, digariskan suatu pemisahan yang jelas antara fungsi-fungsi Departemen Perhubungan Pusat dan fungsi-fungsi Kementerian Luar Negeri serta cabang-cabang subsidiernya ... Mengenai sesama partai kita yang masih terlibat dalam perjuangan di bawah tanah, seperti di Muangthai, Malaysia dan Pilipina, partai-partai itu akan mempunyai hubungan langsung dengan Departemen Perhubungan Pusat. Kecuali dalam keadaan luar biasa, personal diplomatik di luar negeri tidak akan mempunyai hubungan langsung dengan mereka ... Dengan segala sarana kita akan menghindari segala kegiatan yang akan melibatkan kontak erat personal diplomatik dengan sesama-sesama partai di luar negeri, yang melebihi hubungan negara dengan negara. Biarlah saya memberikan suatu contoh kepada anda. Baru-baru ini, Partai Komunis Muangthai pecah menjadi dua fraksi. Pertarungan antara kedua kelompok itu meningkat menjadi konflik bersenjata. Waktu ini pemimpin-pemimpin Partai Komunis Muangthai di Beijing untuk mencari dukungan. Saya telah menemui mereka beberapa kali. Ketua Hua, Wakil Ketua Deng dan Wakil Ketua Ye telah beberapa kali mengadakan pembicaraan dengan mereka. Akan tetapi ini tidak diumumkan dalam pers maupun lewat radio ... Di banyak negara dunia, apakah Partai Komunis legal atau tidak, ketakutan pemerintah padanya sangat kuat. Ini merupakan suatu gejala psikologis yang sangat umum. Apa yang terutama tidak dapat mereka biarkan ialah bahwa Cina mendukung kegiatan-kegiatan partai komunis setempat, sekalipun hanya dengan bantuan moral dan simpati ... Beberapa di antara mereka merasa bahwa dengan menjalin hubungan dengan Cina, mereka dapat membuat kita menghentikan bantuan untuk kaum komunis lokal. Hal pertama yang mereka minta kepada kita ialah tidak mencampuri tindakan-tindakan agresi mereka. Oleh sebab itu anda harus memahami pola psikologis negara-negara asing dan memperluas pola-pola seorang Cina biasa ... Apa yang kini dibutuhkan dalam karya diplomasi ialah suatu sikap yang didasari pengetahuan. Isi sikap senaenam itu adalah sikap anti-hegemoni yang terdapat dalam Perjanjian Persahabatan Cina-Jepang dan Komunike Bersama Cina-Amerika. Itulah asas yang terlibat. Melepaskan cara resmi dan berperilaku secara yang santai dan hangat dalam menangani hubungan-hubungan tak penting. Itulah keluwesan dalam asas.”

Dengan memperhitungkan pernyataan-pernyataan yang sebagian dikukuhkan oleh pidato-pidato lain-lain pemimpin Cina eselon atas itu,¹ neraca hasil-hasil internasional Cina selama seperempat abad yang terakhir ini rupanya *tidak memuaskan pimpinan Cina sepenuhnya*. Apabila sisi kredit dan debet kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri Cina di Asia dan lain-lain kawasan diperiksa secara terperinci, ketidakpuasan itu tidaklah mengherankan.

DUA PULUH LIMA TAHUN PERUBAHAN: DARI "DUA BLOK" KE "TIGA DUNIA"

"Kita hanya mempunyai dua tinju. Apakah kita diandaikan melawan revisionisme Soviet dan antek-antek Eropa Timurnya maupun AS dan negara-negara Barat dan selain itu dinasti Jiang kecil (Taiwan Jiang Jingguo, RM)? Anda menginginkan kita melawan Yugoslavia dan negara lain mana lagi? (Hadirin menggema: 'Kita tidak akan memasukkan Vietnam dan Korea?') Nah, tidakkah kita juga harus memasukkan Jepang, India, Birma dan Muang-thai? (Hadirin menggema: 'Ya!') Di seluruh dunia kita tidak mempunyai sahabat, hanya musuh. Keeuali kita, tiada negara yang revolusioner. Hanya kita kiri. Posisi apakah itu? (Hadirin menggema: 'Itulah posisi ultra kanan kawan empat.') Nah, itu tepat. Apa yang dikatakan kawan-kawan ini sudah barang tentu suatu lelucon. Kalau kita secara serius menganggap bahwa Menteri Luar Negeri Cina akan menamakan semua negeri dunia musuh Cina, ini pasti akan menimbulkan banyak kesulitan dan membuat kita kehilangan beberapa teman. 'Kita mempunyai teman di seluruh dunia.' Itulah slogan yang dibuat oleh PM Zhou Enlai." (Sambutan Menteri Luar Negeri Cina, Huang Hua pada suatu konferensi kader-kader Partai dan pemerintah pada bulan Juli 1977.)²

Pada tahun 1957 arah domestik dan internasional yang akan ditempuh Cina kelihatannya bisa diramalkan. Ekonomi nasionalnya tampaknya memasuki jalan pembangunan gaya Soviet yang agak "konvensional." Partai Komunis Cina mengakui, setidak-tidaknya dalam kata-kata, posisi predominan Uni Soviet dalam apa yang disebut "kubu sosialis," dan "condong ke satu pihak" masih diandaikan berlaku. Tidak dibenarkan "duduk di atas pagar" atau pemikiran "jalan ketiga." Imperialisme AS adalah musuh utama dan Jepang dijelek-jelekkan sebagai "anjing neomilitaris" di Asia dan Pasifik. Hubungan antara India dan Cina -- yang dijalin dalam semangat "pancasila koeksistensi damai" -- rupanya baik, kalau tidak hangat. Mengenai Indonesia, partisipasi Cina dalam Konferensi Afro-Asia di Bandung dan penandatanganan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan (soal Cina perantauan) ternyata

¹Lihat misalnya pidato Menteri Luar Negeri Cina, Huang Hua pada suatu konferensi Perhimpunan Luar Negeri Maret 1979 dan pidato Wakil Menteri Pertahanan Su Yu pada Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral Kesebelas PKC. Kedua pidato ini diterbitkan oleh Institute for Current China Studies dalam *Inside Mainland China* (Taipei), Maret dan Juni 1979.

²Pidato yang diterbitkan dalam *Feuqing yuebao* (*Bulanan Soal-soal Komunis*), Taipei, Nopember 1977, hal. 67-88. Diterjemahkan dari bahasa Cina ke bahasa Inggris oleh RM (Rüdiger Machetzki).

menunjang tumbuhnya hubungan yang kurang bermusuhan. Pada tahun 1957, contoh Cina secara tidak langsung menunjang dimulainya "demokrasi terpimpin" di Indonesia. PKI secara berangsur-angsur tampil sebagai suatu kekuatan vital yang mempengaruhi politik dalam negeri Soekarno, dan sikap luar negeri pemerintah Soekarno menunjukkan meningkatnya komitmen pada sikap anti-kolonial dan anti-imperialis yang kemudian akan menjurus pada penyusunan NEFOS-OLDEFOS yang terkenal itu. Namun, kendati konvergensi terbatas antara kedua negara itu, hal itu masih jauh dari Perjanjian Persahabatan Cina-Indonesia tahun 1961 dan kuasi-sinkronisasi tujuan-tujuan kebijaksanaan luar negeri yang menyusul kemudian.

Mengenai Indocina, konperensi Jenewa tahun 1954 yang akhirnya mengesahkan perubahan-perubahan besar yang terjadi sejak Perang Dunia II merupakan bukti penerobosan pertama Cina dalam percaturan internasional. Secara kurang rela Cina diberi suara dalam penyelesaian konflik Indocina. Suara ini jelas menguntungkan Vietnam Utara dan menentang segala campur tangan negara-negara luar dalam soal-soal semenanjung itu. Namun dalam retrospeksi, pimpinan Vietnam rupanya tidak menghargai sumbangan Cina itu. Kalau orang harus percaya pada "Buku Putih Kementerian Luar Negeri RSV mengenai Hubungan dengan Cina" Oktober 1979, Cina mengejar tujuan-tujuan yang agak berpamrih:

"Pada konperensi Jenewa tahun 1954, mereka menjual kepentingan-kepentingan nasional rakyat Vietnam bukan saja untuk mendapatkan suatu lingkaran keamanan untuk negeri mereka di sebelah selatan, melainkan juga untuk menyiapkan jalan bagi pelaksanaan rencana-rencana ekspansionis mereka di Indocina dan Asia Tenggara. Mereka menginginkan agar Vietnam terpecah untuk waktu lama dan secara demikian memperlemah dan membuatnya bergantung pada Cina."

Akan tetapi pada tahun 1957 hubungan Cina-Vietnam yang kelihatannya tak mengalami gangguan dan dukungan Cina untuk "perjuangan kemerdekaan nasional" Vietnam umumnya dianggap sebagai unsur-unsur perkembangan jangka panjang Asia yang tak dapat digoyahkan.

Mengenai Taiwan, sisa "Cina yang Lain," 1957 adalah salah satu tahun antara kedua krisis kekerasan Selat Taiwan tahun 1954 dan 1958 yang meningkat menjadi konfrontasi militer langsung. Pimpinan komunis pada waktu itu masih serius memikirkan klaim tandingan pemerintah Nasionalis atas legitimasi dan kegiatan-kegiatan tandingan Taiwan di Afro-Asia.

Dua puluh lima tahun kemudian Cina mengangkat *Uni Soviet* menjadi *musuh nomor satunya*. "Imperialisme Sosial" menggantikan "imperialisme AS" sebagai kekuatan yang paling berbahaya dan destruktif di dunia internasional. Sikap anti-Soviet -- yang diberi nama sikap "anti-hegemoni" -- ke-

lihatannya telah menjadi "hukum alamiah" kebijaksanaan luar negeri Cina. AS telah "melewati zenitnya" dan sampai batas-batas tertentu bisa digunakan dalam rangka maksud-maksud anti-hegemoni. Hal yang sama berlaku untuk Jepang yang didorong untuk mengarahkan kembali sikap regionalnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan anti-hegemoni Cina. Selain itu, kekuatan ekonomi Jepang bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan modernisasi ekonomi Cina yang berlanjut.

Perihal India, sejak 1959-1962 hubungan bilateral semula yang didasarkan atas konsep koeksistensi damai digantikan oleh keadaan konfrontasi total yang tahun-tahun belakangan ini sampai tingkat tertentu diubah dengan retorika detente dan kontak-kontak politik yang berhati-hati.¹

Berlainan dengan India, Indonesia sejauh ini enggan untuk memperbaiki hubungannya dengan Cina dan memulihkan pertukaran diplomasi reguler (yang dibekukan sejak 1967). Telah lampaulah waktu ketika pemerintah kedua negara itu bersama-sama mencoba membentuk suatu inti organisasi tandingan PBB dan melumpuhkan strategi pembendungan AS. Sebaliknya, di samping Vietnam, Indonesia rupanya telah mengembangkan pandangan keamanan anti-Cina yang paling menonjol, dan usaha-usaha pendekatan Cina terhadap Pemerintah Indonesia baru-baru ini paling tidak untuk sebagian disebabkan ketakutan diblokir dari kawasan Asia Tenggara lewat usaha-usaha keamanan gabungan Indonesia-Vietnam. Akibat posisi Vietnam yang secara politik tidak menentu di Indocina, bukanlah kepentingan pimpinan Vietnam untuk meredakan kekhawatiran itu.

Sejak 1977 (kunjungan tingkat tinggi Jenderal Giap, PM Pham Van Dong dan Sekretaris Partai Le Duan ke Cina pada bulan Juni dan Nopember 1977)

¹Pasang surut hubungan Cina-India terungkap dalam tingkat kegiatan bilateral kedua negara (pertukaran kunjungan dan persetujuan-persetujuan). Pertukaran kunjungan antara Cina dan India:

1. Mei 1950 - Mei 1954, 8 pertukaran, di antaranya 5 politik, 1 ekonomi dan 2 kebudayaan;
2. Juni 1954 - April 1960, 53 pertukaran, di antaranya 20 politik, 12 ekonomi dan 21 kebudayaan;
3. Juni 1960 - Juli 1962, 6 pertukaran, semuanya politik;
4. Juli 1962 - September 1971, tiada pertukaran;
5. Oktober 1971-1980, 56 pertukaran, di antaranya 10 politik, 22 ekonomi dan 24 kebudayaan.

Persetujuan-persetujuan Cina-India:

1. Januari 1951 - Maret 1958, delapan belas;
2. April 1958 - April 1977, tiada persetujuan;
3. Mei 1977-1980, tujuh. (Dikumpulkan dari R.K. Jain (ed.), *China South Asia Relations 1947-1980*, Vol. I: *India 1947-1980* (New Delhi, 1981), Lampiran 1 + 2, hal. 577-585.

menjadi semakin jelas bahwa pimpinan Vietnam sesudah Ho Chi Minh tidak bersedia menerima kebangkitan konstelasi sejarah sebelum "abad selingan Barat" dan puas dengan kedudukan sebagai sub-pusat yang bergantung pada Cina. Secara demikian aliansi yang kelihatannya erat antara Cina dan Vietnam perlahan-lahan buyar.¹ Cina pada gilirannya tidak bersedia membiarkan eksistensi suatu negara Vietnam-Indocina yang kuat yang mampu bertindak secara independen dan berlawanan dengan sasaran-sasaran politik Cina. Urut-urutan kejadian yang mencapai puncaknya pada perang perbatasan awal 1979 dan sejak itu pada usaha sistematis Cina untuk membangun suatu jaringan "gerakan pembebasan"² Indocina memancing penegasan Vietnam bahwa "perjuangan berlanjut melawan Cina (merupakan) asas kontradiksi dalam sejarah Vietnam" dan "kekuatan penggerak yang paling besar bagi perkembangan bangsa Vietnam." Akibat penolakan Vietnam untuk tunduk pada *pax sinica* "Cina Baru," pimpinan Vietnam memancing tuduhan Cina terhadap mereka sebagai "hegemonis regional." Mengenai peranan domestiknya, mereka mendapat julukan "klik Le Duan" yang dalam terminologi Cina berarti bahwa mereka tidak lagi diakui sebagai pemerintah rakyat Vietnam yang sah dan berhak.

¹Untuk suatu analisa yang lebih terperinci mengenai hubungan Cina-Vietnam baru-baru ini lihat makalah kami "The Interests and Objectives of the People's Republic of China," dalam Khien Theeravit dan MacAlister Brown (ed.), *Indochina and Problems of Security and Stability in Southeast Asia* (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1981), hal. 116-123.

²Sejak 1980, Cina rupanya kembali ke strategi lama membiarkan lain-lain berjuang untuk Cina ("Yi yi zhi yi," artinya: buatlah bangsa barbar bertarung dengan bangsa barbar). Menurut pernyataan-pernyataan Geng Biao, anggota Komisi Militer Komite Sentral PKC, Cina harus berusaha membangun suatu jalur suplai ke daerah-daerah basis pasukan Khmer Merah lewat Laos dan Muangthai Timur Laut. Suatu cabang lain akan melewati Birma dan Muangthai Barat Laut. Adalah tugas utama Partai Komunis Muangthai untuk memelihara jalur suplai lewat Muangthai itu dan melakukan kegiatan-kegiatan suplai. Untuk tidak mengganggu pengangkutannya, pasukan Partai Komunis Muangthai (PKM) kalau mungkin harus menghindari konfrontasi dengan pasukan Pemerintah Muangthai (Zhonggong yanjiu, *Studies on Chinese Communism* [Taipei], 1980, No. 10, hal. 141-162). Lagi pula Cina berusaha membangun suatu aliansi perlawanan Laos yang menyeluruh. Dilaporkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 1980 dibentuk suatu gerakan pembebasan baru, yang dinamakan Front Uni National de Laos pour la Libération (FUNLPL) di propinsi Laos Selatan Champassak. Kegiatan-kegiatan organisasi baru ini akan dikoordinasi dengan kegiatan pasukan Khmer Merah. Ketiga, bulan Oktober 1981 didirikan sebuah radio stasiun radio gerilya baru dengan nama Suara Vietnam di Propinsi Cina Yunnan. "Laporan-laporan kemenangan" Suara Vietnam itu dicetak ulang oleh kantor berita *Xinhua*. Laporan-laporan itu memuat berita-berita mengenai "perjuangan bawah tanah yang berhasil" di ketiga propinsi perbatasan Cina-Vietnam Hoang Lie Son, Ha Tuyen dan Quang Ninh maupun operasi-operasi apa yang disebut Front Unifié de Lutte de la Race Opprimée (FULRO) di propinsi-propinsi pegunungan Vietnam Tengah Cong Tum dan Dak Lak. FULRO ini mempunyai sejarah yang agak misterius. Konon ia didirikan pada tanggal 1 Januari 1964 oleh wakil-wakil perlawanan enam belas suku pegunungan Vietnam Tengah yang merasa terancam oleh kebijaksanaan "Vietnamisasi" Pemerintah Saigon dan siap untuk mendirikan suatu "kerajaan pegunungan otonom" yang dinamakan Royaume Autonome des Hauts Plateaux du Centre-Vietnam. Schubungan

Sementara hubungan Cina-Vietnam baru-baru ini ditentukan oleh suasana *pertengkaran total*, pendekatan politik Cina terhadap negara-negara non-komunis ASEAN ditandai oleh berbagai usaha untuk memajukan *gagasan kepentingan keamanan bersama*. Berbeda dengan "klik Le Duan," Pemerintah Muangthai dan Pilipina diangkat ke tingkat "pemerintah-pemerintah" sejati, dan Malaysia¹ maupun maksud regional ASEAN tidak lagi dicaci sebagai "alat-alat imperialisme." Mereka dinilai kembali sebagai sesama kekuatan regional yang berharga untuk melumpuhkan konstelasi kekuatan Soviet-Vietnam.

Masalah Taiwan di mata pimpinan Beijing telah kehilangan sebagian besar daya eksplosif semulanya, paling tidak sekarang ini. "Penyatuan kembali" tidak dilepaskan tetapi tidak merupakan suatu sasaran prioritas yang mendesak yang harus dikejar dengan segala sarana termasuk sarana militer. Selama dasawarsa terakhir ini bekas saingannya itu terpencil di dunia internasional. Selat Taiwan telah menjadi semacam air mati politik, biarpun bukan air mati ekonomi.

Akhirnya, persepsi Cina mengenai apa yang merupakan kekuatan-kekuatan penggerak dan kontradiksi-kontradiksi internasional pokok mengalami perubahan-perubahan yang mengherankan sejak 1957. Pemikiran "Dua Blok" pertama mula-mula digantikan pandangan "Empat Zone" (1964-1972) dan kemudian oleh apa yang disebut teori "Tiga Dunia" yang dikatakan berasal dari Mao Zedong, tetapi dalam kenyataan dipropagandakan oleh Deng Xiaoping selama konperensi PBB mengenai bahan mentah dan pembangunan pada bulan April-Mei 1974. Di sini teori itu tidak perlu

dengan perkembangan ini Pemerintah Saigon merasa harus memenuhi beberapa tuntutan FULRO, biarpun tuntutan "kerajaan" tidak. Sesudah 1964 tiada sesuatu definitif dapat dicek kebenarannya mengenai kegiatan-kegiatan FULRO. Beberapa ahli mengasumsikan bahwa organisasi itu digunakan oleh CIA sebagai suatu kekuatan anti-Vietcong. Sesudah 1975 FULRO banyak kehilangan kekuasaannya atas pegunungan itu karena ia terjepit antara kedua rezim komunis Vietnam dan Kampuchea Demokratis. Akan tetapi perubahan-perubahan yang diadakan sejak 1978 rupanya mempermudah "reaktivasi" FULRO dengan dukungan Cina. (Lihat Oskar Veggel, "Indocina im Berichtszeitraum, December 1981 - January 1982," dalam *China aktuell* bulanan Institut für Asienkunde Hamburg), Januari 1982.

¹ Mengenai masalah Federasi Malaysia tahun 1962-1965, soalnya memberikan suatu contoh kelas kesediaan Cina untuk menundukkan soal-soal bilateral pada berubahnya pandangan menyeluruhnya. Kecaman pertama Cina terhadap pembentukan Fedcrasi Malaysia dilancarkan bulan Juni 1962 setelah satu tahun sikap acuh tak acuh. Baru setelah Indonesia menolak "Federasi" itu Cina mulai memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan persoalan Malaysia itu untuk mendapatkan dukungan Indonesia bagi garis militannya sendiri terhadap India dan Uni Soviet. Perlu diingat bahwa menjelang Konperensi Afro-Asia Kedua di Algiers (1965), yang tidak diadakan, Cina dan Indonesia bersama-sama mencoba mencegah partisipasi Uni Soviet dan Malaysia.

dibicarakan secara terperinci. Cukuplah mengatakan bahwa Cina tidak menunjukkan keberatan-keberatan ideologi untuk meninggalkan sikap "tidak ada jalan ketiga" yang diperjuangkannya tanpa mengenal kompromi dalam periode sebelumnya. Setelah secara ideologi memburukkan "Dunia Ketiga," ia menerimanya untuk pertama kalinya pada konperensi UNCTAD tahun 1972. Dua tahun kemudian pemimpin-pemimpin Cina mulai menggambarkan negeri mereka sebagai suatu "negeri berkembang" yang ikut memikul nasib dan masalah-masalah bersama Dunia Ketiga. Teori "Tiga Dunia" muncul ketika Cina siap untuk menganggap dirinya sebagai bagian Dunia Ketiga.¹

Setelah posisi-posisi internasional dan regional Cina pada tahun 1957 dan 1982 dibandingkan, dua hal menjadi jelas. Pertama, keadaan domestik Cina berubah dan kedua, lingkungan internasional di mana Cina dewasa ini beroperasi berbeda dengan lingkungan internasional tahun 1950-an. Situasi dalam negerinya dikuasai oleh golongan "Realis"² yang sejak Desember 1978 (Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral Kesebelas PKC) mengalihkan perhatian Partai dari "pertarungan jelas" ke "modernisasi sosialis." Menyusul kegagalan "lompatan besar ke Barat" (yang yaojin), penilaian perkembangan mendatang Cina menjadi lebih masuk akal. Program-program modernisasi kini bertujuan mencapai GNP per jiwa sebesar US\$ 800 pada tahun 2000 dan tidak lagi membayangkan kemajuan Cina ke "garis depan kebanyakan bangsa industri." Mengenai "gaya kerja" pimpinan baru, pelaksanaan cita-cita ideologi telah menjadi suatu variabel yang dikualifikasikan. Ia bukan lagi determinan pokok proses pembuatan keputusan nasional.

¹Kendati identitas yang baru ditemukan dengan lain-lain negara Dunia Ketiga itu, Cina tidak bersedia bergabung dengan Kelompok 77, organisasi Dunia Ketiga yang paling lengkap. Ia menunjukkan tidak begitu enggan untuk menempati kursinya di antara kelima negara besar yang merupakan anggota permanen Dewan Keamanan PBB. Mengenai pandangan Tiga Dunia, ini bukan suatu ideologi. Ia bahkan bukan suatu strategi seperti kadang-kadang dikatakan. Sebaliknya, ia bisa dibatasi sebagai suatu pandangan dunia "instrumental" atau suatu kerangka teoretis untuk menyusun taktik-taktik luwes dan opsi-opsi kebijaksanaan. Karena tidak memiliki kemampuan ofensif global seperti kedua "superpower," Cina tidak mampu mewujudkan sasaran-sasaran jangka panjangnya, baik revolusioner maupun konvensional, dengan menganut suatu strategi independen. Sebaliknya ia harus melaksanakan kebijaksanaan "front persatuan" yang dimaksud untuk memaksimalkan unifikasi semua kekuatan yang bisa dikerahkan demi keuntungan Cina dan secara maksimal memencilkan negara-negara yang dilihat Cina sebagai lawan-lawan besarnya. Konstruksi front persatuan mengingatkan kita pada suatu pendekatan serupa untuk mengalahkan kekuatan Kuomintang pada tahap awal revolusi komunis Cina. Ia merupakan suatu pendekatan tahap tengah dalam proses jangka panjang revolusi. Maka tidaklah tanpa alasan mengasumsikan bahwa Tiga Dunia akan terbatas waktu berlakunya. Pada hemat penulis, Tiga Dunia itu adalah suatu teori yang mengungkapkan kenyataan bahwa dewasa ini Cina tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan *status quo* global.

²Beberapa istilah digunakan untuk menyebutkan pimpinan baru Cina itu. Penulis lebih senang menggunakan istilah "realis" yang dijabarkan dari kedua slogan "mencari kebenaran dalam fakta-fakta" dan "praktek adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran."

Dalam politik luar negeri, RRC telah menjadi kurang "irasional," biarpun tidak kurang ambisius. Cina masih merupakan *negara tak puas yang paling besar*. Mengingat kendala-kendala ekonomi yang mempengaruhi potensi kekuatannya, "kerajaan tengah" akan tetap suatu "kekuatan standby" untuk waktu lama.

"ANTI-HEGEMONISME" DAN TRADISI: CINA NEGARA TAK PUAS

"Kami dapat menjamin bahwa selama generasi kaum revolusioner proletar yang lebih tua masih memegang kendali pemerintah, Cina tidak akan mencari hegemoni. Akan tetapi kami tidak dapat meramalkan atau menjamin bahwa generasi kedua, ketiga atau keempat yang berkuasa tidak akan memimpin Cina lewat jalan yang salah." (Ji Pengfei, Juni 1979)

"Wakil Perdana Menteri Deng bertanya kepada Carter: 'Apakah Amerika Serikat masih mempunyai jenis keberanian yang ditunjukkan oleh Kennedy dalam menangani krisis Kuba? Kami ragu-ragu. Kami mengharap bahwa anda bisa menyadari bahwa dipertahankannya keseimbangan kekuatan hanya suatu gejala sementara, sedangkan terus munculnya ketidakseimbangan dalam kenyataan adalah normal.'" (Huang Hua, Maret 1979)

Setelah menggambarkan perubahan-perubahan dalam garis kebijaksanaan luar negeri Cina selama dua puluh lima tahun terakhir ini, rupanya kita perlu meninjau sikap-sikap politik yang menentukan pandangan-pandangan internasional pimpinan. Telah menjadi suatu klise untuk memberikan kepada Cina dua peranan internasional yang berbeda, peranan *negara revolusioner* dan peranan suatu *negara bangsa*, yang berarti bahwa Cina bisa mengejar *tujuan-tujuan revolusioner* maupun *kepentingan-kepentingan nasional*. Pernyataan yang kelihatannya sederhana ini menimbulkan bermacam-macam masalah. *Pertama*, jarang bisa dibedakan secara pasti antara apa yang disebut kegiatan-kegiatan revolusioner dan kegiatan-kegiatan kepentingan nasional. Bahkan kalau kegiatan-kegiatan tertentu bisa digambarkan sebagai murni revolusioner, kegiatan-kegiatan itu dalam jangka panjang bisa menunjang kepentingan nasional. Dukungan yang diberikan kepada Partai-partai Komunis Asia Tenggara misalnya kelihatannya menunjang tujuan-tujuan revolusioner, tetapi melemahnya negara-negara Asia Tenggara juga bisa dibenarkan dari segi kepentingan nasional Cina. *Kedua*, ramuan peranan yang spesifik pasti akan berbeda menurut waktu dan kawasan yang berbeda. Sebagai patokan bisa dikatakan bahwa *kepentingan nasional biasanya lebih kuat* sehubungan dengan Asia dan diperjuangkan di situ secara yang merugikan cita-cita evolusi. Asumsi ini terbukti dalam tingkah laku Cina terhadap Sri Lanka pada tahun 1971 dan Bangladesh. Dalam kedua kasus ini Cina melawan gerakan-gerakan revolusioner (masing-masing Hanatha Vimukti Paramuna dan Awami League) dan mendukung kedudukan pemerintah-pemerintah akibat pertimbangan-pertimbangan anti-India yang kuat. *Ketiga*, nosi kepentingan nasional tidaklah begitu jelas. Kepentingan nasional bisa dipikirkan

sebagai defensif maupun ofensif. Patokan sejarah rupanya ialah: makin kuat negara bangsa makin kuat pula persepsi ofensif kepentingan nasional.

Dalam kasus Cina patokan ini bisa diperkuat oleh *tradisi politik-kultural* negara yang mengizinkan masyarakat Cina untuk memandang peradabannya lebih kurang koekstensif dengan dunia (seluas dunia). Sampai abad ke-19 elite Cina sudah barang tentu mengira bahwa tata yang ditakdirkan adalah suatu *tata Cina*. Peradaban imperial Cina adalah matriks seluruh peradaban Asia dan Konfusianisme, ideologi imperial Cina, medium budaya politik internasional dunia Asia Timur yang dalam persepsi Cina membentang dari Singapura sampai Jepang.

Tata peradaban berabad-abad yang didasarkan pada imperium Cina diakui oleh kebanyakan ahli. Tata ini bisa disebutkan sebagai suatu "harmoni yang dibentuk sebelumnya," dibentuk sebelumnya oleh eksistensi imperium Cina itu saja. "Cina Baru" bisa mengira ditakdirkan untuk membangun kembali suatu *versi baru tata lama* yang secara kasar bisa dinamakan "tata sosialis bawahan." Dengan sendirinya jelas bahwa lain-lain anggota tata ini paling banter adalah "sesama yang tunduk." Dalam batas-batas teori probabilitas bisa diasumsikan bahwa Cina bukanlah semata-mata suatu kekuatan *anti-status quo* melainkan suatu kekuatan *status quo ante* dan secara demikian berbeda dengan kebanyakan bangsa Asia yang juga *anti-status quo*, tetapi tidak menginginkan tampilnya kembali peranan patrimonial tradisional Cina.

Kalau asumsi-asumsi itu benar, *sikap anti-Soviet Cina* yang seluas dunia (anti-hegemonisme) itu harus ditinjau paling tidak untuk sebagian sebagai suatu *sarana taktis* untuk mencapai suatu lingkungan afirmatif di Asia dalam rangka mewujudkan sasaran jangka panjang Cina untuk memulihkan peranan tradisionalnya yang menentukan dan dominan.¹ Kalau sikap anti-Soviet itu tidak pertama-tama diharuskan oleh ketakutan sungguh-sungguh Cina akan strategi ekspansionis Uni Soviet akan tetapi memainkan suatu *peranan instrumental* dalam memajukan tujuan-tujuan Cina yang secara lain tidak dapat diperjuangkan tanpa sanggahan, maka "kekuatan penggerak besi" itu harus diselidiki secara kritis. Memang tampak mungkin bahwa dampak kebijaksanaan Soviet atas pandangan dunia Cina dinilai secara berlebihan. Beberapa faktor mendukung peninjauan kembali relevansinya.

¹Argumen ini diajukan oleh penulis pada suatu konperensi mengenai Indocina yang diadakan pada Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Juni 1980. Argumen ini dengan tegas disanggah oleh peserta Cina Pei Monong: "Cina tidak menginginkan apa yang disebut 'peranan dominan' di Indocina dan seluruh kawasan Asia Tenggara. Karena didasarkan pada salah pengertian tentang kebijaksanaan Cina yang diterangkan di atas, kesimpulan yang dicapai oleh analisa Dr. Machetzki dalam makalahnya mengenai kepentingan dan sasaran-sasaran Cina di Indocina jelas dan sama sekali tidak tepat." (Kieu Theeravit dan MacAlister Brown (ed.), *Indochina and Problems of Security and Stability in Southeast Asia* (Bangkok, 1981), hal. 125. Kendati instruksi ilmiah itu, penulis merasa cenderung untuk menganut tafsirnya mengenai maksud jangka panjang Cina untuk memindahkan proses pembuatan keputusan intra regional jauh ke Utara.

Pertama, beberapa bukti fungsi instrumental "anti-hegemonisme" Cina dapat diberikan dengan menunjuk pada *liputan pers anti-Soviet* pada tahun 1977-1980. Pada tahun 1977 berbagai media Cina menerbitkan seluruhnya 1.205 karangan anti-Soviet. Topik-topik utama adalah "ancaman militer" di seluruh dunia dan "pengurusan sumber-sumber daya maritim." Pada tahun 1978 jumlah karangan anti-Soviet mencapai 1.207 dan berkisar antara 66 bulan September dan 154 bulan Pebruari. Pada tahun 1979 diterbitkan 1.707 karangan, di antaranya 39 bulan Juli dan 228 bulan Desember. Pada tahun 1980 jumlah karangan anti-Soviet mencapai puncaknya dengan 2.394 buah, di antaranya 818 diterbitkan bulan Januari (menyusul invasi Soviet ke Afghanistan). Sejak 1981 liputan pers anti-Soviet itu banyak berkurang.¹ Akan tetapi suatu perbandingan antara jumlah karangan anti-Soviet dan bagian laporan yang diterbitkan dalam edisi Inggris *Xinhua* memberikan hasil yang lebih-lebih instruktif daripada penjumlahan semua karangan itu saja. Pada tahun 1977 tidak lebih dari 76 dari 1.205 karangan diterbitkan dalam media domestik seperti *Harian Rakyat*. Pada tahun 1978, 1979 dan 1980 proporsi menurun lagi menjadi 56, 78 dan 40 karangan masing-masing. Secara demikian "bagian domestik" liputan pers anti-Soviet Cina pada tahun 1977-1980 adalah tidak lebih dari 3-6%, sedangkan mayoritas sangat besar semua laporan anti-Soviet terutama dimaksud untuk disampaikan kepada dunia luar. Trend semacam itu terbuka untuk bermacam-macam tafsir, tetapi satu kesimpulan rupanya jelas. Cina jelas ingin mempertahankan sikap anti-Sovietnya yang diakui secara internasional tanpa terlalu "memanasi" iklim anti-Soviet Cina.

Kedua, andaikan bahwa keprihatinan anti-Soviet Cina tahun 1969-1971 benar-benar disebabkan ketakutan akan suatu perang Cina-Soviet, sejak 1972 ketakutan itu pasti sudah lenyap. Komunike Shanghai Cina-Amerika mengubah lingkungan sebelumnya. Perubahan itu sejak 1974 terungkap dalam analisa-analisa resmi Cina mengenai situasi global yang mengatakan bahwa *fokus ketegangan terletak di Eropa* dan bukan di Cina. Analisa tahun 1974 agak direvisi tetapi tidak ditolak. Kini dikatakan bahwa Uni Soviet bermaksud "mengepung Eropa Barat dengan menguasai Timur Tengah." Evaluasi strategis Cina mengenai sikap-sikap global Soviet selanjutnya terungkap dalam *pola penggelaran dalam negeri kekuatan militer Cina*. Dari 191 divisi reguler dan 70 divisi lokal hanya 55 divisi reguler dan 25 divisi lokal digelar di daerah-daerah militer Timur Laut dan Utara (Shengyang, Beijing). 220 divisi reguler dan 8 divisi lokal digelar di daerah-daerah militer Cina Barat Laut dan Utara (Lanzhou, Xingjiang). Ini berarti bahwa tidak lebih dari sepertiga tentara Cina digelar berhadapan dengan Uni Soviet.

¹ Dikumpulkan dalam Institut für Asienkunde (ed.), *China aktuell* (bulanan) dan *PRC Official Activities*: Karangan-karangan dalam Pers Cina melawan Uni Soviet, nomor-nomor bulanan Januari 1977 - Desember 1980.

Ketiga, awal 1979 Cina mengumumkan bahwa Perjanjian Persahabatan, Aliansi dan Bantuan Timbal Balik Cina-Soviet tidak akan diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir pada bulan April 1980. Pada waktu yang sama pemimpin-pemimpin Cina mengusulkan untuk mengadakan perundingan guna menyelesaikan soal-soal negara. Uni Soviet langsung menyetujui usul itu dan pada bulan September-Nopember 1979 empat sidang pendahuluan dan enam sidang pleno *perundingan "normalisasi"* diadakan di Moskwa. Putaran-putaran perundingan berikutnya yang akan diadakan di Beijing dibatalkan oleh Cina tiga minggu sesudah invasi Soviet ke Afghanistan. Sementara itu diadakan diskusi dalam negeri yang menyeluruh mengenai trend mendatang hubungan Cina-Soviet dalam tubuh Partai sampai eselon-eselon kader yang lebih rendah. Dua pidato pokok yang mencerminkan proses diskusi menunjukkan adanya *pandangan-pandangan yang sangat berlawanan*. Baik para penentang maupun pendukung detente timbal balik diizinkan mengerahkan kekuatan mereka secara yang relatif bebas. Pandangan-pandangannya diumumkan oleh jurnal pro-komunis Hongkong *Guangjiao Jing* (Teleskop) pada bulan April 1980. Pembicara yang mendukung peninjauan kembali hubungan Cina-Soviet adalah Wang Youping, Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan ketua delegasi pada perundingan-perundingan bilateral. Pembicara untuk kelompok keras adalah Li Yimeng, sejak 1975 salah satu Wakil Direktur Departemen Perhubungan Pusat PKC. Para pendengar pidato-pidato itu sedikit menyoroti garis pemisah antara *kekuatan-kekuatan anti- dan pro-rujuk*. Wang berbicara di depan korps diplomatik Cina sedangkan Li menggariskan pandangan-pandangannya untuk anggota-anggota Akademi Militer.

Wang mengatakan:

"Evaluasi kita mengenai Uni Soviet meninggalkan asas mencari kebenaran dalam fakta-fakta ... Penyelidikan, riset dan keputusan-keputusan strategis serta propaganda tidak boleh dika-
caukan ... Bertahun-tahun kita dan orang-orang Soviet saling menghina. Ini mencapai tingkat-tingkat teratas asas-asas dan dalil-dalil politik maupun garis politik. Soal-soal itu di-
besar-besarkan ... Tiba saatnya bagi kita untuk memikirkan kesimpulan-kesimpulan dari pengalaman dan pelajaran-pelajaran kita."¹

Pidato Wang itu tidak memuat referensi pada "revisionisme" dan "hegemonisme" Soviet dan secara demikian secara implisit mengakui sifat sosialis Uni Soviet. Selanjutnya ia menyatakan bahwa bukan Uni Soviet melainkan AS merupakan negara yang paling berbahaya dan paling kuat. Cina harus berhati-hati terhadap "penyakit takut akan Uni Soviet."

¹Pidato-pidato yang dimuat dalam *Guangjiao*, No. 91, 16 April 1980. Terjemahan Cina-Inggris oleh RM.

Dalam kontras dengan Wang, Li menyebutkan lagi daftar panjang tuduhan-tuduhan terkenal "revisionis, hegemonis dan sovonis superpower" dan mencapai kesimpulan-kesimpulan berikut:

"Jalan strategi kita untuk melawan imperialisme sosial dan hegemonisme Soviet harus tetap tak berubah. Kalau dalam soal ini kita sedikit mengalah atau mundur satu langkah kecil dan kalau sikap mengalah dan mendamaikan ini akan menjadi praktek kebijaksanaan kita terhadap Uni Soviet, maka akibat-akibatnya tidak bisa dibayangkan ... Kita bahkan dapat sedikit mendorong Uni Soviet. Dalam serangan balasan bela-diri kita melawan Vietnam Komite Sentral memperhatikan tiga jenis reaksi Soviet, yaitu kegiatan-kegiatan skala kecil, menengah dan besar. Kita membuat persiapan-persiapan untuk reaksi-reaksi skala menengah, tetapi dalam kenyataan bahkan tiada reaksi skala kecil pun dari pihak Soviet. Ini menunjukkan bahwa anda bahkan dapat sedikit menyinggung Uni Soviet. Terdapat suatu teori palsu yang mengatakan bahwa kita memerlukan suatu lingkungan internasional yang damai untuk melaksanakan keempat modernisasi kita. Kita telah mencapai sedikit detente dengan AS, kata teori itu, dan secara demikian menciptakan keadaan damai di Pantai Timur kita. Mengapa kita tidak bisa mencapai detente di sebelah utara, barat dan selatan juga? Teori ini salah ... Dapatkah kekuatan militer kita yang digelar sepanjang perbatasan Cina-Soviet dan di Mongolia Dalam ditarik mundur? Dapatkah kita kembali ke era Khrushchev? Kini soalnya telah menjadi suatu soal ancaman militer. Soalnya adalah ancaman suatu bangsa terhadap bangsa lain. Ini adalah soal eksistensi nasional kita. Sudah barang tentu kita tidak akan menantang Uni Soviet tanpa alasan tetapi kita sama sekali tidak bisa mengalah. Kita juga tidak dapat menerima suatu penyelesaian kompromi. Ini hanya akan menaikkan tingkat ancaman kita dan tidak mengurangnya. Uni Soviet hanya bisa ditahan lewat perlawanan. Serangan balasan bela-diri kita melawan Vietnam membuktikan kenyataan ini."

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan besar yang berorientasi ekonomi dan sebagian besar aparatur kebijaksanaan luar negeri Cina rupanya menginginkan agar "opsi Soviet" ditinjau kembali secara serius. Memang benar bahwa kekuatan-kekuatan yang berorientasi militer dengan tegas menolak segala peninjauan-kembali strategis dan sebagai akibat invasi Soviet ke Afghanistan perundingan-perundingan Cina-Soviet dihentikan. Pimpinan Cina rupanya mengalami "kejutan Afghanistan"-nya sendiri yang mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa-bangsa non-komunis. Akan tetapi apakah perundingan-perundingan 1979 itu dihentikan untuk sementara waktu atau secara definitif harus diserahkan kepada evaluasi mendatang.

Segala perubahan dalam sifat hubungan Cina-Soviet pasti akan mempunyai reperkusi-reperkusi jangka panjang di gelanggang Asia. Vietnam adalah negara yang kedudukan regionalnya akan paling banyak mengalami pengaruhnya, akan tetapi bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya maupun Jepang juga akan terpaksa meninjau kembali posisi mereka terhadap Cina.

Kalau kendati argumen-argumen di atas masih ada probabilitas bahwa hubungan Cina-Soviet untuk beberapa waktu akan ditentukan oleh sikap anti-

hegemoni Cina, hal itu semata-mata adalah akibat kenyataan bahwa Uni Soviet dewasa ini merupakan satu-satunya negara besar yang menghalang-halangi sasaran-sasaran kebijaksanaan Asia Tenggara Cina dan tidak bersedia memberi Cina lingkungan pengaruh Asianya.

SAINGAN INDIA

"Atas nama Pemerintah Cina, Wakil PM Deng Xiaoping menyatakan dengan khidmat dari mimbar ini bulan April 1974 bahwa kalau suatu hari Cina mengubah warna politiknya dan menjadi suatu superpower, kalau ia bertindak sebagai tiran di dunia, dan di mana-mana menjadikan-lain-lain negara sasaran bentakan, agresi dan pemerasannya, rakyat dunia harus mengidentifikasikannya sebagai imperialisme sosial, melanjutkannya dan melawannya ..." (Huang Hua di Majelis Umum PBB pada 29 September 1977).

Bulan Desember 1981 Cina dan India memulai pembicaraan mengenai sengketa perbatasan Cina-India. Bulan Juni 1980 Deng Xiaoping mengulangi di muka umum tawaran perundingan Cina tahun 1962 dan mengisyaratkan suatu "persetujuan paket" yang mengakui *status quo* sepanjang garis perbatasan.¹ Waktu itu komentar-komentar India kritis terhadap usul-usul Deng itu, tetapi kritik itu lebih merupakan akibat pertimbangan-pertimbangan taktis daripada akibat penolakan dasar.

Setelah sekitar dua dasawarsa "non-hubungan berarti," kebekuan yang tak mengenal kompromi dan usaha-usaha giat untuk melumpuhkan pengaruh internasional mereka satu sama lain, Cina dan India akhirnya terpaksa menyadari peranan yang mereka mainkan dalam soal-soal yang mengenai Asia. Kendati pemulihan hubungan berhati-hati yang ditegaskan oleh beberapa kunjungan tingkat tinggi (Atal Bihari Vajpayee ke Cina pada bulan Pebruari 1979 dan Huang Hua ke India pada bulan Juni 1981) dan perubahan-perubahan yang tak terduga dalam pendapat umum India terhadap Cina,² masih terdapat *masalah-masalah serius* yang perlu diselesaikan seperti sengketa perbatasan, kecondongan India pada Uni Soviet, hubungan khusus Cina-Pakistan, kekhawatiran India bahwa Cina akan bergerak ke Samudra Hindia lewat Birma dan laporan dukungan Cina untuk gerakan-gerakan sesesionis Timur Laut India maupun sikap India dalam konflik Indocina (pengakuan rezim Heng Samrin pada bulan Juni 1980). Masalah-masalah ini bersifat

¹Kantor Berita *Xinhua*, 25 Juni 1980.

²Suatu survei yang diadakan tahun 1978 oleh Indian Institute of Public Opinion mengungkapkan bahwa mayoritas 77% elite pendidikan universitas mendukung normalisasi hubungan dengan Cina. Menurut survei itu berubahnya struktur politik di Cina maupun perubahan-perubahan dalam kebijaksanaan luar negeri India telah menghasilkan iklim yang menguntungkan. (Indian Institute of Public Opinion, *Indo-Chinese Relations: A New Phase in Public Opinion, Politics, Social and Cultural Affairs* (Oktober, 1978), hal. 3-7).

bilateral (sengketa perbatasan, dukungan untuk gerakan-gerakan subversi) maupun *multilateral*, yaitu timbul dari aspirasi kekuatan regional kedua negara.

Dalam retrospeksi, hubungan antara Cina dan India itu bisa dibedakan dengan *empat tanggal*, yaitu 1954, 1959-1962, 1971-1972 dan 1978. *Tahap yang pertama* berlangsung dari 1954 sampai 1959 dan bercirikan apa yang dicap sebagai "romantisme India,"¹ dan pengaguman salah India terhadap "Cina Baru" Mao Zedong dan Zhou Enlai (persaudaraan India-Cina). Pada waktu itu usaha geopolitik India bertujuan memasukkan Cina dalam lingkungan politik pan-Asia yang dilihat secara kabur. Titik pangkal formal proses ini adalah *perjanjian koeksistensi Cina-India* April 1954 yang dimungkinkan oleh pengakuan *ex post* India atas aneksasi Tibet oleh Cina, artinya penyangkalan bersama bahwa Tibet adalah suatu negara merdeka. India selanjutnya memperjuangkan partisipasi Cina dalam Konperensi Bandung April 1955 dan secara demikian mengharap bisa meningkatkan kesadaran Cina akan "profil Asia"-nya. Cina harus melihat dirinya pertama-tama sebagai negara Asia dan baru kemudian sebagai negara komunis. Gagasan utopis suatu pengaturan bersama Cina-India untuk Asia rupanya didasarkan pada *dua rangkaian salah pengertian India*.

Pertama, setiap sinolog mengetahui bahwa tradisi politik budaya Cina tidak memberikan tempat kepada suatu identitas pan-Asia. Ditempatnya pemikiran Cina, seperti disebutkan di atas, selalu dikuasai gagasan *pax sinica* (tata dunia yang tunduk kepada Cina).

Kedua, para pembuat keputusan politik India menafsirkan secara salah sama sekali motif-motif di bawah kebijaksanaan "condong pada satu pihak" Cina. Ikatan Cina-India tidaklah pertama-tama didasarkan atas motivasi ideologi seperti "internasionalisme proletar" melainkan atas suatu jaringan komitmen politik yang penting dan harapan-harapan timbal-balik. Dimensi-dimensi komitmen-komitmen ini tidak dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian 1950 dan juga tidak di lain tempat tetapi merupakan ikatan bersama antara kedua negara itu. Lingkup ikatan ini secara implisit digariskan oleh identitas kepentingan mengenai kebijaksanaan keamanan Soviet dan Cina. Uni Soviet memberi Cina jaminan yang memadai untuk mengejar tujuan-tujuan nasionalnya dengan risiko terbatas (Perang Korea 1950-1953, krisis-krisis Selat Taiwan 1954, 1958). Cina pada gilirannya merupakan batu pojok timur dalam kerangka "strategi kontinental" Soviet. Dengan menjadi anggota "blok sosialis," koalisi internasional yang lebih lemah, Cina menambahkan

¹ Istilah "Romantisisme Asia" digunakan oleh Marie-Luise N  th, "China und Indien in Entspannungsdial  g," dalam *Asien*, Deutsche Zeitschrift f  r Politik, Wirtschaft und Kultur, No. 2, Januari 1982, hal. 16-38.

suatu tingkat kekuatan yang menentukan kepadanya melawan sistem Barat. Ia bertindak sebagai suatu "pengimbang sistem," biarpun akibat perspektif mereka yang dibentuk ideologi mereka para pemimpin Cina menyangkalnya. Cina rupanya menganut suatu kebijaksanaan luar negeri revolusioner yang unik tetapi sangat membutuhkan suatu perimbangan kekuatan internasional¹ dalam rangka mewujudkan kepentingan-kepentingan nasionalnya.² Hal yang sama berlaku untuk Uni Soviet. Ikatan protektorat bukanlah tujuan, melainkan prasyarat perjuangan bersama untuk sasaran-sasaran politik luar negeri yang identik atau paling tidak tumpang-tindih. Masing-masing negara mengharapkan agar negara yang lain menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaannya untuk memperkuat kedudukan internasional mereka.³ Cina tidak memperhitungkan opsi "berdiri antara" netral secara serius karena opsi ini "tidak menguntungkan bangsa kita." Dalam persepsinya kepentingannya akan dilayani secara terbaik dengan memihak Uni Soviet. Dalam rangka "kubu sosialis" suaranya penting dan sampai 1956-1957 ia memegang peranan penting dalam pembuatan keputusan aliansi. Kendati retorika ideologinya, kebijaksanaan "condong pada satu pihak" itu mengandung suatu *inti realpolitik*. Ini tidaklah berarti bahwa prosesnya tidak menjengkelkan. Sampai 1975-1976 fraksi-fraksi penting di Cina bersedia mewujudkan kepercayaan ideologi mereka tanpa banyak mempedulikan pertimbangan-pertimbangan realpolitik.⁴ Akan tetapi akhirnya Cina ingin ikut serta dalam konser kekuatan global, sekalipun dengan syarat-syarat ambisiusnya sendiri.

Kembali ke soal hubungan Cina-India awal, dari sudut pandangan pimpinan Cina, rencana struktur kerja sama pan-Asia India yang tidak mampu-

¹Lihat pidato Mao Zedong untuk wakil-wakil Federasi Perdagangan dan Industri Cina, Desember 1956: "Kubu sosialis pada pokoknya terdiri atas Uni Soviet dan Cina. Kebijakan Cina untuk condong ke pihak Uni Soviet tepat. Dewasa ini masih ada orang-orang yang meragukan kebijakan ini dan mengatakan bahwa kita tidak boleh condong bersama-sama. Beberapa orang bahkan mengira bahwa kita dapat mengambil sikap netral dan berdiri sebagai jembatan antara Uni Soviet dan AS. Itulah cara Yugoslavia. Ini berarti bahwa kita bisa mendapatkan uang dari kedua pihak, dari pihak yang satu dan pihak yang lain. Kami percaya bahwa tidaklah menguntungkan berdiri di antaranya." (*Mao Zedong sixiang wansui* (Hiduplah gagasan Mao Zedong), 1969, hal. 61-62).

²Lihat Daniel Tretiak, "Toward a Theoretical Explanation of Chinese Foreign Policy 1949-1977," dalam Lee Ngok dan Leung Chikeung (ed.), *China: Development and Challenge. Proceedings of the Fifth Leverhulme Conference*, Vol. III, *Foreign Policy: The Extension of a Revolutionary Strategy* (Universitas Hongkong, 1981), hal. 7-31.

³Lihat Peter N.S. Lee, "The Sino-Soviet Dispute Re-examined," dalam Kuang-Sheng Liao (ed.), *Modernization and Diplomacy of China* (Universitas Cina Hongkong, 1981), hal. 29-42.

⁴Dalam terminologi Cina inti realpolitik disebut "kompromi revolusioner" (Zhou Enlai). Konsep kompromi revolusioner ini sangat disanggah. Pada tahun 1975 Jiang Qing masih menecaci gagasan itu dan menyusun kalimat asosiatif: Cina tidak dapat mempunyai sahabat-sahabat putih dan sahabat-sahabat kaya!

nyai bentuk tidak lebih banyak berarti daripada opsi netral yang telah dilepaskan Cina pada tahun 1950.¹ Benarlah bahwa Cina bersama Indonesia berusaha membuka kembali "permainan" pan-Asia sepuluh tahun kemudian, akan tetapi pada waktu itu situasinya telah berubah. Sesudah sistem ikatan Cina-Soviet macet Cina rupanya tidak mempunyai alternatif selain melaksanakan kebijaksanaan "dangan" "pergi sendirian." Mengingat terbatasnya potensi kekuatan Cina, opsi "dangan" itu pasti gagal. Maka pimpinan Cina kembali ke kebijaksanaan "condong pada satu pihak" itu. Perbedaan-perbedaan ideologi ternyata sangat tidak penting.

Khususnya penting untuk konteks sekarang ini ialah kenyataan bahwa salah satu celah antara Uni Soviet dan Cina sedikit banyak disebabkan secara tidak disengaja oleh India. Dalam melaksanakan kebijaksanaan Non-Bloknya, India berusaha memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Uni Soviet agar menjadi kurang bergantung pada dukungan AS. "Pengambilan uang dari kedua pihak" India segera dicaci-maki oleh pimpinan Cina sebagai cara "biara dengan empat kepala" (yang mengulurkan tangan mereka ke empat jurusan untuk minta-minta).

Pada tahun 1956-1957 kekuatan Soviet terhadap sistem Barat telah sangat meningkat. Ia *tidak lagi membutuhkan sekutu Asia Timurnya* yang menjengkelkan dan tidak menentu, paling sedikit tidak dengan syarat-syarat Cina yang banyak menuntut. Neraca dalam sistem telah berubah sehingga kedudukan Cina menempati prioritas yang lebih rendah. Pimpinan Cina mencoba menantang Uni Soviet untuk menghentikan langkah mundurnya dari komitmen semulanya pada Cina. Terlepas dari Taiwan (krisis 1958), India adalah kasus yang paling menentukan di mana Cina berusaha mengadakan tekanannya. Dengan menempatkan soal perbatasan sekunder yang seharusnya bisa diselesaikan tanpa pergesekan berat di pusat hubungan Cina-India dan meningkatkan krisis akibatnya menjadi *perang perbatasan* tahun 1962, Cina berusaha menekan Uni Soviet untuk memihaknya melawan India yang dilihatnya sebagai saingan dan membujuk pimpinan Soviet agar tidak melepaskan sikap pro-Cina semulanya. Seperti diketahui, Cina *salah hitung*. Uni Soviet tidak hanya tetap netral, tetapi bahkan memberikan dukungan material dan politik terbatas kepada India dan secara demikian membuka tahap baru hubungan kerja sama Soviet-India yang mencapai puncaknya pertama pada prakarsa perdamaian Tashkent Soviet tahun 1965-1966 dan kemudian pada Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama Soviet-India tahun 1971. Seperti dilihat oleh Cina, Uni Soviet sengaja menjadikan India substitut Cina di Asia.

¹Hipotesis yang diajukan di atas itu menunjukkan bahwa pengarang tidak pernah akan kesahan diskusi "Bagaimana kita kehilangan Cina" di AS yang berusaha menyalahkan pelaksanaan kebijaksanaan yang tak berdasarkan ilmu oleh AS sebagai sebab putusnya hubungan Cina-Amerika menjelang Perang Korea.

Pada *tahap kedua* sejarah hubungan Cina-India kebijaksanaan India Cina dilaksanakan di *dua tingkat* yang berlainan -- India sebagai negara saingan di Asia dan India sebagai negara langganan Uni Soviet di Asia Selatan. Dalam praktek kedua rangkaian kebijaksanaan itu terjalin tetapi dimensi-dimensinya yang berlainan dapat dilihat dengan jelas.¹

Di satu pihak India dilihat sebagai *saingan utama Cina di Asia* yang pengaruh tandingan regionalnya *harus diperlemah dan dibendung* dengan segala cara seperti mendukung gerakan-gerakan separatis Naga dan Mizo di daerah Badan Perbatasan Timur Laut (NEFA) yang secara strategis terbuka dan yang dihubungkan dengan wilayah utama India hanya oleh koridor Siliguri yang sempit. Pada tahun 1966-1972 para pengusaha India mampu mengidentifikasi beberapa kelompok gerilya yang dilatih dan mengalami indoktrinasi di Cina. Menurut sumber-sumber Eropa Timur seperti kantor berita Polandia² Cina juga terlibat dalam membangkitkan gelombang-gelombang keresahan anti-Bengal di Assam, Manipur dan Tripura pada tahun 1979-1980. Akan tetapi laporan-laporan itu tidak mendapatkan konfirmasi dari sumber-sumber yang dapat lebih dipercaya. Namun Cina untuk pertama kalinya merasa harus meyangkal keterlibatan semacam itu dengan tegas.³ Akan tetapi harus diingat bahwa sebagian daerah NEFA yang rawan itu termasuk daerah-daerah yang sejak bagian akhir 1950-an dipersengketakan antara Cina dan India. Dari garis perbatasan bersama sepanjang 3.400 km sejauh ini hanya seksi antara Tibet dan Nepal sepanjang 1.050 diakui secara legal. Apa yang disebut sektor Barat yang meliputi "padang batu putih" Aksai Chin sektor tengah dan timur yang meliputi 90.000 km² dari apa yang diklaim India sebagai bagian negara bagian Arunachal Pradesh masih menunggu suatu penyelesaian perjanjian yang definitif. Sebagai akibatnya dapat dibayangkan bahwa godaan Cina untuk mendukung gerakan-gerakan separatis dan memperlemah kekuasaan Pemerintah India atas daerah NEFA mestinya besar.

Kalau bantuan Cina untuk minoritas-minoritas separatis dan kelompok-kelompok pecahan Maois yang tidak puas sedikit banyak dapat dianggap sebagai bagian kebijaksanaan gangguan-gangguan kecil anti-India, serangan politik utamanya bersumber pada *rencana pembendungan India* yang dicoba secara sistematis di Asia Selatan. Negara-negara kecil yang berbatasan dengan India dalam suatu lingkaran selalu takut akan sasaran-sasaran kebijaksanaan

¹Lihat Oskar Weggel, "Erneute Indisch-chinesische Spannungen in der Himalaya -- Region," dalam *China aktuell*, Desember 1974.

²PAP, dikutip oleh BBC, SWB, 19 Juni 1980.

³*Harian Rakyat* 5 Juli 1980 memuat suatu karangan Gui Dongchang yang memberikan laporan penuh mengenai kesulitan-kesulitan NEFA dan asal mula sejarahnya. Gui mengatakan bahwa keresahan itu semata-mata adalah soal domestik India dan sama sekali tidak penting bagi Cina.

regional India. Khususnya Pakistan curiga bahwa Pemerintah India melihat dirinya sendiri sebagai pewaris bekas Imperium India Inggris dan tidak pernah menerima sepenuhnya pembagian anak benua India dalam beberapa negara merdeka. Akibat kecenderungan India untuk mencampuri urusan dalam negeri Sri Lanka, hubungan antara Sri Lanka dan India juga tidak bebas dari ketegangan-ketegangan besar. Mengenai negara-negara Himalaya Nepal, Bhutan dan Sikkim yang bersama Ladakh dan daerah NEFA India secara metaforis disebut "kelima jari Cina ke India," leitmotiv politik India yang paling besar ialah mempertahankan mereka, kalau mungkin, di bawah perwaliannya. Asas pembimbing yang paling kecil ialah mencegah segala pengaruh Cina.

Cina sebaliknya berusaha secara persisten untuk memanfaatkan potensi konflik yang dalam terminologi Cina berakar pada "hegemonisme" regional India untuk rencananya sendiri. *Pertama*, pada waktu sengketa perbatasan Cina-India meningkat secara berangsur-angsur, Cina mengadakan secara demonstratif perjanjian-perjanjian bilateral dengan Birma (Persetujuan mengenai Soal Perbatasan, Perjanjian Persahabatan dan Non-Agresi, 1960), Nepal (Persetujuan Perbatasan, 1963) dan Pakistan (Persetujuan Perbatasan Sementara, 1963). *Kedua*, Cina memperbaiki infrastruktur militer dan logistik dalam negeri terhadap Asia Selatan dan mulai membangun beberapa jalan raya trans-Himalaya "politik" dari Tibet ke India lewat Sikkim dan Nepal maupun jalan raya Karakorum yang termasyhur ke Pakistan (1967-1968), yang menjadi salah satu soal pemikiran keamanan bagi India. *Ketiga*, berdasarkan "hubungan kerja sama khusus" dengan Pakistan Cina berusaha sesudah tahun 1962 menempuh berbagai jalan untuk membentuk semacam front persatuan bersama Asia Selatan melawan India. *Keempat*, untuk memperkuat calon-calon sekutu Asia Selatannya, Cina telah memberikan banyak bantuan ekonomi kepada mereka. Suatu analisa komposisi regional program bantuan Cina untuk bangsa-bangsa non-komunis jelas menunjukkan adanya dua titik berat, yaitu Asia Timur dan negara-negara Asia Selatan di sekitar India.¹ Sesudah Tanzania Pakistan telah menerima jumlah bantuan terbesar Cina di antara negara-negara non-komunis. Pada waktu yang sama Cina juga merupakan donor bantuan militer Pakistan yang paling besar sejak 1972.

Di samping program-program bantuan pembangunan, Cina juga mengadakan persetujuan-persetujuan perdagangan bilateral yang bermotivasi politik

¹Dalam periode 1970-1973 bantuan Cina untuk negeri-negeri non-komunis mencapai US\$ 2,1 milyar tahun 1970, di antaranya US\$ 555 juta disalurkan ke Afrika Timur dan US\$ 416 juta ke Asia Selatan. Sebelum 1970 seluruh bantuan non-komunis Cina hanya US\$ 1,1 milyar, dan sesudah 1973 jumlah bantuannya menurun dengan cepat menjadi rata-rata US\$ 100 juta lebih sedikit per tahun. (Rüdiger Machetzki, *Die Entwicklungspolitik der VR China*, Mitteilungen des Instituts für Asienkunde, Hamburg, No. 70, 1975).

dengan beberapa negara Asia Selatan seperti persetujuan barter beras-karet dengan Sri Lanka yang dari segi ekonomi banyak menguntungkan Sri Lanka tetapi kurang penting untuk Cina.

Kendati semua usaha ini, meninjau hampir dua dasawarsa kebijaksanaan pembendungan Asia Selatan Cina, orang tidak dapat menghindari kesan bahwa *hampir tidak dicapai hasil yang terasa*. Bisa dikemukakan bahwa hasil-hasilnya bersifat tidak langsung, yaitu India akan menempuh suatu jalan regional yang lebih pervasif jika tiada pengaruh tangkisan Cina. Namun tampak sulit untuk tidak ingin membuktikan terlalu banyak kalau orang ingat akan intervensi militer dan peranan aktif India dalam pemecahan Pakistan dan pembentukan Bangladesh tahun 1971-1972 maupun aneksasi Sikkim tahun 1973-1975. Rupanya masuk akal untuk berasumsi bahwa pimpinan Cina akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama. Kurang berhasilnya kebijaksanaan pembendungan Cina terhadap India jelas merupakan salah satu sebab pendekatan berhati-hati Cina terhadap India beberapa tahun belakangan ini. Permulaan formal tahap yang baru ini adalah kunjungan suatu delegasi 12 orang di bawah pimpinan Wang Bingnam, Presiden Perhimpunan Persahabatan Rakyat Cina dengan Negara-negara Asing, pada bulan Maret 1978.

Garis depan internasional kedua yang diperjuangkan oleh Cina terhadap India sejak awal 1960-an ditujukan pada India yang dikatakan bertindak sebagai *negara langganan besar Soviet* di Asia dan batu Asia Selatan untuk bangunan strategi global "imperialisme sosial" Soviet. Dua dimensi keprihatinan yang agak dijadikan upacara dan stereotip bisa dilihat dari seluruh konteks tuduhan-tuduhan propaganda Cina.

Pertama, sejak awal 1960-an Cina berusaha menghancurkan prestise politik India sebagai salah satu bangsa perintis gerakan Non-Blok Dunia Ketiga. Cina berusaha secara sistematis melukiskan posisi India sebagai posisi Non-Blok palsu dan "sesuai dengan koeksistensi damai dengan imperialisme" (Konperensi Negara-negara Non-Blok Kedua di Kairo, Oktober 1964) dan imperialisme sosial dan secara demikian melayani kepentingan Uni Soviet. Baru sesudah kegagalan Konperensi Algiers tahun 1965 dan terutama sesudah penerimaan Cina sebagai anggota PBB pimpinan Cina akhirnya menyadari bahwa Cina tidak mampu mendapatkan cukup dukungan Dunia Ketiga untuk menggantikan India.

Kedua, sejak Nopember 1963¹ Cina secara persisten menuduh India dan Uni Soviet menempuh suatu jalan bersama yang bersifat anti-Cina. Kece-

¹Lihat "The truth on how the leaders of the CPSU lined up with India against China," dalam *Renmin Ribao* (Harian Rakyat), 2 Nopember 1963.

ancaman Cina meningkat ketika Uni Soviet mengajukan usul pembentukan suatu *Sistem Keamanan Kolektif di Asia* kepada dunia pada bulan Juni 1969. Sistem yang direncanakan itu dilukiskan sebagai suatu sistem keamanan pan-Asia untuk menjamin kemerdekaan negara-negara Asia dan "menghentikan konflik-konflik regional yang dikobarkan oleh negara-negara imperialis seperti AS dan negara-negara ekspansionis seperti Cina."¹ Cina segera melancarkan kampanye melawan sistem itu dengan mencapnya sebagai versi Soviet suatu super-SEATO baru, yaitu suatu sistem pembendungan kolektif yang ditujukan pada Cina. Ia lebih lanjut *menuduh India berkomplot dengan Uni Soviet untuk melaksanakan kebijakan "hegemonis dan ekspansionis" bersama* di Asia dan Asia Selatan. Berita mengenai kekhawatiran Cina itu diperkuat ketika hubungan baik Soviet-India itu mencapai puncaknya dengan diadakannya perjanjian tahun 1971 yang sekalipun menghormati sikap Non-Blok India memuat suatu pasal mengenai bantuan keamanan (pasal 9). Ditandatangani menjelang perang India-Pakistan di Bangladesh, perjanjian itu akan segera ternyata bernilai. Pemecahan Pakistan dan lahirnya Bangladesh secara definitif merusak perimbangan kekuatan regional di Asia Selatan yang ada sejak 1947. Cina sekali lagi terpaksa mengakui keterbatasan potensi kekuatannya sendiri. Tindakan menunda pengakuan Bangladesh dan memveto keanggotaannya di PBB bukanlah suatu tindakan politis melainkan frustrasi.

Kemunduran di Asia Selatan tahun 1971-1972 itu rupanya merupakan salah satu faktor mengapa tekanan propaganda secara berangsur-angsur digeser dalam kampanye India-Soviet Cina. Di satu pihak Cina mulai kurang menekankan ancamannya sendiri. Sebaliknya ia mulai menekankan ancaman yang bersumber pada komplotan Soviet-India terhadap seluruh Asia. Sejak pertengahan 1975 misalnya media massa Cina secara terus-menerus menyampaikn peringatan kepada bangsa-bangsa Asia Selatan bahwa Uni Soviet merencanakan untuk menguasai kawasan dan "menelannya dalam satu tegukan." India dituduh menyediakan daerah-daerah pangkalan untuk ofensif Asia Tenggara. Di lain pihak Cina berusaha menarik sebanyak mungkin kekuatan ke barisan anti-Soviet bersama. Sejak pertengahan 1973 ia bahkan memperjuangkan agar aliansi CENTO yang hampir mati itu dihidupkan kembali. Pada kesempatan sidang ke-20 konperensi menteri CENTO pada bulan Juli 1973 media massa Cina menerbitkan ulasan-ulasan terperinci mengenai aliansi ini dan menyambut baik orientasi anti-Sovietnya. Sejak kudeta tahun 1974 di Afghansitan, yang tampaknya mendapat restu Soviet, kalau bukan dukungan diam-diam, Cina tak pernah berhenti mengulangi pernyataannya bahwa ia cemas dengan ambisi-ambisi Soviet untuk memecah Pakistan lebih

¹ Kertas-kertas dan Dokumen-dokumen Pemerintah Pakistan, dikutip dari G.W. Choudhury, "The Sino-Soviet Rift and Its Impact on South and Southeast Asia," dalam *South-East Asia Spectrum*, Vol. 4, No. 2, Januari-Maret 1976, hal. 12.

lanjut dan dalam jangka panjang menciptakan negara-negara yang bergantung pada Uni Soviet di Baluchistan dan Paktoonistan. Oleh sebab itu ia secara aktif memajukan gagasan suatu poros keamanan bersama antara Pakistan dan Iran yang tidak pernah terwujud sebagai akibat perkembangan dalam negeri Iran. Namun Cina tidak menghentikan usahanya mencari "sekutu-sekutu" anti-Soviet (dan anti-India) di Asia. Bulan Agustus dan Nopember 1975 ketika terjadi tiga kudeta berturut-turut di Bangladesh, yang akhirnya membentuk suatu rezim anti-Soviet dan anti-India, Cina menyambut baik kejadian-kejadian itu.

CINA DAN JEPANG: KERJA SAMA ANTAGONISTIS?

"Kematian Zhou Enlai diumumkan pada 9 Januari 1976 pagi. Petangnya surat-surat kabar Jepang memuat laporan lengkap mengenai meninggalnya Zhou, termasuk biografinya. Delapan persepuluh halaman muka *Asahi Shimbun* Tokyo digunakan untuk memberitakan kematian Zhou dan satu persepuluh melaporkan suatu keputusan IMF. Pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Soviet Gromyko tiba di Tokyo untuk perundingan yang sangat penting dengan Pemerintah Jepang, tetapi kedatangan Gromyko hanya mendapatkan satu perdua-puluh halaman muka surat kabar itu. Secara demikian dalam arti tertentu kematian Zhou Enlai mengalahkan Gromyko yang masih hidup!" (Shinkichi Eto, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Tokyo.)

Kekuatan pulau Jepang adalah *salah satu musuh utama Cina selama se-ratus tahun terakhir* (kolonialisme Eropa, militarisme Jepang, imperialisme AS dan imperialisme sosial Soviet). Satu dasawarsa berselang pimpinan Cina masih mencaci sikap kebijaksanaan luar negeri Jepang sebagai sikap sub-power imperialis perifer (antek imperialisme AS) yang menyaksikan kebangkitan bushido, semangat perang kelas aristokrasi yang berkuasa. Bahkan dalam periode antara pembukaan hubungan diplomasi pada bulan September 1972 dan penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Agustus 1978 sikap Cina terhadap Jepang agak berubah-ubah. Baru sesudah penandatanganan perjanjian itu dan persetujuan Jepang dengan ketentuan anti-hegemoni Cina pimpinan Cina percaya bahwa Jepang telah melepaskan secara formal posisi sama jaraknya antara Uni Soviet dan tetangganya di daratan Asia. Namun masih terdapat *sisasisa kesadaran persaingan laten* Asia Timur di kedua tepi Laut Cina Timur.

Pertama, elite politik Cina -- komunis atau bukan -- terlalu menyadari sejarah untuk melupakan tantangan keturunan Meiji yang menghina terhadap kedudukan Cina mengatur dunia selama beribu-ribu tahun. Jepang sebaliknya terlalu kuat untuk mudah dijadikan lagi salah satu "sesama yang tunduk" kepada Cina.

Kedua, kedua sistem sosial-ekonomi berada dalam *persaingan model satu sama lain*. Pimpinan komunis Cina selalu sadar akan kenyataan bahwa "pengalaman Jepang" mempunyai dampak kuat atas lain-lain negeri Asia. Bukanlah Eropa Barat atau Amerika Utara melainkan contoh Jepang yang membuat kebanyakan negeri Asia percaya bahwa mereka bisa mencapai modernisasi juga. Keberhasilan Jepang sesudah perang ternyata menarik bahkan untuk Cina itu sendiri. Berbeda dengan itu "model modernisasi Cina" tidak mencapai lebih banyak daripada pujian (Seri FAO "Belajar dari Cina"). Murid praktis satu-satunya dari Cina adalah kaum komunis abad batu Kam-puchea Demokratis. Akan tetapi mereka mestinya membaca pelajaran itu secara salah.

Ketiga, masih terdapat *persengketaan mengenai landas kontinen Asia Timur*. Kelihatannya masalahnya berkisar pada pulau kecil Tiaoyutai/Senkaku (6,3 km²), akan tetapi ia pasti akan mendapat lingkup yang lebih besar, yaitu mencapai suatu pengaturan zone-zone ekonomi maritim di seluruh Asia Timur. Persoalannya untuk sementara ini ditangguhkan. Ada kemungkinan bahwa waktu akan menguntungkan Cina.¹ Beberapa skenario jangka panjang meramalkan bahwa Jepang akhirnya akan bersedia menyesuaikan posisi internasionalnya dengan posisi Cina untuk mendapatkan konsesi-konsesi ekonomi yang besar.

Persepsi Cina ialah bahwa Jepang adalah suatu pusat kekuatan ekonomi akan tetapi secara politik bisa dikerjakan. Berdasarkan persepsi ini kebijaksanaan Jepang Cina diarahkan untuk mewujudkan secara berangsur-angsur *tiga rangkaian tujuan* yang berbeda-beda.

Di satu pihak, Jepang harus dinasihati agar tidak lagi menganut pandangan keamanan nasional suatu "insider internasional." Artinya, ia harus puas dengan *suatu profil bela-diri yang rendah* dan berusaha "membeli" keamanan lewat kerja sama ekonomi besar-besaran dengan Uni Soviet dan lain-lain negara. Akan tetapi masih ada ketidakenakan di Cina mengenai soal sejauh mana build-up militer Jepang akan diinginkan. Pernyataan-pernyataan Cina mengenai hal itu tidak memuat saran-saran yang jelas. Jelas Cina tidak

¹Bulan April 1978 Cina mengirimkan suatu armada nelayan ke pulau-pulau kecil itu dengan poster-poster yang mengklaim kepulauan itu sebagai "wilayah nasional kita." Lima bulan kemudian, dalam kunjungannya ke Jepang bulan Oktober 1978 yang banyak diberitakan, Deng Xiaoping mengumumkan dalam suatu konperensi pers bahwa Pemerintah Cina maupun Jepang sepakat untuk melupakan soal itu: "Beberapa orang mencoba memanfaatkan persoalan ini untuk merusak hubungan Cina-Jepang. Kita menamakan pulau-pulau itu Tiaoyutai. Anda memberinya nama lain. Mengenai hal ini kita memang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Bagi kita tidak apa-apa melupakan soal ini untuk beberapa waktu, katakan 10 tahun. Generasi kita tidak cukup masuk akal untuk menemukan bahasa bersama mengenai soal ini. Generasi berikut pasti akan lebih masuk akal untuk menemukan suatu penyelesaian yang dapat disepakati."

menginginkan Jepang mampu memainkan suatu peranan kekuatan regional yang otonom. Suatu Jepang yang seperti de Gaulle mempunyai suatu kekuatan nasional pemukul (*force de frappe*) sendiri kiranya tidak akan disenangi oleh Cina.

Di pihak lain, adalah kepentingan Cina untuk *menarik Jepang ke suatu "hubungan khusus" asimetris* dan secara demikian mengabadikan hubungan dingin antara Jepang dan Uni Soviet. Cina melihat dengan jelas bahwa usaha Jepang untuk mempertahankan suatu posisi sama jarak merugikan keamanan nasionalnya sendiri. Ia percaya bahwa Jepang (dan AS) harus dimasukkan dalam rencana anti-Sovietnya di Asia seperti ditegaskan oleh Su Yu, Wakil Menteri Pertahanan, pada bulan Desember 1978:

"Jika perang pecah antara Cina dan Uni Soviet, tidaklah cukup bagi kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita berusaha membaharui kekuatan kita, hanya sesudah dua puluh atau tiga puluh tahun kita akan mampu melihat beberapa hasil. Dewasa ini, biarpun kita mempunyai bom nuklir, dibandingkan dengan lawan kita, kita masih seperti "shaman kecil" lawan "shaman besar" atau seperti suatu bola tanah liat lawan suatu batu ... Manfaat kita membina hubungan bersahabat dengan negeri-negeri maju seperti AS dan Jepang, pada hemat saya, sangat jelas. Kita bisa menggunakan batu-batu mereka untuk mengimbangi batu-batu Rusia. Ini akan menjadi apa yang disebut oleh negeri-negeri Barat suatu penjera (*deterrent*)."¹

Di beberapa negeri Barat ini juga akan disebut "memainkan sekutu AS-Jepang" biarpun "menggunakan batu-batu mereka" lebih tepat sehubungan dengan pernyataan lebih lanjut Su Yu:

"Makin lama kekuatan penjera ini berfungsi makin baik bagi kita. Sekali bola tanah liat kita diubah menjadi suatu batu, bukan saja kita tidak perlu takut akan Rusia Soviet tetapi kita juga akan mampu memberinya suatu pelajaran kapan saja kita mau. Biarpun Cina, Jepang dan AS tidak merupakan suatu front persatuan, hasil ini dalam kenyataan akan dicapai secara berangsur-angsur. Suatu pengertian diam-diam akan cukup ... Satu-satunya soal ialah apakah mereka akan menunjukkan keberanian dan tekad yang tegar terhadap Uni Soviet."

Peranan ketiga yang akan dimainkan Jepang demi kepentingan Cina adalah peranan *mesin pelengkap bagi usaha modernisasi jangka panjang Cina*. Karena Jepang secara geografis dekat, meningkatnya ketergantungannya pada pasaran luar negeri (Cina "perbatasan ekonomi baru"), umpan eksploitasi sumber daya maritim dan kontinental bersama dan pertalian etnis-budaya menjadikan Jepang rekan yang paling cocok untuk Cina.

Pernah dikatakan bahwa "Jepang tidak memerlukan suatu program modernisasi karena ia telah merupakan suatu bangsa modern ... Berlainan dengan tiadanya konsistensi dan stabilitas yang merupakan ciri Cina pada

¹Diterbitkan dalam terjemahan Inggris oleh Institute of Current China Studies dalam *Inside Mainland China*, Maret 1979, hal. 1-3.

dasawarsa-dasawarsa belakangan ini, pengunjung Jepang cepat menjadi sadar bahwa negara ini sejak Perang Dunia II memiliki stabilitas dan konsistensi maksud yang hampir unik."¹

Evaluasi ini tidak mudah disanggah. Namun kiranya perlu mengutip suara seorang ahli politik Jepang yang mengatakan:

"Sejak Jepang mulai menyerap pengaruh peradaban Cina lebih dari seribu tahun yang lalu, ia jatuh dalam lingkungan peradaban Cina ... Orang-orang Jepang telah mengembangkan suatu orientasi yang luar biasa kuat pada pusat lingkungan ini. Saya menamakan mentalitas tak biasa ini suatu kompleks minoritas pinggiran ... Kompleks minoritas pinggiran itu mengandung suatu sindrom cinta-benci ... Sesudah 1945, rasa kepentingan bersama tersebut di atas menghilang untuk beberapa waktu. Revolusi Cina menempuh jalannya sendiri, sedangkan Jepang memusatkan usahanya untuk mengatasi kelaparan dan kerusakan. Untuk Jepang hubungan dengan Cina menjadi sekunder sesudah hubungannya dengan AS ... Pada hemat saya dengan kebangkitan nasional Jepang itu muncul kembali minat Jepang untuk soal-soal Cina ... Sejarah hubungan Cina-Jepang mengisyaratkan hal berikut. Apabila orang-orang Jepang merasa bahwa Cina lemah dan tidak kompeten, mereka mengembangkan segi benci kompleks cinta-benci itu dan menjadi arogan. Apabila orang-orang Jepang merasa bahwa Jepang lemah dan tidak kompeten terhadap Cina, mereka mengembangkan segi cintanya dan menjadi seperti budak."²

Kutipan panjang ini mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan jangka panjang bahwa Jepang akan mengakui keunggulan Cina di Asia seperti ia sejauh ini menerima kepemimpinan AS dalam politik internasional. Jadi hanya tergantung pada kemampuan Cina untuk "menjadikan bola tanah liat kita sebuah batu."³

CINA DAN ASIA TENGGARA: KEMBALI KE "TANAH-TANAH LUAR"?

"Setelah mengalahkan Cina, negara-negara imperialis merebut sejumlah negeri yang merupakan vasal Cina dan bagian Cina. Jepang menduduki Korea, Taiwan, pulau-pulau Ryukyu, pulau-pulau Penghu dan Lushun. Inggris merebut Birma, Bhutan, Nepal dan

¹U.S. Senate, *A Report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate* (The United States, China and Japan), oleh delegasi pimpinan Frank Church (Washington, D.C., September 1979), hal. 21.

²Shinkiehi Eto, "Sino-Japanese Relations in Perspective," dalam Kuang-Sheng Liao (ed.), *Modernization and Diplomacy of China* (Universitas Cina Hongkong, 1981), hal. 107-116.

³Suatu survei pendapat umum mengenai hubungan luar negeri Jepang yang diadakan bulan Mei 1981 menunjukkan hasil-hasil berikut: (1) kawasan dunia yang paling penting untuk Jepang: Amerika Utara (40%), Asia (32%), Timur Tengah (22%), Eropa Timur-Uni Soviet (15%), Eropa Barat (13%), Amerika Latin (5%), Australia-Pasifik Selatan (4%); (2) negara-negara Asia yang paling penting untuk Jepang: Cina (72%), Korea Selatan (41%), India (20%), Indonesia (11%), Filipina (11%), Singapura (7%), Muangthai (6%), Vietnam (4%). Lihat *Gekkan Seron Chosa* (pengumpulan pendapat bulanan), diterbitkan oleh Kantor PM, Departemen Hubungan Masyarakat, Oktober 1981, hal. 24-26.

Hongkong. Perancis merebut Annam, dan bahkan suatu negeri kecil seperti Portugal menduduki Aomen." (Mao Zedong, dikutip dari *Revolusi Cina dan Partai Komunis Cina*, versi asli Desember 1939).

"Setelah mengalahkan Cina, negara-negara imperialis tidak menguasai sejumlah negeri yang terletak sekitar Cina yang mula-mula dilindungi oleh Cina tetapi mereka juga merebut atau 'menyewa' bagian-bagian wilayah Cina." (Mao Zedong, versi revisi tahun 1969).

"Kita telah menempatkan pulau-pulau Xisha di bawah kekuasaan kita. Orang-orang Vietnam mengatakan bahwa pulau-pulau itu milik mereka. Biarlah mereka bicara. Mereka beberapa kali minta kepada kita untuk mengadakan perundingan mengenai soal pulau-pulau Xinsha itu. Kita menolaknya setiap kali. Belakangan ini beberapa delegasi Vietnam datang kemari dan mencoba berbicara mengenai soal itu. Sekitar 20 April Pham Van Dong tiba. Ia juga minta kepada kita untuk membicarakannya. Tetapi kita menolaknya seperti sebelumnya ... Dewasa ini pulau-pulau Nansha-lah yang paling penting. Sehubungan dengan pulau-pulau itu kita tidak mengadakan persiapan-persiapan sekarang ini, tetapi mereka wilayah kedaulatan kita. Mengenai soal kapan kita akan mengambil alihnya, kita menantikan suatu kesempatan baik dan kita akan membicarakannya." (Pernyataan intern Huang Hua pada 30 Juli 1977).

Sejak negeri-negeri Asia Tenggara menjadi sadar akan eksistensi bersama mereka dalam apa yang kini disebut suatu kawasan majemuk, sudah barang tentu mereka cenderung untuk melihat diri mereka sebagai *bagian suatu sistem internasional yang terletak antara kedua negara sub-kontinental India dan Cina*. Jadi mereka memandang Cina sebagai suatu negara di luar kawasan mereka. Akan tetapi seperti dilihat oleh Cina, Asia Tenggara mendapat suatu dimensi yang berlainan. Kawasan ini dinilai sebagai suatu lingkungan geostrategi ke mana Cina harus mendapatkan suatu akses geopolitik yang lengkap untuk menjamin dirinya sendiri suatu peranan penting. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa maksud-maksud jangka panjang Cina mengenai Asia Tenggara ialah membangun *suatu lingkungan kepentingan yang eksklusif*. Akan tetapi ini hanya akan meliputi sebagian seluruh konteksnya. Ia tidak memperhitungkan dimensi historis pandangan Cina mengenai Asia Tenggara seperti disalurkan dalam pemikiran Cina lewat tradisi historiografi imperialnya.

Menurut tradisi ini, Laut Cina Selatan dan negara-negara pantainya sebelum masa penjajahan secara sah termasuk tata dunia Cina. Kawasan itu adalah *Nanyang*, "*daerah Laut Selatan*" yang mendapatkan identitas politik budayanya hanya berkat kebaikan imperial Cina. Sesuatu dari tradisi di bawahnya ini menjadi jelas dalam "serangan balasan bela-diri" Cina terhadap Vietnam. Disebutnya sifat "pelajaran hukuman" perang itu mengingatkan kita akan ucapan imperial. Maka tidaklah mengherankan bahwa pimpinan Cina sejak itu menunjukkan kepekaan yang dinyatakan secara terang-terangan terhadap kampanye propaganda Cina yang mengidentifikasi sasaran-sasaran kebijaksanaan Asia Tenggara Cina dengan sasaran-sasaran imperium lama.

Negara-negara Asia Tenggara sekarang ini merupakan "*tanah-tanah luar*" dan dilihat sebagai tunduk pada "politik domestik dunia" gaya Konfusius Cina. Hanya di bawah dampak negara-negara Barat "persemakmuran vasal" lama itu roboh. Dalam terminologi Cina proses itu dilukiskan sebagai "kan-shi," artinya "menggerogoti (daun dari pinggirnya) seperti dilakukan ulat sutera." Bila Cina menyebutkan "penghinaan" yang dideritanya dari negara-negara Barat, hal ini bukanlah jenis "penghinaan" yang sama yang diderita oleh negeri-negeri Asia lainnya. Penghinaan Cina adalah penghinaan suatu negara yang imperiumnya telah "digerogoti oleh ulat-ulat sutera."

Selain itu, pemikiran Cina sebenarnya *belum menerima asas-asas hukum internasional modern*. Rupanya masih ada bentrokan pikiran antara asas-asas lama "hukum vasal" Cina yang merupakan suatu konsep historis *sui generis* dan hukum internasional "non-Cina." Pertama, Cina biasa mencaci semua perjanjian internasional yang ditandatangani sejak sebelum 1949 sebagai apa yang disebut "perjanjian tak berimbang" dan menyatakannya tidak sah tidak peduli keadaan yang menghasilkannya. Kenyataan ini mempunyai suatu pengaruh langsung atas hubungan Cina dengan kesebelas negara tetangganya. Dengan kelima negeri Birma, Nepal, Afghanistan, Mongolia dan Pakistan Cina mengadakan perjanjian-perjanjian perbatasan yang "mengesahkan" garis-garis demarkasi. Mengenai keenam negeri lainnya, Cina menyatakan bahwa soal perbatasan belum diselesaikan (Uni Soviet, Korea Utara -- daerah Baitoushan/Paektusan, Bhutan, Laos, Vietnam dan India). Karena Cina tidak mengakui doktrin legal persetujuan diam-diam (*acquiescence*), soal perbatasan itu setiap waktu bisa digunakan sebagai tuas untuk mempengaruhi seluruh hubungan dengan negeri-negeri itu.

"Pendapat bahwa diam berarti setuju sama sekali tidak mencerminkan asas-asas hukum internasional yang diterima. Dapatkah dikatakan bahwa suatu negara berdaulat tidak berhak untuk menyimpan pahamnya mengenai soal-soal kedaulatannya sendiri dan mengajukannya pada kesempatan-kesempatan yang cocok?"¹

Selain itu ada indikasi-indikasi bahwa Cina cenderung untuk melihat kesahan perjanjian-perjanjian internasional dalam semangat tata vasal lama, yaitu sebagai konsesi-konsesi murah hati yang bisa ditarik kembali dalam kasus "peri laku yang salah."

"Hukum internasional adalah salah satu alat untuk memecahkan masalah-masalah internasional. Kalau alat ini menguntungkan negeri kita dan perjuangan sosialis ... kita akan menggunakannya. Kalau alat ini tidak menguntungkan negeri kita dan perjuangan sosialis ... kita tidak akan menggunakannya. Dalam kasus ini kita akan menciptakan alat-alat lain untuk menggantinya."²

¹Kementerian Luar Negeri Pemerintah India, *Report of the Officials of the Government of India and the People's Republic of China in the Boundary Question* (New Delhi, Pebruari 1961), S. CR-31.

²Zhu Liru, "Rejection of Chen Tijiang's Absurd Theory with Regard to International Law," dalam *Renmin Ribao*, 18 September 1957.

Birma rupanya adalah contoh yang paling jelas bagaimana "Cina Baru" menginginkan agar hubungannya dengan "tanah-tanah luar" lama disusun. U Ne Win yang sejak tahun 1981 menarik diri dari politik sehari-hari ke garis kedua komando untuk "memberikan nasihat dan membimbing pemerintah" seluruhnya mengadakan tiga belas kali ziarah ke Cina. Sejak tahun 1977 frekuensi kunjungan itu meningkat secara menyolok. Geografi mendikte sikap Birma terhadap Cina. Sebaliknya pimpinan Cina menunjukkan sedikit kemurahan hati lamanya. Sekarang ini ia menerima kebijaksanaan Birma yang melihat ke dalam dan netral dan bahkan memberikan konsesi untuk mengurangi dukungannya untuk Partai Komunis Birma/Bendera Putih yang bersama gerakan-gerakan separatis lainnya seperti Uni Bo Mya. Bangsa Karen sejak lama berusaha menggulingkan Pemerintah Uni Birma. Bendera Putih yang merupakan Suara Rakyat Birma-nya sejak tahun 1977 menyiarkan pernyataan-pernyataan yang menyerukan percaya-diri waktu belakangan ini terpaksa menanam dan berdagang candu untuk mempertahankan kegiatan-kegiatannya.

Bulan Juli 1957, Zhou Enlai memberikan sambutan umum yang pertama mengenai soal perbatasan Cina-Birma dan relevansinya untuk seluruh hubungan.

"Soal perbatasan antara Cina dan Birma telah mempersulit latar belakang sejarah yang rumit. Dengan demikian evaluasi data-data sejarah merupakan suatu masalah penting sehubungan dengan soal ini ... Bila merundingkan soal-soal perbatasan rupanya perlu diambil suatu sikap yang cermat terhadap data-data sejarah. Suatu analisa dan evaluasi ilmiah akan memungkinkan orang membedakan data-data yang bisa menjadi suatu landasan yang dari segi hukum tidak dapat ditolak dan masuk akal dengan data-data yang akibat keadaan yang berbeda hanya mempunyai nilai informasi."¹

Sesudah U Ne Win mengambil alih kekuasaan pada bulan Oktober 1958, proses perundingan menjadi lebih cepat berkat adanya suasana rukuk yang menyeluruh dan pengakuan implisit Birma bahwa lingkup penyelesaian perbatasan mencakup lebih banyak daripada segi demarkasi formalnya (Perjanjian Persahabatan dan Non-Agresi). Bulan April 1961 misalnya, Pemerintah Birma setuju dalam rangka "kerja sama erat" dengan kegiatan-kegiatan melintasi perbatasan tentara Cina yang ditujukan pada sisa-sisa bandit-bandit Jiang "yang bersembunyi di daerah perbatasan Birma-Muangthai-Laos."² Sejak itu, kecuali pada tahun 1967,³ pemerintah Birma selalu berhati-hati untuk tidak menyimpang dari semangat "Pauk-Phaw" (hubungan darah).

¹Renmin Ribao, 10 Juli 1957.

²Renmin Ribao, 2 April 1961.

³Pada tahap "panas" Revolusi Kebudayaan awal 1967 fraksi-fraksi radikal PKC meningkatkan dukungan mereka untuk BCP/Bendera Putih di bawah Thakin Than Tun. Tidak lama kemudian dilancarkan demonstrasi-demonstrasi di Rangoon oleh Pengawal Merah Maois. Bahkan ter-

Tidak dapat disangkal bahwa Cina akan lebih senang menyusun hubungan-hubungan bilateral dengan negara-negara daratan Asia Tenggara sesuai dengan *contoh Birma*.

Peribahasa Cina sering memiliki keuntungan menyampaikan gambaran-gambaran yang sangat jelas. Salah satu di antaranya berbunyi: "Sementara serigala dihalau dari pintu depan, harimau masuk lewat pintu belakang." Pada dasarnya Cina mempunyai *tiga macam tuas* yang berbeda yang dapat digunakannya untuk mewujudkan sasaran-sasaran jangka panjangnya di Asia Tenggara dan menjadi "harimau": (1) tuas taktik keamanan "anti-hegemoni" Cina; (2) tuas gerakan-gerakan subversif komunis Cina; dan (3) tuas tuntutan Cina atas seluruh kawasan Laut Cina Selatan.

Tuas keamanan anti-hegemoninya sejauh ini dioperasikan oleh permainan bersama dua pendekatan taktis yang bisa disebut pendekatan ASEAN dan pendekatan negeri ke negeri. Keduanya dimaksud untuk menghasilkan *suatu konsensus pro-Cina* di antara negara-negara ASEAN. Rasionale yang dinyatakan untuk pertimbangan-pertimbangan keamanan Asia Tenggara-Cina, menurut Cina, bersumber pada "rencana Asia Tenggara megah" imperialisme sosial Soviet yang mengancam kemerdekaan semua negara yang bersangkutan. Untuk menggagalkan maksud Soviet itu, diperlukan - menurut Cina lagi - *koordinasi sikap keamanan ASEAN-Cina*. Salah satu dari banyak karangan *Bendera Merah* mengenai ancaman "strategi ekspansionis" global Uni Soviet terhadap kawasan Asia Tenggara menyebutkan unsur-unsur berikut.

Pertama, nilai strategi Asia Tenggara untuk Uni Soviet. Asia Tenggara dimaksud untuk menjadi salah satu penghubung vital jalur pelayaran yang akan dikuasai oleh Uni Soviet dari Laut Hitam lewat Laut Tengah, Laut Merah, Samudra Hindia dan Pasifik Barat Daya ke Laut Jepang. Penguasaan tempat-tempat sempit pada jalur ini seperti Selat Malaka akan memungkinkan Uni Soviet memisahkan armada-armada Pasifik dan Hindia AS satu sama lain, mengganggu garis-garis transpor ekonomi Jepang dan akhirnya membuat Asia Tenggara bergantung sama sekali pada Uni Soviet.

Kedua, nilai ekonomi Asia Tenggara untuk Uni Soviet. Sumber-sumber daya ekonomi akan menyusut. Untuk melaksanakan strategi imperialis sosial globalnya, pimpinan Soviet akan terpaksa menguasai daerah-daerah kaya sumber daya seperti Asia Tenggara.

jadi intervensi besar-besaran oleh wakil-wakil Kedutaan Besar Cina. Ketika pada gilirannya pemerintah Birma berhenti "mengendalikan amarah rakyat" terhadap penduduk keturunan Cina Birma, Cina mengancam akan melakukan intervensi militer dan mengumpulkan kekuatan besar sepanjang perbatasan kedua negara. Suasana panas itu segera mereda. Untuk beberapa waktu Cina kembali menyebut Pemerintah Birma "klik reaksioner Ne Win." Akan tetapi "delegitimisasi" itu hanya bersifat sementara.

Ketiga, Indocina dan khususnya Vietnam telah menyediakan *pangkalan-pangkalan bebas* es Cam Ranh dan Da Nang yang dibangun oleh AS untuk Uni Soviet. Pelabuhan Kamboja, Kompong Som cepat diubah menjadi pangkalan ketiga dari mana Uni Soviet akan mencoba menguasai seluruh Asia Tenggara.¹

Menurut laporan-laporan lebih lanjut Cina, pimpinan Soviet bersama "klik" pimpinan ketiga negara Indocina mengadakan pembicaraan-pembicaraan rahasia pada bulan September 1981 dalam rangka implementasi *suatu strategi Asia Tenggara baru yang akan memperlemah, memecah dan mengacaukan negara-negara Asia Tenggara* lewat usul-usul dialog seperti usul yang diajukan oleh sidang kelima konperensi menteri luar negeri Indocina yang diadakan di Vientiane pada bulan Pebruari 1982.

Konperensi ini mengeluarkan suatu komunike enam pasal yang pada pokoknya dimaksud untuk membujuk Muangthai. Komunike ini mengusulkan (seperti usul-usul sebelumnya) pembicaraan bersama - terbuka atau rahasia, langsung atau tidak langsung, bilateral atau multilateral-mengenai semua soal yang menyangkut kedua pihak. Unsur baru usul-usul ini ialah bahwa pembicaraan-pembicaraan itu tidak akan berarti pengakuan *de jure* atau *de facto* atas rezim Heng Samrin Republik Rakyat Kampuchea. Menurut ulasan-ulasan Cina tidaklah suatu kebetulan bahwa pada waktu yang sama Kepala Staf Umum Soviet Orgarkov dan kepala perencanaan ekonomi N.K. Baybakov melakukan "tur-tur inspeksi" lama ke Vietnam dan Indochina dalam rangka memperkuat "persahabatan besar dan solidaritas militan antara kedua bangsa dan tentara yang bersaudara." Kantor berita Cina *Xinhua* menamakan kejadian-kejadian bulan Pebruari 1982 itu suatu "diplomasi campuran meriam dan senyuman."² Yang lebih penting lagi, Muangthai sangat kritis terhadap usul Vietnam dan agak enggan untuk mempertimbangkannya secara serius. Soal yang tidak bisa dijawab ialah, apakah evaluasi kritis itu dicapai secara merdeka sama sekali dan bebas dari pengaruh luar atautakah sebagian akibat "garis keras" Cina.

Sejak awal 1970-an, Cina tak jemu-jemunya menyampaikan penilaian-penilaiannya mengenai trend-trend keamanan regional kepada negeri-negeri ASEAN dan *menedesakkan pandangan-pandangannya* atas mereka. Bahkan kalau evaluasi dan pandangan-pandangan ini ternyata tepat, perlu diingat bahwa semuanya itu disampaikan terutama untuk mempermudah pendekatan Cina terhadap kawasan Asia Tenggara. "Anti-hegemonisme" bukanlah suatu sasaran jangka panjang, melainkan suatu kebijaksanaan jangka menengah

¹*Hongqi*, (Bendera Merah), 1 Pebruari 1982.

²Kantor Berita *Xinhua*, 22 Pebruari 1982.

yang perlu akibat terbatasnya potensi kekuatan dan kemampuan militer ofensif Cina.¹ Dengan demikian ada risiko permanen bahwa Cina tidak akan puas dengan hanya mendukung dan memperkuat usaha-usaha keamanan ASEAN, tetapi akan berusaha secara aktif untuk mendesak pandangan-pandangan dan taktik-taktik yang lebih menguntungkan Cina daripada negeri-negeri Asia Tenggara. Risiko ini terbukti dalam konperensi mengenai Kamboja tahun 1981 yang disponsori PBB.²

Cina adalah satu-satunya aktor yang akan mendapatkan keuntungan-keuntungan politik besar dari suatu penyelesaian jangka panjang konflik Indocina. Selama negara-negara ASEAN merasa bahwa keamanan mereka terancam atau dirugikan oleh konflik sub-regional itu, kehadiran Cina dapat lebih mudah dipertahankan. Telah disebutkan di atas bahwa Cina menganut dua pendekatan terhadap Asia Tenggara, pendekatan ASEAN dan pendekatan dari negara ke negara. Pendekatan yang terakhir ini jelas terungkap dalam pengembangan hubungan Cina dengan Muangthai.

Secara tepat Cina melihat *Muangthai* sebagai "mata rantai lemah" ASEAN, yaitu negara yang secara mendesak memerlukan keamanan dan pandangan keamanannya paling cocok dengan kepentingan langsung Cina di Asia Tenggara. Kedua unsur kesadaran keamanan Muangthai yang sangat historis menguntungkan Cina. *Pertama*, elite politik Muangthai secara konsisten merasa membutuhkan suatu *pengaturan protektif dengan negara terbesar* yang terlibat di kawasan. Sejak abad ke-13 ketika kerajaan Sukhothai muda menjalin suatu hubungan vasal dengan imperium Cina Kubilai Khan, negara-negara silih berganti (Cina, Inggris, Perancis, Jepang, AS dan "?"), tetapi prinsipnya tetap konstan. *Kedua*, Muangthai selalu membutuhkan suatu *negara penyangga* terhadap saingan tradisionalnya Vietnam. Kedua negara ini bera-

¹Kelemahan komparatif Cina akan menentukan sikap Cina paling tidak untuk dua dasawarsa lagi. Pada tahun 1977-1978 pimpinan Cina mengadakan serangkaian enam konperensi mengenai soal-soal militer dengan maksud untuk memperkirakan biaya dan jangka waktu untuk modernisasi militer. Hasilnya pasti mengecewakan. Sejak itu Cina secara resmi menunda pembangunan militernya akibat kesulitan-kesulitan keuangan. Menurut perkiraan-perkiraan pendahuluan yang dibuat oleh Oskar Weggel dari Institut für Asienkunde Hamburg, pembangunan kekuatan militer ofensif Cina ke tingkat potensi Soviet di Asia (bukan global) akan memerlukan US\$ 200-250 milyar. Bahkan program modernisasi terbatas yang akan memungkinkan Cina beroperasi secara defensif di seberang perbatasan selatannya di daratan Asia Tenggara paling sedikit akan mencapai US\$ 70-90 milyar. Dari segi anggaran militer, program modernisasi itu akan menuntut agar anggaran sekarang ini dilipatgandakan sampai akhir abad ini, dan secara demikian melebihi seluruh volume investasi negara Cina dalam ekonomi nasional.

²Bulan Juni 1981 konperensi ASEAN di Manila mengusulkan proyek dua pokok melucuti persenjataan pasukan-pasukan perlawanan Kamboja termasuk Khmer Merah dan membentuk suatu pemerintah sementara di Kamboja. Cina dengan keras menentang proyek ASEAN ini dan akhirnya menggagalkannya dengan secara lihay memanfaatkan kekuatiran AS dan Muangthai bahwa suatu konperensi akan mengalami kegagalan.

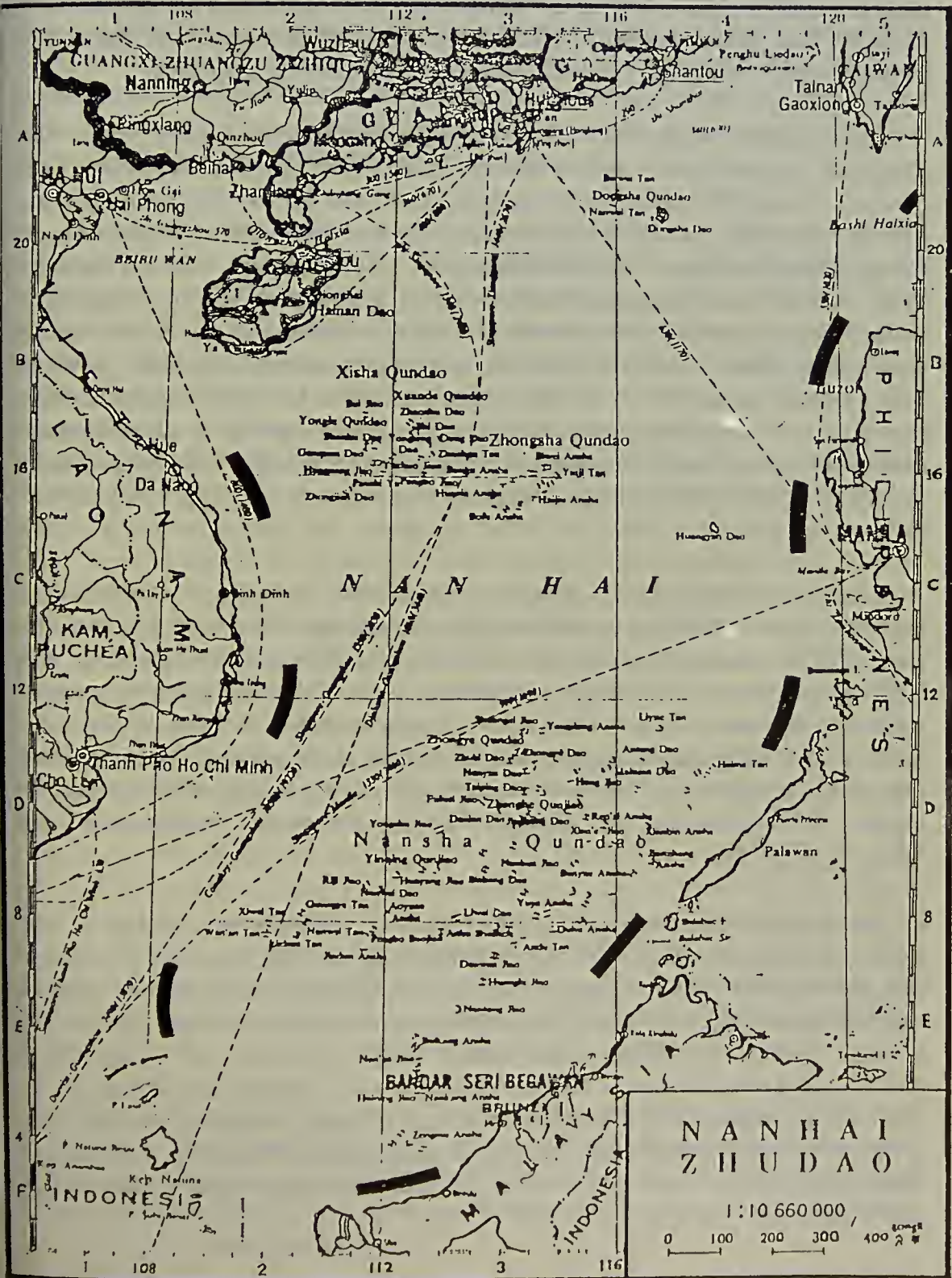
bad-abad lamanya bersaing untuk menguasai negara-negara yang lebih kecil di daratan Asia Tenggara. Kamboja adalah negara penyangga yang sejauh ini mencegah segala konfrontasi militer langsung antara kedua saingan besar itu. Maksud Cina untuk menegaskan kembali Kampuchea Demokratis rupanya selaras dengan psikologi negara penyangga Muangthai. Para pembuat kebijaksanaan Cina jelas telah membuat suatu analisa saksama mengenai latar belakang kebijaksanaan keamanan nasional Muangthai dan bagaimana mempengaruhi perspektif Muangthai mengenai Cina.¹

"Tuas subversif" yang didasarkan atas *metode ancaman dan rayuan* yang telah berabad-abad adalah tuas kedua yang dapat digunakan Cina terhadap Muangthai. Dukungan Cina untuk gerakan-gerakan komunis (hubungan dengan sesama partai komunis) tidak terbatas pada Muangthai. Di masa lampau dan kini hal itu adalah suatu gejala mencemaskan yang dialami semua negara ASEAN.² Akan tetapi sebagai akibat infrastruktur politik Muangthai yang relatif lemah dan letak geografisnya dekat Cina, negara Muangthai sungguh-sungguh terpaksa lebih memperhitungkan "ancaman subversi" Cina daripada lain-lain negara ASEAN. Secara lahiriah hubungan "anti-hegemoni" Muangthai dengan Cina sejak tahun 1972 seolah-olah menyebabkan sangat berkurangnya kegiatan Partai Komunis Muangthai di propinsi-propinsi Timur Laut. Akan tetapi ini mungkin bukan satu-satunya keterangan berkurangnya dampak subversif itu. Pertama, seperti disebutkan

¹Suatu survei pendapat umum yang diadakan oleh Departemen Hubungan Internasional Universitas Chulalongkorn, Bangkok, pada bulan Agustus-Oktober 1977 mengungkapkan suatu perbaikan luar biasa citra Cina di kalangan elite Muangthai (yang dibatasi sebagai "mereka yang berpengaruh politik") bila dibandingkan dengan sikap sebelumnya. Atas pertanyaan "Anda mengira Cina agresif atau pasifis?" 31% menjawab agresif, 45,2% biasa seperti negara lain mana pun, 17,5% pasifis dan 6,3% tidak tahu. Dan atas pertanyaan "Anda mengira Pemerintah Thai sekarang ini terlalu bersahabat atau bermusuhan terhadap Cina?" 3,9% menjawab terlalu bersahabat, 44,5% terlalu bermusuhan, 35,2% sikap yang tepat, dan 16,4% tidak tahu. (Lihat Institut Studi Asia, Universitas Chulalongkorn, *China in Thai Perspective*, Asian Studies Monographs, No. 027, April 1980.)

²Soal gerakan-gerakan gerilya yang didukung Cina adalah salah satu masalah pokok yang dibicarakan dalam kunjungan Deng Xiaoping dan Zhao Ziyang ke negeri-negeri ASEAN: Muangthai, Malaysia, Singapura dan Pilipina bulan Nopenber 1978 dan Agustus 1981 masing-masing. Kunjungan yang terakhir ini harus dilihat sehubungan dengan diplomasi perjalanan Zhao yang menyeluruh bulan Juni 1981 yang membawanya ke negara-negara Asia Selatan: Pakistan, Nepal dan Bangladesh. Dalam kunjungan-kunjungan ini pembicaraan antara pemimpin-pemimpin Cina dan Pemerintah Malaysia rupanya tidak terlalu berhasil. Datuk Hussein Onn maupun Mahathir Mohammad tidak menerima pembedaan dibuat-buat antara pertukaran pemerintah dengan pemerintah dan Partai dengan Partai yang menjurus pada pernyataan-pernyataan berlawanan seperti "Kami mendukung perjuangan partai-partai saudara kami di negeri-negeri asing, tetapi ini tidak mencampuri pertukaran bersahabat dengan pemerintah dan rakyat negeri-negeri itu ... Kami pasti tidak akan mencampuri urusan intern negeri-negeri itu untuk mendukung partai saudara kami di situ."

CHINESE TERRITORIAL CLAIMS IN THE SOUTH CHINA SEA



Source: Zhonghua Renmin Gongheguo Fen Sheng Dituji, Beijing 1977.

di atas, PKM kemungkinan besar digunakan untuk mempertahankan logistik bagi jaringan gerilya anti-Vietnam yang dibangun di Indocina dengan bantuan Cina. Di lain pihak, pecahnya PKM menjadi fraksi pro-Cina dan fraksi pro-Vietnam yang saling bermusuhan pasti memperlemah gerakan itu.

Tuas jangka panjang Cina yang paling penting atas percaturan politik Asia Tenggara adalah *klaim maksimumnya atas Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan*. Kalau RRC mampu menegakkan klaimnya itu, ia akan mampu mempunyai suatu laut patrimonial tertutup yang membentang ke selatan sampai Cengmu Reef di Lepas Pantai Kalimantan. Negara-negara ASEAN yang sebagai akibat "ketergantungan pada perdagangan luar negeri, ketergantungan pada perhubungan laut, atau keadaan ekologi tanah-tanah pertanian mereka yang paling subur ... mempunyai pemusatan-pemusatan penduduk, investasi dalam prasarana sosial dan ekonomi, dan akumulasi kekayaan atas atau dekat pantai mereka yang berpusat pada ibukota-ibukota pantai atau pelabuhan-pelabuhan besar,"¹ akan merasa terpaksa menyetujui suatu kerangka regional di bawah Cina untuk menjamin kelangsungan hidup ekonomi nasional mereka.

Klaim Cina atas Laut Cina Selatan *didasarkan pada klaim atas beberapa kelompok pulau kecil* yang tersebar di kawasan itu. Kelompok pulau utara, yang disebut pulau-pulau Xinsha atau Paracel, diduduki secara militer oleh Cina sejak Januari 1974 ketika pasukan-pasukan Vietnam Selatan bertempur melawan pasukan-pasukan Cina dan terpaksa mundur. Kelompok pulau selatan, yang disebut pulau-pulau Nansha atau Spratley, sebagian diduduki oleh pasukan Vietnam sejak April 1975, sebagian oleh pasukan Pilipina dan sebagian oleh suatu garnisun marine Taiwan yang secara implisit dianggap "Cina" oleh RRC.

Klaim-klaim pemilikan pihak-pihak yang berlawanan itu didasarkan atas *argumen-argumen historis*. Dalam argumentasinya Cina menekankan pengaruh historis awal Cina di Laut Cina Selatan dan kenyataan bahwa laporan catatan-catatan sejarah Cina menyebutkan pulau-pulau Xinsha dan Nansha sebagai bagian imperium Cina paling tidak sejak dinasti Song Utara (960-1127). Lain-lain klaim historis rupanya tidak mempunyai dukungan sekuat itu, sekalipun hanya karena historiografi Cina jauh lebih banyak. Pilipina yang menduduki bagian Spratley pada tahun 1971-1972 menyatakan pulau-pulau itu *res nullius* dan secara demikian dapat diklaim oleh bangsa mana pun.

¹Lim Joo-Jock, *Geo-Strategy and the South China Sea Basin* (Singapore University Press, 1979), hal. 2.

Klaim-klaim yang berlawanan atas pulau-pulau itu sendiri kemungkinan besar akan dicatat sebagai insiden-insiden kecil kalau tiada *perebutan sumber daya maritim yang intensif secara internasional* dan tiada sidang-sidang Konferensi Hukum Laut PBB baru-baru ini. Pulau-pulau itu bukan saja akan sangat bernilai sebagai pangkalan eksploitasi di masa mendatang, melainkan lebih penting lagi akan menjadi dalih untuk mengklaim laut sekitarnya dan untuk membatasi laut wilayah dan zone ekonomi.

Klaim Cina atas wilayah maritim Laut Cina Selatan secara teoretis berlawanan dengan dirinya sendiri bila dibandingkan dengan klaimnya atas pulau-pulau kecil Tiaoyutai di landas kontinen Asia Timur. Dalam kasus Tiaoyutai ini Cina mempertahankan klaimnya berdasarkan *asas perluasan alamiah*. Pada waktu yang sama dalam kasus pulau-pulau Laut Cina Selatan RRC mempertahankan bahwa asas kepulauan mempunyai prioritas atas konsep landas kontinen yang bisa ditegakkan oleh negara-negara Asia Tenggara terlepas dari pemilikan pulau-pulau itu sendiri. Posisi-posisi Cina yang berlainan mengenai kedua soal itu membawa pada kesimpulan bahwa argumen-argumen hukum laut yang digunakan oleh RRC dan pihak-pihak lain tidak akan cocok untuk mencapai suatu situasi yang menyelesaikan konflik. Bahkan kalau klaim Cina atas pemilikan pulau-pulau itu sah secara historis, kedaulatan teritorial atas pulau-pulau itu tidak mengandung klaim mana pun atas perairan sekitarnya seperti dilukiskan dalam *peta-peta resmi Cina*. Namun Cina merasa berhak untuk membatasi "kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi dan keamanan nasionalnya." Suatu pengaturan sumber daya eksklusif atas landas kontinen Asia Timur dan Laut Cina Selatan jelas akan memperluas basis ekonomi Cina dan pada waktu yang sama memperkuat kemampuan negara itu untuk melakukan penguasaan politik sebagai negara regional yang terkemuka. Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu dari beberapa laut tertutup yang vital bagi semua negara besar. Dengan demikian kelompok-kelompok pulau Laut Cina Selatan, khususnya Kepulauan Nansha/Spratley ternyata sangat bernilai. RRC bukan saja akan mampu menguasai gerak-gerak angkatan laut yang merugikan keamanan nasional dan kedudukan regionalnya, tetapi juga akan mampu sedikit banyak menguasai garis-garis perhubungan internasional ke dan dari Asia Tenggara.

Sikap tak mengenal kompromi Cina, tiadanya kesediaan sama sekali untuk menerima tawaran suatu penyelesaian yang dirundingkan, kesediaannya untuk menggunakan sarana-sarana militer dan lain-lain unsur mengisyaratkan bahwa RRC bertekad untuk akhirnya menempatkan kawasan Laut Cina Selatan di bawah kekuasaannya.

RRC dan Masyarakat Eropa: Hubungan Politik dan Ekonomi*

Erhard LOUVEN

PENDAHULUAN

Republik Rakyat Cina (RRC) dan Eropa Barat digambarkan beberapa politisi di Cina maupun di Eropa Barat sebagai "sekutu-sekutu obyektif."¹ Pers Cina memuji Masyarakat Eropa (ME) dengan diterimanya Yunani sebagai negara anggota kesepuluh, berkurangnya ketergantungan Masyarakat Eropa pada Amerika Serikat, dan diteruskannya embargo gandum terhadap Uni Soviet.² Cina menyambut baik bantuan ME berupa pengiriman gandum ke propinsi-propinsi Cina Hebei dan Hubei yang ditimpa bencana alam dan pemberian cuma-cuma 2 ribu ton susu bubuk dan 8 ribu ton "rape-oil" yang bernilai sekitar US\$ 6,24 juta.³

Namun negara-negara Eropa Barat anggota ME menurun semangatnya. Harapan akan suatu peningkatan perdagangan luar negeri yang pesat sehubungan dengan strategi pembangunan baru Cina yang bersifat terbuka tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan perekonomian Cina memaksa pemimpin-pemimpin Cina untuk memusatkan rencana perekonomiannya serta mengurangi anggaran buat investasi dalam produk-produk modal (capita products).

*Terjemahan makalah Erhard LOUVEN, "The People's Republic of China and the European Community: Political and Economic Relations," yang disampaikan pada Konferensi Indonesia-Jerman yang diselenggarakan oleh CSIS (Jakarta), dan Institut für Asienkunde (Hamburg) di Sanur, Bali, 5-7 Juli, 1982. Diterjemahkan oleh Ronald NANGOI.

¹Lihat Peter J. Opitz (ed.), *China zwischen Weltrevolution und Realpolitik. Ursache und Internationale Konsequenzen der Amerikanisch-Chinesischen Annäherung* (München, 1979), hal. 80 f.

²Lihat XNA (Sinhua News Agency), 20 Maret 1981.

³Lihat XNA, 18 Maret 1981.

Maka para industrialis Eropa Barat sebagai calon-calon penyalur produk-produk tersebut mengalami kekecewaan dan meninjau kembali kemungkinan-kemungkinan mereka di masa mendatang dalam rangka kedudukan Cina yang berkaitan dengan hubungan luar dan pengaruh perkembangan dalam negeri Cina terhadap perdagangan luar negerinya.

HUBUNGAN POLITIK

Ringkasan Sejarah Hubungan

Setelah Masyarakat Eropa dibentuk pada 1957, Cina agak menentang organisasi yang baru ini seperti terungkap dalam banyak ulasan. Tetapi sikap ini berubah setelah berakhirnya persekutuan Cina-Soviet. Pada bagian akhir 1960-an Cina menganut suatu siasat baru dengan memberi hati kepada ME. Dalam bulan Mei 1973 PM Chou Enlai menyatakan keinginan Cina untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan ME. Kemudian perundingan-perundingan mulai menjajaki kemungkinan-kemungkinan menjalin hubungan secara formal. Ini adalah suatu tindakan yang masuk akal karena sejak awal 1973 ME mengambil alih kompetensi untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip dan arah umum kebijakan perdagangannya; tetapi masing-masing negara anggota mempertahankan haknya untuk mengadakan perjanjian bilateral dengan RRC. Pada tanggal 4 April 1975, Komisi ME menyatakan bahwa Masyarakat Eropa tidak mempunyai hubungan resmi dan tidak akan mengadakan perjanjian dengan Taiwan.¹ Maka terbuka jalan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara ME dan RRC dalam bulan September 1975. Sebelumnya semua negara anggota, kecuali Irlandia, telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Cina (Tabel 2).

Selama periode 1975-1976 bertautan dengan pertarungan untuk menggantikan Ketua Mao, hubungan-hubungan itu terhenti. Dalam bulan Pebruari 1977, setelah konsolidasi pimpinan baru di bawah Hua Guofeng, Beijing mengisyratkan maksudnya untuk mengadakan pembicaraan lagi dengan ME mengenai diadakannya suatu perjanjian perdagangan. Perjanjian ini ditandatangani pada 3 April 1978 dan akan dibahas secara lebih terperinci di bawah ini.

Sikap Eropa terhadap RRC

Pada 1978 perdagangan dengan RRC hanya mencapai 0,34% dari seluruh perdagangan ME. Dengan persyaratan yang lunak, persentase ini bisa me-

¹Lihat Gerard Hervonnet, "La Chine et La CEE: Le Sens D'un Rapprochement Prémédité," dalam *Journal of European Integration*, Vol. 1, No. 1 (September 1977), hal. 81 f.

tingkat menjadi 2,3% pada 1985.¹ Namun bahkan hasil semacam itu dianggap tidak penting oleh negara-negara Eropa Barat. Maka pertimbangan-pertimbangan politik tampil untuk memainkan peranan yang dominan dalam maksud praktis hubungan mereka. Karena peringatan Uni Soviet, negara-negara Eropa Barat akan sangat berhati-hati dalam pengiriman senjata ke Cina. Dalam hal ini, kedudukan negara-negara Eropa Barat sama dengan Jepang. Kerja sama yang erat di bidang teknologi militer pasti akan merugikan hubungan Jepang-Rusia.

Sikap Cina terhadap ME

Kebijakan luar negeri Cina berdasarkan "teori tiga dunia." Dunia pertama terdiri atas kedua negara superpower yang hegemonistik Uni Soviet dan Amerika Serikat. Cina termasuk Dunia Ketiga negara-negara berkembang. Negara-negara Dunia Kedua -- negara-negara Eropa, Jepang, Kanada, dan lain-lain -- setidak-tidaknya bisa menjadi sekutu-sekutu sementara negara-negara Dunia Ketiga dalam menghadapi kekuatan-kekuatan hegemonistik itu. Teori yang sederhana itu waktu belakangan ini mengalami diferensiasi setidak-tidaknya untuk sebagian sehubungan dengan peranan Eropa Barat.

Dalam pandangan pemimpin-pemimpin Cina, Eropa Barat terancam secara khusus karena kawasan ini bisa menjadi medan utama konflik hegemonistik negara-negara superpower dan sasaran utama kebijakan ekspansi Soviet. Di mata mereka, ini disebabkan oleh kedudukan ekonomi Eropa Barat yang kuat. "Apabila Uni Soviet ingin menguasai dunia, ia pertama-tama harus menguasai Eropa Barat. Modal, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi modern -- dilihat secara global -- relatif terpusat dan berkembang di Eropa Barat. Barang siapa menguasai Eropa Barat dapat menggunakan sumber-sumber daya manusia, material, dan keuangannya untuk melakukan suatu perang dunia."²

Diferensiasi penilaian itu diajukan oleh Guo Fengming, Wakil Direktur *Institute for International Studies* di Beijing. Pemikiran utama artikelnya adalah sebagai berikut:³ Eropa Barat berusaha menjadi kekuatan politik yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada Amerika Serikat. Proses ini tidak hanya bergantung pada perubahan-perubahan dalam perimbangan kekuatan inter-

¹ Menurut perkiraan Endymion Wilkinson, "China and the International Community," dalam *Dialogue*, No. 2 (Summer 1979), hal. 210.

² Lihat *Renmin Ribao*, 21 Desember 1978.

³ Pertama-tama diterbitkan di *Guoji Wenti Yanjiu* (International Studies, Beijing), 1981, No. (Oktober); terjemahan Inggris yang diringkaskan di *Beijing Review*, Vol. 25, No. 4 dan 5, 25 Januari dan 1 Februari 1982, masing-masing hal. 21-25 dan 9-12.

nasional di masa mendatang, tetapi juga dan terutama pada perkembangan di Eropa Barat dan Timur Tengah. Oleh sebab itu proses ini akan memakan waktu yang lama dan rumit. Alasan utama tuntutan Eropa Barat untuk melepaskan diri dari Amerika Serikat adalah persyaratan-persyaratan dalam bidang moneter dan militer yang bertentangan dengan Aliansi Atlantik. Sebagai kesimpulan, hubungan Amerika-Eropa akan menjadi sangat tidak stabil di masa mendatang. Eropa Barat akan mendesak Amerika Serikat untuk menyusun kembali aliansi itu dalam rangka mencapai kemerdekaan negara-negara Eropa Barat yang lebih besar. Menurut Guo, kemerdekaan penuh negara-negara Eropa Barat dari Amerika Serikat dianggap Cina sebagai pilihan yang paling tepat bagi mereka. Tetapi beberapa faktor menghalangi negara-negara ini mencapai tujuan itu, yakni pertama dan terutama ketidakharmonisan antara negara-negara Eropa Barat akibat kesulitan-kesulitan ekonomi dan akibat kedudukan ekonomi Republik Federasi Jerman yang relatif kuat maupun kedudukan geopolitisnya yang khusus.

Terlepas dari kekuatan produksi ekonomi negara-negara ME dan keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi yang intensif dengan mereka, keterlibatan Eropa Barat secara memadai dalam perdagangan luar negeri Cina merupakan kepentingan Beijing, juga karena alasan-alasan yang lebih tinggi.¹ Pertama, Beijing harus menegakkan negara-negara Eropa Barat merasa didiskriminasikan dan memusatkan perhatian ekonominya pada kawasan Comecon secara lebih luas. Kedua, keterlibatan negara-negara Eropa Barat yang nyata memperkuat kedudukan tawar-menawar (bargaining position) pemimpin-pemimpin Cina terhadap partner-partner dagang mereka Amerika dan Jepang. Melalui kerja sama dengan Eropa Barat akan tercapai ketidaktergantungan ekonomi khususnya pada Amerika Serikat.

HUBUNGAN EKONOMI

Perjanjian-perjanjian Tingkat Negara

Seperti dikemukakan sebelumnya, RRC dan ME menjalin hubungan diplomatik dalam bulan September 1975. Pada tahun 1973 ME telah mengambil wewenang dalam soal-soal perdagangan luar negeri masing-masing negara anggota. Tetapi negara-negara yang mempunyai perencanaan terpusat dibebaskan dari peraturan ini; sampai tahun 1975 seperti sebelum 1973 mereka bisa melakukan negosiasi dengan negara-negara anggotanya. Namun sejak

¹Lihat Peter J. Opitz, "Westeuropa und China: Eine Bilanz nach dem Besuch Huo Jiefeng," dalam *Europa-Archiv*, Folge 4/1980, hal. 126.

1975 tidak ada suatu perjanjian, khususnya dengan Uni Soviet dan negara-negara Comecon yang lain. Yugoslavia -- anggota Comecon sejak 1964 -- mengakui wewenang ME yang baru itu. Melalui hubungan diplomatik, RRC menerima keadaan baru ini dan memanfaatkannya.

Pengakuan resmi ME oleh RRC selanjutnya diwujudkan dalam perjanjian perdagangan yang ditandatangani pada 3 April 1978. Dari sudut pandangan ME, perjanjian ini merupakan suatu persetujuan "non-preferential," dan tidak menentukan tarif "preferential" khusus. Tetapi perjanjian ini menjamin penghapusan progresif pembatasan-pembatasan kuantitatif perdagangan. Salah satu contoh adalah perjanjian tekstil antara RRC dan ME, yang ditandatangani dalam bulan Juli 1979 dan mulai berlaku secara surut pada 1 Januari 1979. Perjanjian ini menetapkan peningkatan ekspor tekstil Cina ke ME dari 20.435 ton menjadi 40.412 ton pada 1979. Peningkatan per tahun selanjutnya juga ditetapkan.

Karena rangkaian khusus barang ekspor Cina dan sistem perdagangan luar negerinya yang diatur dari pusat, perjanjian perdagangan itu memuat dua ketentuan protektif yang menguntungkan ME. Pasal 3, kalimat 2 menetapkan bahwa "dalam suatu perkembangan yang jelas tidak berimbang," bisa diambil tindakan untuk memperbaiki situasinya. Pasal 7 adalah suatu ketentuan mengenai harga yang menetapkan bahwa pertukaran barang dan jasa hendaknya dilakukan atas dasar "harga pasar riil dan tarif pengangkutan riil."

Uni Soviet menanggapi perjanjian itu dengan kata-kata propaganda yang keras seperti biasanya. Perjanjian itu diarahkan, melampaui kerangka komersialnya, pada suatu tujuan politik tertentu; sesuai dengan sikap anti-Soviet Beijing yang militant, perjanjian tersebut mempermudah akses ke pasarnya persenjataan Barat untuk memodernisasi kekuatan militer Cina, dan secara demikian merupakan usaha lain untuk merusak peredaan ketegangan (detente) internasional dengan bantuan "Eropa kecil."

ME tentu akan bersikap hati-hati terhadap suplai persenjataan ke RRC. Tetapi berkenaan dengan daftar bersama yang menetapkan kuota, perjanjian ini di masa mendatang dapat mengarah pada suatu perlakuan yang berbeda terhadap negara-negara Comecon dan RRC,¹ dengan keuntungan untuk Cina.

Perdagangan Luar Negeri

Pada akhir 1950-an dimulai apa yang disebut perdagangan luar negeri "segitiga" Cina. Negara-negara berkembang di Asia Tenggara dan kawasan lainnya menjadi sumber penting valuta asing (foreign exchange) ya

¹Lihat Reinhardt Rummel, "Die Fixierung Chinas auf Westeuropa," dalam *Aussenpolitik* Vol. 29, 1978, hal. 277.

digunakan untuk membayar impor dari negara-negara industri. Volume besar perdagangan timbal-balik ditangani oleh Hongkong. Secara demikian misalnya pada tahun 1960-an terdapat surplus impor US\$ 156 juta dalam perdagangan timbal-balik dengan negara-negara industri Barat. Surplus impor ini diimbangi oleh suatu surplus ekspor US\$ 165 juta dalam perdagangan dengan negara-negara berkembang dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pola segitiga itu dapat dilihat sampai sekarang. Pada 1980 perbandingan antara surplus impor dengan negara-negara industri Barat dan surplus ekspor dengan negara-negara berkembang adalah 6.220 : 5.020 dollar AS.

Ciri perdagangan luar negeri Cina lainnya adalah berubahnya kedudukan negara-negara sosialis. Pada 1954 perdagangan timbal-balik Cina dengan negara-negara sosialis mencapai maksimum dalam arti relatif, yakni 76%. Pada 1965 negara-negara industri Barat dengan suatu bagian perdagangan bersama timbal-balik sebesar 36,9% melampaui negara-negara sosialis yang bagiannya hanya mencapai 32,1%. Perkembangan ini berlangsung terus dan pada 1980 negara-negara industri Barat mempunyai kedudukan dominan dalam perdagangan Cina dengan bagian sebesar 60,2%. Negara-negara sosialis dengan hanya 10,6% pada 1980 mengalami kemunduran.

Jepang dan Amerika Serikat merupakan partner-partner dagang RRC yang paling besar. Negara-negara Eropa Barat menduduki *ranking* ketiga. Bagian ME dalam perdagangan timbal-balik dengan Cina itu adalah sekitar 35% baik impor dari maupun ekspor ke Cina. Partner dagang Cina yang paling besar di kalangan negara-negara Eropa adalah Republik Federasi Jerman. Ekspor Jerman ke Cina adalah sekitar 50% dari seluruh ekspor ME ke Cina dalam periode 1976-1981. Impor Jerman selama periode ini hanya mencapai kurang dari 30%. Ketidakseimbangan ekspor dan impor itu telah menunjukkan ciri struktural perdagangan.

Strategi pembangunan Cina sejak 1978 dapat dilukiskan dengan singkat sebagai berdasarkan pertanian, berorientasi teknologi, dan berpandangan ke luar. Mengenai program perdagangan luar negerinya dapat disebutkan ciri-ciri berikut:

- penekanan pada impor yang mendukung ekspor
- substitusi tenaga kerja untuk modal
- menukarkan minyak dan lain-lain mineral dengan teknologi
- sikap yang lunak terhadap kredit luar negeri
- mempelajari teknik-teknik pemasaran modern
- minat besar akan peralatan dan teknologi militer dari luar negeri.

Setelah masa senjang pada 1960-an, impor Cina terutama terdiri atas sarana-sarana produksi, yakni sekitar 80%. (Tabel 8). Kecuali beberapa ke-

macetan dengan sarana penghidupan, khususnya gandum, impor ditujukan untuk mengadakan modernisasi industri serta pertanian dan meningkatkan alat-alat produksi. Tujuan inilah yang mengarah pada persyaratan yang menguntungkan bagi ekspor negara-negara industri Barat dengan RRC.

Angka-angka "sarana produksi" (dalam Tabel 8) meliputi beberapa jenis impor bahan mentah untuk industri tekstil. Bahan-bahan ini diolah dan diekspor; pabrik-pabrik yang mengutamakan tenaga kerja itu mudah mendapatkan pasaran karena daya saing berkat tenaga kerja Cina yang relatif murah. "Kawanan Empat" pada 1977 mengecam kelompok Deng karena mengeksport tenaga kerja dalam bentuk barang-barang pabrik.¹ Tetapi metoda penggunaan faktor-faktor produksi di mana orang memiliki keuntungan komparatif (*comparative advantage*) -- yakni tenaga kerja -- adalah suatu tindakan yang rasional mengingat tahap pembangunan Cina dewasa ini. Namun strategi ekspor ini, apabila terus berlangsung tanpa pengawasan dan semakin meningkat, akan mendatangkan kesulitan-kesulitan dan tindakan-tindakan proteksi di pihak negara-negara industri yang harus melindungi industri mereka sendiri terhadap impor dengan kadar tenaga kerja murah yang relatif tinggi. Ketentuan proteksi pasal 3 perjanjian perdagangan antara ME dan RRC merupakan sarana hukum untuk mengawasi ekspor seperti itu.

Perincian ekspor Cina menunjukkan bahwa sekitar 50% terdiri atas produk industri dan mineral. Minyak mentah khususnya adalah suatu item ekspor yang harus menghasilkan valuta asing yang sangat dibutuhkan. Dewasa ini sekitar 10% dari seluruh produksi minyak sekitar 100 juta ton per tahun diekspor. Sebagian terbesar minyak ini adalah minyak daratan (*onshore-oil*). produksi sektor ini akan mengalami stagnasi karena ladang-ladang minyak utamanya akan habis secara progresif. Setelah pekerjaan pencarian dan eksplorasi beberapa tahun terakhir ini, perusahaan-perusahaan minyak internasional yang terlibat menemukan cukup bukti sehingga tahu dengan pasti bahwa terdapat cadangan minyak yang besar di area lepas pantai Cina -- Teluk Bohai, Laut Kuning, dan Laut Cina Selatan.² Perusahaan-perusahaan minyak itu antara lain adalah kedua perusahaan Perancis *Elf Aquitaine* dan *CFP Total* serta *British Petroleum*. Melalui produksi minyak dari area lepas pantai jumlah ekspor Cina bisa dinaikkan menjadi sekitar 20 juta ton pada tahun 1987 dan sekitar 40 hingga 45 juta ton pada tahun 1992. Apabila perkiraan itu terbukti benar, perusahaan-perusahaan minyak Eropa bisa memperoleh keuntungan ganda: pertama, mereka bisa memperoleh supla minyak mentah Cina, dan kedua, mereka bisa menjadi calon-calon penyalu alat-alat produksi dan pengolahan minyak.

¹Lihat *Renmin Ribao*, 13 Nopember 1977.

²Lihat juga Erhard Louven, "Zur Rolle des Offshore-Öls in der Chinesischen Energiepolitik," dalam *China Aktuell*, Hamburg, Pebruari 1982, hal. 92-96.

Mengenai hutang luar negeri, RRC telah bersikap lebih lunak daripada sebelumnya, tetapi berhati-hati. Hutang Cina pada akhir 1980 berjumlah sekitar US\$ 3,4 milyar atau 17% penerimaan valuta asing per tahun.¹ Pembayaran kembali hutang (debt servicing) -- sekitar US\$ 1,5 milyar untuk pembayaran pokok dan bunganya pada 1980 -- tidak begitu memberatkan neraca pembayarannya. Cina memanfaatkan tawaran kredit sekitar US\$ 24 milyar secara hemat. Hanya sekitar US\$ 5,5 milyar telah ditarik sejauh ini karena pemerintah Cina menganggap persyaratan kebanyakan kredit komersial tidak menguntungkan. Sejak menjadi anggota IMF (International Monetary Fund) pada 1980, RRC dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas organisasi itu dan telah memperoleh pinjaman sebesar US\$ 1,1 milyar.

Perdagangan Luar Negeri Cina sebagai Fungsi Strategi Pembangunan Dalam Negeri

Perdagangan luar negeri Cina merupakan suatu fungsi kebijakan pembangunan dalam negerinya yang menyeluruh. Maka laju pertumbuhan perdagangan dan komposisi partner-partner dagang luar negeri bergantung pada strategi pembangunan konkrit yang dianutnya. Dalam kerangka strategi modernisasi dewasa ini yang berusaha mengejar standar dunia secepat mungkin, pemimpin-pemimpin Cina harus memusatkan perhatian pada dua faktor penghambat ekonomi Cina: modal dan teknologi.

Tugas utama perdagangan luar negeri Cina adalah menunjang akumulasi modal. Oleh sebab itu Cina berusaha menggunakan, di samping perdagangan luar negeri klasik, bentuk-bentuk kerja sama ekonomi lainnya seperti proyek-proyek produksi patungan, usaha patungan (joint equity venture), perdagangan kompensasi (compensation trade), perjanjian pengolahan dan pemanfaatan. Menurut Feng Tienshun, Direktur Biro Penanaman Modal Asing Komisi Penanaman Modal Asing, pada 1981 penanaman modal asing mencapai US\$ 1,22 milyar.² Sebagian besar jumlah itu ditanamkan -- dalam bentuk proyek-proyek produksi patungan -- di keempat Zona Ekonomi Khusus di kotamadya Guangzhou dan Fujian. Pada 1981, 127 proyek produksi patungan disetujui (penanaman modal asing semacam itu hanya berjumlah US\$ 300 juta pada 1980). Dalam proyek-proyek ini, partner asing biasanya menyediakan seluruh modal, peralatan dan teknologi, sementara pihak Cina menyediakan tanah, bangunan pabrik dan tenaga kerja.

¹Lihat "China's Place in World Trade," dalam *The OECD Observer*, No. 114, Januari 1982, hal. 11.

²Lihat *China Aktuell*, Hamburg, Januari 1982, hal. 8.

Angka-angka berikut diberikan untuk lain-lain bentuk kerja sama ekonomi:¹

	1980	1981
<i>Usaha patungan (joint equity venture)</i>		
- Jumlah proyek	20	19
- Jumlah modal asing (US\$)	177 juta	20 juta
<i>Perdagangan kompensasi (compensation trade)</i>		
- Jumlah modal asing (US\$)	100 juta	menurun
<i>Bisnis pengolahan</i>		
- Pemasukan (US\$)	112 juta	180 juta

Perincian angka-angka ini tidak diberikan oleh partner asing. Tetapi negara-negara Eropa Barat, terutama negara-negara ME, karena standar industrinya yang tinggi, memainkan peranan penting dalam transaksi-transaksi bisnis itu.

Teknologi seperti medali bersisi-dua; di samping sisi perangkat keras (hardware-side) yang berwujud mesin dan instalasi, terdapat sisi perangkat lunak (software-side) -- pengetahuan metoda-metoda pengolahan dan manajemen. Khususnya sisi perangkat lunak inilah yang tampil dalam alih teknologi dari negara-negara ME ke RRC.² Sejumlah besar mahasiswa dan ahli Cina dilatih -- baik di Cina maupun di luar negeri -- oleh lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan industri negara-negara ME. Di Republik Federasi Jerman saja, jumlah mahasiswa baik di bidang akademis maupun di bidang industri dan administrasi diperkirakan sebesar 3 ribu sejak 1977.

PENUTUP

Masing-masing negara atau kelompok negara hanya dapat menjadi "se-kutu obyektif" negara-negara lain kalau kepentingan-kepentingan obyektif kedua belah pihak cukup terjamin. Dalam dunia politik, negara-negara Eropa Barat terpaksa mengambil sikap yang berbeda daripada Cina terhadap Uni Soviet.

¹Lihat *ibidem*.

²Lihat Tabel 1.

Mengenai ekonomi, negara-negara Eropa Barat dianggap Cina sebagai kekuatan tandingan terhadap dominasi kekuatan-kekuatan ekonomi Jepang dan Amerika Serikat. Melihat angka-angka perdagangan aktual, Cina memainkan peranan yang tidak berarti dalam hubungan ekonomi dunia negara-negara ME. Pasaran Cina yang "besar" -- yang sering disanjung -- senantiasa ternyata kecil dan sulit.

Perdagangan luar negeri klasik dan lain-lain bentuk kerja sama ekonomi internasional Cina secara fungsional berkaitan dengan pembangunan dalam negerinya. Diharapkan bahwa strategi modernisasi RRC dewasa ini akan dilanjutkan dan Cina akan bekerja sama secara damai dalam perdagangan dan pembangunan internasional.

Table 1

CHRONOLOGY OF CHINA'S AGREEMENT WITH EC COUNTRIES

Date	Country	Subject of Agreement
<i>1975</i>		
September	France	Agreement on maritime navigation
October	Federal Republic of Germany	Agreement on maritime navigation and on eliminating double taxation of shipping
		Agreement on civil aviation transport
		Agreement on establishing a joint committee for promoting economic relations
<i>1977</i>		
April	Federal Republic of Germany	Agreement on technical cooperation in technical survey of ships
December	United Kingdom	Agreement on technical cooperation in technical survey of ships
<i>1978</i>		
January	France	Agreement on science and technology
February	European Community	Initiating of China-EC trade agreement
April	European Community	China-EC trade agreement: Most-favoured-nation clause, but non-preferential, five-year term
August	France Federal Republic of Germany	Agreement on the utilization of the Symphonie System for experiments in communications transmission

September	France	Agreement with the Société Nationale de Télévision Française on the exchange of television reporters for news coverage, exchange of TV programs and the further development of cooperation
October	Italy	Agreement on technical cooperation in technical survey of ships Agreement on cultural exchange and on scientific and technical cooperation News cooperation agreement between Xinhua News Agency and the Agenzia Nazionale Stampa Associata of Italy
	Federal Republic of Germany	Agreement on cooperation in TV Agreement on scientific and technical cooperation
	France	Agreement on scientific cooperation between the Chinese Academy of Sciences and the French State Centre of Science and Research
November	United Kingdom	Agreement on scientific cooperation between the Chinese Academy of Sciences and the Royal Society of Britain Agreement on scientific and technical cooperation
November	Netherlands	Initiating of a civil aviation transport agreement
December	France	Agreement on the development of economic relations and cooperation: Term 1979-85, the total volume of trade is stipulated to reach 60,000 million Francs (roughly US\$15,000 million), lay-out of basic guidelines for cooperation in steel, electricity, mining research, hotel trade, port facilities, non-ferrous metals, railways and transport, vehicles, aeronautics industry, public works and oil exploration
	United Kingdom	Agreement between the Bank of China and UK banks on seven separate "deposit facilities" totalling US\$1,200 million
1979		
January	France	Scientific cooperation agreement on basic research between the Chinese Academy of Sciences and the French Atomic Energy Commission: Three-year term
	Netherlands	Agreement on civil aviation transport

March	United Kingdom	Agreement on economic cooperation: The agreement stipulates that a US\$5,000 million creditline be guaranteed by the British government, credit will be available to China for investment in capital construction
	Netherlands	Agreement on exchange of students and scholars
April	Italy	Agreement on economic cooperation
May	France	Credit agreement between the Bank of China and 18 French banks
	Italy	Agreement on scientific cooperation between the Chinese Academy of Sciences and the Italian National Research Committee
		Credit agreement under which Italy is stipulated to grant China credit up to US\$1,000 million
	Federal Republic of Germany	Agreement between the German Standardization Institute and the Chinese Association for Standardization
June	France	Minutes of Chinese-French talks concerning patent rights
June	Federal Republic of Germany	Agreement on cooperation in geological science and technology between the Chinese State Geological Bureau and the Ministry of Economy of the Federal Republic of Germany
		Protocol on scientific and technical cooperation between the Chinese Academy of Sciences and the Fraunhofer Gesellschaft for the advancement of research in the applied sciences
	Ireland	Communique on the establishment of diplomatic relations
	Belgium	Initiating of an agreement on the development of economic, industrial, and technical cooperation
	Luxembourg	
July	Federal Republic of Germany	Agreement on cooperation in geosciences and raw materials
	France	Agreement on standardization between the Chinese Bureau of Standards and the French Commission of Standardization
		Protocol on the establishment of a joint working committee on sports exchange
		Draft agreement for oil prospecting in two areas of the Gulf of Bohai between the associated companies CFP and ELF and the Chinese Oil

	European Community	Ministry Initiating of a textile agreement: Five-year term, coming into force retroactively on January 1, 1979
August	Italy	Agreement between the Chinese National Construction Company and the state-owned Italian Institute for Industrial Reconstruction under which Chinese labour will be made available for civil engineering projects abroad excepting the countries of the Soviet bloc
September	Denmark	Agreement on economic and technical cooperation
	Luxembourg	Agreements on cultural exchange and on regular aviation services for merchandise
October	France	Three documents on the development of economic relations, the opening of consulates and cultural exchange Protocol of the agreement on cooperation in tele-communication
	Federal Republic of Germany	Agreement on economic cooperation, not stipulating any intended volume Agreement on cultural exchange including the fields of sciences, education, arts, sports, news, broadcasting, television, film, book publishing, language training Agreement on the establishment of consulate-generals at Hamburg and Shanghai
October	Italy	Programme of cultural, scientific and technical cooperation for 1980-81
November	United Kingdom	Agreement on civil aviation transport
November	United Kingdom	Agreement on cooperation in the fields of education and culture Arrangement on scientific and technical railway cooperation
	Italy	Protocol on the establishment of consulate-generals at Milan and Shanghai Declaration of intent for cultural and scientific-technological cooperation
	Federal Republic of Germany	Agreement on cooperation in broadcasting and TV Protocols on scientific cooperation in the fields of raw-materials and energy
	Belgium	Agreements on the development of economic, industrial scientific and technical cooperation
	Luxembourg	

December	France	Agreement on scientific and technical cooperation in the geological sphere between the Ministry of Geology of China and the Secretariat of State for Research in France
	Italy	Agreement on the joint Chinese-Italian film "Marco Polo"
	Federal Republic of Germany	Agreement on agricultural cooperation (agricultural machinery for a farm in Ningxia)
<i>1980</i>		
April	Federal Republic of Germany	Agreement between the Chinese Aeronautical Establishment and the German Aerospace Establishment on technical cooperation in civil aeronautics
	Belgium	Agreement on providing interest-free government loans to China (300 million Belgian Francs in 1980)
May	United Kingdom	Scientific cooperation agreement for academic and personal exchange
	Italy	Protocol and cooperation programme for the peaceful uses of nuclear energy
	France	Agreement on cooperation in social sciences between the Chinese Academy of Social Sciences and the Italian National Research Committee
June	United Kingdom	Oil exploration contracts between the Petroleum Corporation of China and the Société Nationale Elf Aquitaine and Total
	Federal Republic of Germany	Cooperation agreement on radio and TV
July		Contract for technical cooperation between China National Technical Import Corporation and a syndicate represented by Schloemann-Siemag A.G.
	Federal Republic of Germany	Agreement on mutual provisions of navigational, communications, meteorological and other technical services
	France	Industrial cooperation agreement amounting to about US\$97.5 million for the construction of Dauphin helicopters in China
September	United Kingdom	Memorandum on cooperation in meteorology
	Italy	Agreement on development of business cooperation between the China International Trust and Investment Cor-

		poration and the Banca Commerciale Italiana
	France	Wheat agreement. France will ship annual quantities of 500,000 to 700,000 tons of wheat to China for three years, trade volume around US\$4,000 million
October	Federal Republic of Germany	Agreement on cooperation in geodesic and cartographic studies
	France	Agreement on broadcast cooperation between the Central People's Broadcasting Station of China and the National Society of Radio Broadcasting of France
		Agreement on the establishment of consulates
November	Federal Republic of Germany	Cultural exchange programme for 1981
	Italy	Protocol on literary and art exchanges in 1981 between the Chinese Writers' Association and the Italian National Union of Writers
December	Federal Republic of Germany	Cooperation agreement between the China International Trust and Investment Corporation and the Deutsche Bank AG (Frankfurt)
	Belgium	Agreement on cultural cooperation
<i>1981</i>		
February	Belgium	Agreement to provide interest-free governmental loans to China in 1981 (300 million Belgian francs)
March	France	Protocol for sports exchange in 1981
	United Kingdom	Reciprocal agreement on avoiding double taxation arising from the business of air transport
	European Community	Agreement on providing food aid for the People's Republic of China amounting to about US\$6.24 million
May	Federal Republic of Germany	Agreement on medical cooperation and exchange between Beijing and Wuhan Medical Colleges and the University of Essen
	Italy	Agreement on arbitration cooperation
	Federal Republic of Germany	Cooperation agreement between the China International Trust and Investment Corporation and the Dresdner Bank of Germany
June	France	Cooperation agreement between the Biological Department of the Chinese Academy of Sciences and the French

		National Institute of Health and Medical Research
September	Belgium	Cultural cooperation programme for 1982-83
	Federal Republic of Germany	Agreement on railway cooperation Agreement on scientific cooperation between the Chinese Academy of Sciences and the Max Planck Society
October	France	Cultural exchange programme 1982-83
	Federal Republic of Germany	Agreement for the continuation of the German-Chinese cultural exchange programme in 1982-83
	Denmark	1982-83 programme of scientific, educational and cultural cooperation
November	Italy	Agreement on radio and television cooperation 1982-83 cultural, scientific and technological programme
December	United Kingdom	Protocol for further cooperation in science and technology
<i>1982</i>		
February	United Kingdom	Protocol for 1982 on cooperation in standardization
	Federal Republic of Germany	Protocol on cooperation in rental business between the China International Trust and Investment Corporation and the Investment and Rental Corporation of Germany
March	United Kingdom	Additional agreement on civil aviation Agreement to exchange film exhibition

Table 2

ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE PRC
AND THE EC COUNTRIES

Date	Country
May 1950	Denmark
June 1954	United Kingdom
November 1954	Netherlands
January 1964	France
November 1970	Italy
October 1971	Belgium
June 1972	Greece
October 1972	Federal Republic of Germany
November 1972	Luxembourg
June 1979	Ireland
September 1975	European Community

Table 3

FOREIGN TRADE OF THE PRC BY COUNTRY GROUPS
(in million US\$)

	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
<i>Chinese Exports</i>																					
Socialist Countries ¹	212	485	600	670	845	975	1,085	1,080	1,290	1,595	1,316	984	957	866	752	710	615	495	542	565	575
Western Industrial Countries ²	267	220	100	150	132	200	240	220	234	237	274	226	224	262	408	545	711	648	600	660	650
of which:																					
European Community	38	99	31	66	51	65	86	69	105	114	-133	78	80	94	126	175	224	201	199	240	229
Asia, Africa, Latin America	216	270	220	225	188	230	315	350	416	398	440	360	374	517	670	735	874	842	838	845	865
Total	695	975	920	1,045	1,165	1,405	1,640	1,650	1,940	2,230	2,030	1,570	1,555	1,645	1,830	1,990	2,200	1,985	1,980	2,070	2,090
<i>Chinese Imports</i>																					
Socialist Countries ¹	390	546	715	900	1,020	1,010	1,025	885	1,100	1,365	1,285	715	500	435	395	520	515	395	604	340	405
Western Industrial Countries ²	150	70	55	110	112	145	290	325	555	455	430	485	430	545	635	870	1,065	1,210	1,104	1,100	1,380
of which:																					
European Community	24	23	14	48	38	49	98	111	304	250	239	111	105	118	107	232	321	409	372	298	349
Asia, Africa, Latin America	330	484	210	175	158	200	165	210	170	230	275	280	220	230	430	455	450	345	310	400	455
Total	870	1,100	980	1,185	1,290	1,335	1,480	1,420	1,825	2,050	1,990	1,480	1,150	1,210	1,460	1,845	2,030	1,950	1,820	1,840	2,240
Trade Turn-over	1,565	2,075	1,900	2,230	2,455	2,760	3,120	3,070	3,765	4,280	4,020	3,050	2,705	2,855	3,290	3,835	4,230	3,935	3,830	3,910	4,330
<i>Export Surplus resp. Import Surplus (-)</i>																					
Socialist Countries ¹	-178	-61	-115	-230	-175	-35	60	195	190	230	31	269	457	431	357	190	100	100	136	225	170
Western Industrial Countries ²	117	150	45	40	20	55	-50	-105	-321	-218	-156	-259	-206	-283	-227	-325	-350	-562	-504	-440	-730
of which:																					
European Community	14	77	18	19	13	16	-12	-42	-199	-136	-107	-33	-25	-23	19	-57	-98	-208	-173	-58	-120
Asia, Africa, Latin America	-114	-214	10	50	30	30	150	140	246	168	165	80	154	287	240	280	424	497	528	445	410
Total	-175	-125	-60	-140	-125	50	160	230	115	180	40	90	405	435	370	145	170	35	160	230	-150

Table 3• (continued)

FOREIGN TRADE OF THE PRC BY COUNTRY GROUPS
(Percentage Shares)

	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
<i>Chinese Exports</i>																					
Socialist Countries ¹	30.5	49.7	65.2	64.1	72.5	69.4	66.2	65.5	66.5	71.5	64.8	62.7	61.5	52.6	41.1	35.7	28.0	25.0	27.4	27.3	27.5
Western Industrial Countries ²	38.4	22.6	10.9	14.4	11.3	14.2	14.6	13.3	12.1	10.6	13.5	14.4	14.4	15.9	22.3	27.4	32.3	32.6	30.3	31.9	31.1
of which:																					
European Community	5.5	10.2	3.4	6.4	4.3	4.6	5.3	4.2	5.4	5.1	6.5	5.0	5.2	5.7	6.9	8.8	10.2	10.1	10.0	11.6	11.0
Asia, Africa, Latin America	31.1	27.7	23.9	21.5	16.2	16.4	19.2	21.2	21.4	17.9	21.7	22.9	24.1	31.5	36.6	36.9	39.7	42.4	42.3	40.8	41.4
<i>Chinese Imports</i>																					
Socialist Countries ¹	44.8	49.6	73.0	76.0	79.1	74.5	69.2	62.3	60.3	66.6	64.6	48.3	43.5	36.0	27.1	28.2	25.4	20.3	22.3	18.5	18.1
Western Industrial Countries ²	17.3	6.4	5.6	9.2	8.6	10.7	19.6	22.9	30.4	22.2	21.6	32.8	37.4	45.0	43.5	47.2	52.4	62.0	60.7	59.8	61.6
of which:																					
European Community	2.7	2.1	1.4	4.0	2.9	3.6	6.6	7.8	16.6	12.1	12.0	7.5	9.1	9.7	7.3	12.6	15.8	20.9	20.4	16.2	15.6
Asia, Africa, Latin America	37.9	44.0	21.4	14.8	11.3	14.8	11.2	14.8	9.3	11.2	13.8	18.9	19.1	19.0	29.4	24.6	22.2	17.7	17.0	21.7	20.3
<i>Chinese Trade with</i>																					
Socialist Countries ¹	38.4	49.7	69.2	70.4	76.0	71.9	67.6	64.0	63.5	69.2	64.7	55.7	53.9	45.6	34.9	32.1	26.7	22.6	24.9	32.2	22.6
Western Industrial Countries ²	26.7	14.0	8.2	11.7	9.9	12.5	17.0	17.8	21.0	16.2	17.5	23.3	24.2	28.3	31.7	36.9	42.0	47.2	44.9	45.0	46.9
of which:																					
European Community	3.9	6.0	2.4	5.1	3.6	4.1	5.9	5.8	10.9	8.5	9.3	6.2	6.8	7.4	7.1	10.6	12.9	15.5	15.0	13.8	13.4
Asia, Africa, Latin America	34.9	36.3	22.6	17.9	14.1	15.6	15.4	18.2	15.5	14.6	17.8	21.0	21.9	26.1	33.4	31.0	31.3	30.2	30.2	31.8	30.5

¹Comecon countries and Mongolia, Cuba, Albania as well as Yugoslavia and Asian People's Democracies.

²OECD countries including Australia and New Zealand.

Source: Ernst Hagemann, "Die Entwicklung des chinesischen Ausenhandels," in Eckard Garms (ed.), Wirtschaftspartner China 81/82, 2nd rev. ed. Hamburg 1982, pp. 244-246.

Table 4

FOREIGN TRADE OF THE PRC BY COUNTRY GROUPS
(in million US\$)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
<i>Chinese Exports</i>										
Socialist Countries ¹	653	785	995	1,320	1,460	1,325	1,360	1,570	1,725	1,950
Western Industrial Countries ²	760	1,065	1,844	2,373	2,620	2,690	2,885	3,750	5,595	8,180.
of which:										
European Community	255	326	485	560	572	870	910	1,110	1,670	2,340
Asia, Africa, Latin America	1,070	1,240	1,855	2,567	2,906	3,355	3,840	4,675	7,335	8,000
Total	2,465	3,090	4,694	6,260	6,986	7,370	8,085	9,995	13,655	18,130
<i>Chinese Imports</i>										
Socialist Countries ¹	525	580	730	990	970	1,100	1,155	1,575	1,940	2,020
Western Industrial Countries ²	1,310	1,560	3,355	5,240	5,438	4,220	4,620	7,885	11,105	14,400
of which:										
European Community	335	322	592	876	1,368	1,430	988	2,070	3,130	2,630
Asia, Africa, Latin America	485	650	756	1,080	1,082	1,205	1,585	1,710	2,665	2,980
Total	2,320	2,790	4,841	7,310	7,490	6,525	7,360	11,170	15,710	19,400
<i>Trade Turn-over</i>	4,785	5,880	9,535	13,570	14,479	13,895	15,445	21,165	29,365	37,530
<i>Export Surplus resp. Import Surplus (-)</i>										
Socialist Countries ¹	110	205	265	330	490	225	205	-5	-215	-70
Western Industrial Countries ²	-550	-495	-1,511	-2,867	-2,828	-1,530	-1,735	-4,135	-5,510	-6,220
of which:										
European Community	-79	38	-107	-316	-797	-560	-78	-960	-1,460	-290
Asia, Africa, Latin America	585	590	1,099	1,487	1,824	2,150	2,255	2,965	3,670	5,020
Total	145	300	-147	-1,050	-504	845	725	-1,175	-2,055	-1,270
<i>Percentage Shares</i>										
<i>Chinese Exports</i>										
Socialist Countries ¹	26.5	25.4	21.2	21.1	20.9	18.0	16.8	15.7	12.6	10.8
Western Industrial Countries ²	30.8	34.5	39.3	37.9	37.5	36.5	35.7	37.5	41.0	45.1
of which:										
European Community	10.3	10.6	10.3	9.0	8.2	11.8	11.3	11.1	12.2	12.9
Asia, Africa, Latin America	43.4	40.1	39.5	41.0	41.6	45.5	47.5	46.8	46.4	44.1
<i>Chinese Imports</i>										
Socialist Countries ¹	22.6	20.8	15.1	13.5	13.0	16.9	15.7	14.1	12.3	10.4
Western Industrial Countries ²	56.5	55.9	69.3	71.7	72.6	64.7	62.8	70.6	70.7	74.2
of which:										
European Community	14.4	11.5	12.2	12.0	18.3	21.9	13.4	18.5	19.9	13.6
Asia, Africa, Latin America	20.9	23.3	15.6	14.8	14.5	18.4	23.1	15.3	17.0	15.4
<i>Chinese Trade with</i>										
Socialist Countries ¹	24.6	23.2	18.1	17.0	16.8	17.3	16.3	14.9	12.5	10.6
Western Industrial Countries ²	43.3	44.6	54.5	56.1	55.7	49.4	48.6	55.0	56.9	60.2
of which:										
European Community	12.3	11.0	11.3	10.6	13.4	16.4	12.3	15.0	20.0	13.2
Asia, Africa, Latin America	32.5	32.1	27.4	26.9	27.5	32.6	35.2	30.2	34.0	29.3

1 and 2 as in Table 3.

Source: as Table 3, p. 247.

Table 5

FOREIGN TRADE OF WEST EUROPE WITH THE PRC
(in million US\$)

	1970	1973	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981 [*]
<i>Imports from China (CIF)</i>									
West Europe	414	806	1,040	1,128	1,180	1,450	2,190	3,037	1,434
European Community	338	679	808	953	995	1,215	1,835	2,638	1,255
Federal Republic of Germany	84	150	224	271	253	324	534	808	388
France	70	147	174	194	171	199	327	468	253
United Kingdom	81	117	135	156	183	188	292	364	160
Italy	63	140	126	155	161	200	396	437	204
<i>Exports to China (fob)</i>									
West Europe	538	958	1,750	1,481	1,205	2,335	3,405	2,948	1,407
European Community	460	750	1,424	1,337	911	1,906	2,875	2,408	1,221
Federal Republic of Germany	167	310	523	623	562	1,114	1,492	1,145	544
France	81	90	374	355	107	223	339	304	158
United Kingdom	107	207	180	127	122	197	457	394	220
Italy	57	76	145	127	87	188	278	257	174

¹First half of 1981.

Source: Compiled after Ernst Hagemann, "Die Entwicklung des chinesischen Aussenhandels," in Eckard Garms (ed.), *Wirtschaftspartner China 81/82*, 2nd rev. ed. Hamburg 1982, p. 243, and *idem.*, "VR China: Günstige Aussichten für den Aussenhandel," in *Wochenbericht*, 7/82, February 2, 1982, DIW Berlin, p. 109.

Table 6

GROWTH RATES OF CHINESE EXPORT*
(Percentage Changes over the Previous Year)

Year	Total	Socialist Countries	Western Industrial Countries	European Community	Asia, Africa, Latin America
1951	40.3	128.8	-17.6	160.5	25.0
1952	-5.6	23.7	-54.5	-68.7	-18.5
1953	13.6	11.7	50.0	112.9	2.3
1954	11.5	26.1	-12.0	-22.7	-16.4
1955	20.6	15.4	51.5	27.4	22.3
1956	16.7	11.3	20.0	32.3	37.0
1957	0.6	-0.5	-8.3	-19.8	11.1
1958	17.6	19.4	6.4	52.2	18.9
1959	14.9	23.6	1.3	8.6	-4.3
1960	-9.0	-17.5	15.6	16.7	10.6
1961	-22.7	-25.2	-17.5	-41.4	-18.2
1962	-0.9	-2.7	-0.9	2.6	3.9
1963	5.8	-9.5	17.0	17.5	38.2
1964	11.2	-13.2	55.7	34.0	29.6
1965	8.7	-5.6	58.1	38.9	9.7
1966	10.6	-13.4	30.5	28.0	18.9
1967	-9.8	-19.5	-8.9	-10.3	-3.7
1968	-0.3	9.5	-7.4	-1.0	-0.5
1969	4.5	4.2	10.0	20.6	-0.8
1970	1.0	1.8	-1.5	-4.6	2.4
1971	17.9	13.6	16.9	11.4	23.7
1972	25.4	20.2	40.1	27.8	15.9
1973	51.9	26.8	73.1	48.8	49.6
1974	33.4	32.7	28.7	15.5	38.4
1975	11.6	10.6	9.4	2.1	13.2
1976	5.5	-9.2	2.7	52.1	15.5
1977	9.7	2.6	7.2	4.6	14.5
1978	23.6	15.4	30.0	22.0	21.7
1979	36.6	9.9	49.2	50.5	56.9
1980	22.2	12.0	46.2	40.1	9.1
1981	22.2	12.0	46.2	40.1	9.1

Table 7

GROWTH RATES OF CHINESE IMPORTS*
(Percentage Changes over the Previous Year)

Year	Total	Socialist Countries	Western Industrial Countries	European Community	Asia, Africa, Latin America
1951	26.4	40.0	-53.3	4.2	46.7
1952	-10.9	31.0	-21.4	-39.1	-56.6
1953	20.8	16.8	100.0	242.9	-16.7
1954	8.9	13.3	1.8	-20.8	-9.7
1955	3.5	-1.0	29.5	28.9	26.6
1956	10.9	1.5	100.0	100.0	-17.5
1957	-4.1	-13.7	12.1	13.3	27.3
1958	28.5	24.3	70.8	173.9	-19.0
1959	12.3	24.1	-18.0	-17.8	35.3
1960	-2.9	-5.9	-5.5	-4.4	19.6
1961	-25.6	-44.4	12.8	-53.6	1.8
1962	-22.3	-30.1	-11.3	-5.4	-21.4
1963	5.2	-13.0	26.7	12.4	4.5
1964	20.7	-9.2	16.5	-9.3	87.0
1965	26.4	24.0	37.0	116.8	5.8
1966	10.0	-1.0	22.4	38.4	-1.1
1967	-4.1	-23.3	13.6	27.4	-23.3
1968	-10.8	52.9	-8.8	-9.0	-10.1
1969	1.1	-43.7	-0.4	-19.9	29.0
1970	21.7	19.1	25.5	17.1	13.8
1971	3.6	29.6	-5.1	-4.0	6.6
1972	20.3	10.5	19.1	-3.9	34.0
1973	73.5	25.9	115.1	83.9	16.3
1974	51.0	35.6	56.2	48.0	42.9
1975	2.5	-2.0	3.8	56.2	0.2
1976	-12.9	13.4	-22.4	4.5	11.4
1977	12.8	5.0	9.5	-30.9	31.5
1978	51.8	36.4	70.7	109.5	7.9
1979	40.6	23.2	40.8	51.2	55.8
1980	23.5	4.1	29.7	-16.0	11.8

Table 8

COMMODITY COMPOSITION OF CHINESE IMPORTS AND EXPORTS

Year	Exports (Total exports = 100)			Imports (Total imports = 100)	
	Industrial and Mineral Products ^a	Processed Farm and Sideline Products ^b	Farm and Sideline Products ^c	Means of Production	Means of Subsistence
1950	9.3	33.2	57.5	83.4	16.6
1951	14.0	31.4	54.6	81.3	18.7
1952	17.9	22.8	59.3	89.4	10.6
1953	18.4	25.9	55.7	92.1	7.9
1954	24.0	27.7	48.3	92.3	7.7
1955	25.5	28.4	46.1	93.8	6.2
1956	26.1	31.3	42.6	91.5	8.5
1957	28.4	31.5	40.1	92.0	8.0
1958	27.5	37.0	35.5	93.1	6.9
1959	23.7	38.7	37.6	95.7	4.3
1960	26.7	42.3	31.0	95.4	4.6
1961	33.4	45.9	20.7	61.9	38.1
1962	34.7	45.9	19.4	55.2	44.8
1963	32.9	42.9	24.2	56.0	44.0
1964	32.9	39.1	28.0	55.5	44.5
1965	30.9	36.0	33.1	66.5	33.5
1966	26.6	37.5	35.9	72.2	27.8
1967	24.4	36.3	39.3	76.0	24.0
1968	21.8	38.2	40.0	77.2	22.8
1969	23.5	39.1	37.4	82.4	17.6
1970	25.6	37.7	36.7	82.7	17.3
1971	28.9	34.9	36.2	83.9	16.1
1972	27.7	41.0	31.3	79.4	20.6
1973	24.7	39.5	35.8	76.4	23.6
1974	33.8	29.8	36.4	75.7	24.3
1975	39.3	31.1	29.6	85.4	14.6
1976	38.9	32.7	28.4	86.8	13.2
1977	38.5	33.9	27.6	76.1	23.9
1978	37.4	35.0	27.6	81.4	18.6
1979	44.0	32.9	23.1	81.3	18.7

Notes:

^a Including metals and mineral products, machinery and instruments, Western medicine, chinaware, chemical fibres and chemical fibres products.

^b Including processed grain and edible oil, food, textiles, native and animal products and handicraft.

^c Including grain, cotton, edible oil, eggs, livestock and poultry, aquatic products, vegetables and fruits, raw lacquer and crude Chinese drugs.

Politik Luar Negeri Cina terhadap Asia Tenggara*

LIE Tek-tjeng

PENGANTAR

Analisa ini ingin mengajukan hipotesa bahwa kebijaksanaan dasar RRC terhadap bangsa-bangsa Asia Tenggara - seperti kebijaksanaan negara-negara besar terhadap negara-negara tetangga mereka yang lebih kecil - berdasarkan asas bahwa negara-negara tetangga yang lebih kecil ini *secara minimal* tidak boleh bersekutu dengan musuh utamanya dan *secara ideal atau maksimal* harus dalam lingkungan pengaruhnya.¹ Dan suatu diskusi mengenai topik ini, karena manifestasi kebijaksanaan ini berbeda-beda, dapat dibagi dalam dua periode yang jelas seperti berikut: (1) periode Perang Dingin, khususnya sejak pecahnya Perang Korea tahun 1950 sampai pemulihan hubungan Cina-Amerika Serikat bulan Februari 1972 ketika Amerika Serikat merupakan musuh utama RRC; dan (2) periode sejak pemulihan hubungan itu ketika Uni Soviet menggantikan Amerika Serikat sebagai musuh utama RRC.

Di bawah ini akan kita bahas manifestasi-manifestasi kongkrit kebijaksanaan luar negeri Cina terhadap negara-negara tetangga selatannya di Asia Tenggara dalam kedua periode ini secara berturut-turut.

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Konperensi Indonesia-Jerman di Sanur, Bali, 5-7 Juli 1982. Dr. Lie Tek-TJENG adalah seorang ahli riset LIPI. Diterjemahkan oleh Kirdi DIPOYUDO.

¹Bandingkan misalnya sikap negara-negara besar Eropa: Inggris, Perancis dan Jerman terhadap tetangga-tetangga mereka yang lebih kecil seperti: Negeri Belanda, Belgium dan Luksemburg dalam sejarah; mungkin lebih relevan adalah doktrin Monroe Amerika Serikat terhadap tetangga-tetangga Amerika Latinnya dan kebijaksanaan Uni Soviet terhadap tetangga-tetangganya di Eropa Tengah dan Timur sejak akhir Perang Dunia II, dan usaha Uni Soviet sekarang ini untuk memperluas pengaruhnya ke tetangga-tetangga selatannya, yaitu negara-negara Timur Tengah: Iran dan Afghanistan.

PERIODE PERANG DINGIN: 1950-1972

Kurang dari setahun sesudah proklamasi pembentukan RRC pada 1 Oktober 1949, pecah Perang Korea yang pada akhir tahun 1950 menghadapi sukarelawan-sukarelawan Cina dengan pasukan-pasukan Amerika Serikat yang bertempur di bawah panji-panji PBB. Perang Korea ini sudah terlalu dikenal oleh para pengamat Asia sehingga tidak perlu diuraikan secara panjang lebar di sini. Akan tetapi yang penting dan relevan di sini ialah bahwa sebagai akibatnya Amerika Serikat juga melaksanakan kebijaksanaan pembendungan komunismenya terhadap RRC di kawasan Asia-Pasifik dan secara demikian menentukan pola dasar percaturan politik Asia-Pasifik selama lebih dari dua dasawarsa sampai pemulihan hubungan Cina-Amerika Serikat pada tahun-tahun pertama dasawarsa 1970-an secara radikal mengubah pola dasar percaturan politik Asia-Pasifik dan dunia.¹

Pembendungan Amerika Serikat terhadap Cina² terutama dilakukan oleh Armada ke-7 yang kuat - satuan tempur paling kuat yang keluar dari Perang Dunia II yang tidak mempunyai bandingnya pada waktu itu - dan dari pangkalan-pangkalan militer yang dibangun oleh Amerika Serikat sepanjang pantai Pasifik Cina dari Timur Laut sampai Selatan. Karena kebanyakan negara Asia Timur Laut telah berpihak dengan yang satu atau yang lain - Korea Utara dengan kubu komunis sedangkan Korea Selatan, Jepang termasuk Okinawa³ dan Taiwan⁴ dengan kubu Amerika Serikat - usaha Amerika Serikat dipusatkan untuk mengerahkan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang

¹Kebijaksanaan pembendungan komunisme secara global dalam Perang Dingin - komunisme Uni Soviet di kawasan Eropa-Atlantik yang meluas ke Timur Tengah, dan komunisme Cina di kawasan Asia-Pasifik - digantikan suatu kebijaksanaan untuk menyeimbangkan Uni Soviet dan RRC dengan bantuan sekutu-sekutunya, menyusul pemulihan hubungan Cina-Amerika Serikat pada tahun-tahun pertama 1970-an.

²Dengan kebijaksanaan pandangan ke belakang kita sekarang dapat mengatakan bahwa Amerika Serikat - yang hanya bertindak atas kriterium komunis tanpa membedakan antara komunisme Uni Soviet dan komunisme Cina - "menghabiskan" tenaganya atas partner komunis yang lebih lemah - yaitu dalam Perang Korea dan khususnya dalam Perang Vietnam - hal mana memungkinkan Uni Soviet sebagai negara komunis yang paling kuat untuk mengejanya, paling tidak di bidang persenjataan militer termasuk persenjataan nuklir.

³Okinawa diduduki oleh Amerika Serikat sampai dikembalikan kepada Jepang pada tahun 1972.

⁴Perlunya Taiwan sebagai penghubung antara kepulauan Jepang serta Okinawa dan kepulauan Filipina membuat pasangan Truman-Acheson, menyusul pecahnya Perang Korea - melepaskan kebijaksanaan "tidak mencampuri politik dalam negeri Cina" mereka, dan pasangan Eisenhower-Dulles (1952-1960) berikutnya memutuskan untuk mengakui rezim Chiang Kai-shek/KMT sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang sah, dan secara demikian menimbulkan masalah Cina-Amerika Serikat yang menghantui para pembuat kebijaksanaannya sampai sekarang.

secara strategis terdapat di sebelah selatan Cina dan harus dicegah jatuh ke dalam lingkungan pengaruh Cina karena potensi mereka.¹

Di lain pihak, menghadapi negara yang paling kuat di dunia pada waktu itu dan juga mempunyai bom atom, strategi dasar RRC mau tak mau harus menangkis kebijaksanaan pembendungan Amerika Serikat dalam rangka menjamin kelangsungan hidup republik yang baru berumur satu tahun itu. Dengan demikian ia harus menggagalkan usaha musuh utamanya untuk mengerahkan negara-negara tetangga selatannya dalam kebijaksanaan pembendungan Cina. Atau dengan kata lain, biarpun Asia Tenggara *bukan* sasaran kebijaksanaan utama Amerika Serikat atau RRC, kawasan ini terperangkap dalam strategi dan kontra strategi dasar Amerika Serikat dan RRC satu sama lain karena: *persahabatan dengan Amerika Serikat berarti permusuhan dengan RRC dan sebaliknya*. Ini dapat diringkas secara kongkrit sebagai berikut.

Muangthai dan Pilipina se-persepsi dengan Amerika Serikat bahwa komunisme merupakan ancaman utama untuk Asia Tenggara² dan oleh sebab itu mereka bergabung dengan SEATO yang secara khusus dibentuk untuk membendung RRC dan mengikuti kebijaksanaan Cina-Amerika Serikat, yaitu mengakui dan menjalin hubungan diplomasi dengan rezim Chiang Kai-shek/KMT di Taiwan sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di Cina. Sudah barang tentu ini membangkitkan amarah RRC yang lebih lemah yang kemudian melaksanakan kontra strategi mendukung segala macam kegiatan subversi, khususnya kegiatan Partai Komunis Muangthai yang pro Beijing, yang selalu berusaha menggulingkan Pemerintah pro Barat Muangthai. Geografi menentukan bahwa Muangthai-lah yang paling menderita akibat kegiatan-kegiatan subversi komunis yang didukung RRC itu, sedangkan dukungan material Cina untuk pemberontakan dan kegiatan-kegiatan komunis di Pilipina sangat kecil karena Armada ke-7 Amerika Serikat hampir secara mutlak menguasai lautan antara daratan Cina dan kepulauan Pilipina.

Bekas jajahan Inggris: Malaysia dan Singapura tidak mengikuti kebijaksanaan dasar Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik itu. Artinya, mereka tidak bergabung dengan SEATO dan tidak menjalin hubungan diplomasi dengan rezim Chiang Kai-shek/KMT di Taiwan, biarpun mereka juga tidak

¹ Geografi strategis Asia Tenggara antara daratan Asia dan Australia di satu pihak dan antara samudera-samudera Hindia dan Pasifik di lain pihak dan potensi sumber dayanya sudah diakui dalam Perang Dunia II oleh pemerintah Amerika Serikat dan sangat mempengaruhi pemikiran strategi dan politik luar negeri Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Lihat Laurence H. Shoup dan William Minter, *Imperial Braintrust* (Monthly Review Press, 1977), khususnya bab 6.

² Dengan kebijaksanaan pandangan ke belakang kita sekarang mungkin bisa mengatakan bahwa Muangthai lebih cemas dengan komunisme Vietnam daripada dengan komunisme Cina.

mengakui RRC. Akan tetapi perjuangan mereka melawan Partai Komunis Malaya - yang terutama terdiri atas keturunan Cina¹ yang mempunyai ikatan dengan Partai Komunis Cina (PKC) dan/atau RRC - membuat pemerintah-pemerintah ini sangat berhati-hati, kalau tidak curiga, terhadap RRC. Selain itu, keanggotaan mereka dalam Perjanjian Pertahanan Lima Negara bersama: Inggris, Australia dan Selandia Baru membuat Amerika Serikat bersikap baik terhadap mereka.

Di lain pihak, RRC tidak sangat senang dengan kedua negara baru ini yang sering disebutkannya sebagai produk neo-kolonialisme, dan pemimpin-pemimpin Kuala Lumpur dan Singapura biasanya masing-masing disebutkan sebagai feodal dan borjuis-kapitalis. Dengan demikian ketika Presiden Soekarno melancarkan politik Konfrontasinya, RRC tidak menemukan kesulitan untuk mendukungnya karena Indonesia bisa dilukiskan sebagai perang secara strategis dalam kebijaksanaan pembendungan Amerika Serikat terhadap Cina maupun dalam kebijaksanaan tanggapan Cina untuk mematahkan kebijaksanaan pembendungan itu.

Artinya, kami ingin mengisyaratkan bahwa "pembendungan ideal" RRC, mengingat bahwa supremasi Armada ke-7 di Samudera Pasifik tidak pernah dipersoalkan hampir selama Perang Dingin, akan melewati kepulauan Jepang termasuk Okinawa, Taiwan, kepulauan Pilipina dan Indonesia. Kalau ini bisa dilaksanakan, maka Amerika Serikat akan mampu mengikuti nasihat pemimpin-pemimpin militer tertingginya untuk tidak terlibat lagi dalam suatu perang di daratan Asia menyusul pelajaran pahit Perang Korea.

Perang Korea adalah perang besar pertama dalam pengalaman Amerika Serikat yang berakhir seri. Lagi pula, pemimpin-pemimpin militer tertingginya menarik pelajaran bahwa bukanlah demi kepentingan nasional Amerika Serikat berperang lagi di daratan Asia di seberang Samudera Pasifik melawan suatu kekuatan darat dengan tenaga manusia yang hampir tak dapat habis, dan di mana Amerika Serikat tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan Angkatan Lautnya. Ketua Kepala-kepala Staf Gabungan, jenderal bintang lima Omar Bradley yang termashur dari Perang Dunia II, melukiskan Perang Korea sebagai "perang yang salah, di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dan dengan musuh yang salah".²

¹Di sini kita menggunakan istilah etnis Cina untuk menyebutkan baik warga negara Cina yang oleh orang-orang Cina disebut *Huachiau* (diterjemahkan menjadi Cina perantauan) - maupun warga negara Asia Tenggara keturunan Cina - yang oleh orang-orang Cina disebut *hua-n* (orang hua) atau *hua-i* (keturunan Cina). Lihat karangan-karangan Gung-wu Wang, Goh Beng-teik dan Lie Tek-tjeng dalam *Masalah-masalah Internasional Masakini* (7) (Jakarta: RKN LIPI, 1977).

²Paul Y. Hammond, *Cold War and Détente* (Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1975), hal. 70.

Akan tetapi, bahkan seandainya "pembendungan ideal" ini pernah dipertimbangkan oleh para pemimpin Perang Dingin Amerika Serikat, ia tidak akan pernah dapat dilakukan karena Indonesia di bawah Presiden Soekarno melaksanakan suatu politik luar negeri yang bebas dan aktif yang menolak SEATO dan menganut suatu kebijaksanaan satu Cina yang mengakui Beijing sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang sah. Atau dengan kata lain, Indonesia di bawah Presiden Soekarno melaksanakan suatu kebijaksanaan luar negeri yang berlawanan dengan kebijaksanaan dasar Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik dan, selain itu menjijikkan bagi para pemimpin Perang Dingin di bawah Menteri Luar Negeri John Foster Dulles - yang dikenal akibat sikapnya "netralisme adalah imoral" - dan saudaranya Allan Dulles, Direktur CIA. Dan kecenderungan ke kiri politik Indonesia dalam dasawarsa 1950-an, terutama akibat perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat, menjurus ke suatu orientasi politik pada dunia komunis.

Maksudnya, pada waktu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menuntut seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayah Indonesia Merdeka, akan tetapi Negeri Belanda, ketika akhirnya menarik diri dan mengakui kedaulatan Indonesia pada bulan Desember 1949, tetap mempertahankan Irian Barat yang di Barat lebih dikenal sebagai West New Guinea.

Akan tetapi Indonesia di bawah Soekarno -- mengingat bahwa kemerdekaan seperti tercantum dalam Proklamasi 1945 belum dicapai sepenuhnya dan bahwa hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap asas pokok keutuhan wilayah suatu bangsa merdeka -- menjadikan penyatuan Irian Barat dengan Republik Indonesia sasaran nasional dan ketika diskusi serta perundingan yang berulang kali dilakukan dengan Negeri Belanda tidak mendatangkan penyelesaian yang diinginkan, memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Akan tetapi menggunakan kekerasan untuk membebaskan Irian Barat membutuhkan senjata-senjata berat modern dan sophisticated -- seperti kapal-kapal perang besar, pesawat-pesawat jet terbaru, peluru-peluru kendali, artileri berat dan seterusnya -- yang belum dimiliki Indonesia; dan setelah usaha yang berulang kali dilakukan untuk mendapatkan senjata-senjata ini dari Barat menemui kegagalan,¹ Presiden Soekarno mengambil keputusan politik yang penting untuk mendapatkannya dari Blok Komunis.

Kebutuhan Indonesia akan senjata-senjata berat tersebut membuatnya pertama-tama berpaling kepada Uni Soviet, yang di bawah Khrushchev mulai tampil sebagai suatu kekuatan laut dan secara demikian menyadari arti geo-

¹Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya menolak untuk menjual senjata yang akan digunakan melawan sekutu NATO mereka yang loyal.

strategis Indonesia antara Samudra Hindia dan Pasifik.¹ Akan tetapi perkembangan dan pengaruh PKI pimpinan Aidit mendatangkan suatu identifikasi yang lebih besar dengan PKC/RRC yang merupakan suatu bencana bagi hubungan Indonesia-Cina sejak pertengahan dasawarsa 1960-an.

Maksudnya, kecenderungan ke kiri politik Indonesia pada dasawarsa 1950-an menunjang kebangkitan kembali PKI yang di bawah kepemimpinan Aidit yang energik menjadi satu dari empat besar dalam pemilihan 1955 bersama PNI, Masyumi dan NU. Di sini kami ingin menegaskan bahwa untuk memperkuat partainya Aidit merasa berguna untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan "pro-Cina" yang disambut baik oleh RRC yang sudah barang tentu mengakui arti strategisnya untuk kebijaksanaan luar negerinya.² Dengan kata lain, gerak Indonesia mendekati dunia komunis umumnya dan RRC khususnya -- yang membuat Jakarta lebih revolusioner daripada Beijing sehingga menyerukan pembentukan poros Jakarta-Beijing dengan cabang-cabang ke Pnom Penh, Hanoi dan Pyongyang -- rupanya berarti keberhasilan kontra strategi dasar Cina untuk menerobos kebijaksanaan pembendungan Amerika.

Akan tetapi berkembangnya kecenderungan politik Indonesia pada dasawarsa 1950-an dan awal 1960-an yang menggembirakan RRC itu dilihat dengan kecemasan oleh para pemimpin Perang Dingin yang mengira bahwa negara-negara Asia Tenggara akan segera jatuh antara RRC dan suatu "Indonesia komunis pro-Beijing" ke dalam orbit Cina yang kemudian akan mengancam Australia, Pilipina dan bahkan Jepang.³ Kami ingin mengisyaratkan bahwa inilah *Zeitgeist* yang melingkari dan mendasari pemikiran para pemimpin Perang Dingin yang secara alamiah dan pasti menyeret Amerika Serikat ke dalam Perang Vietnam yang fatal itu, sekalipun para pemimpin militer tertingginya telah menarik pelajaran dari Perang Korea yang pahit tersebut.

Birma sejak merdeka melaksanakan suatu kebijaksanaan luar negeri netral yang terutama menekankan hubungannya dengan raksasa tetangga utaranya.

¹Lihat *Khrushchev Remembers* (Bantam Paperback), hal. 353 dst.

²Kami ingin mengisyaratkan di sini bahwa ini merupakan suatu gerak taktis PKI untuk mendapatkan bantuan keuangan -- sesuatu *sine quo non* untuk konsolidasi partai -- dari masyarakat etnis Cina yang diwakili oleh BAPERKI. Akan tetapi ini mengakibatkan suatu identifikasi Cina dan masyarakat etnis Cina dengan PKI pimpinan Aidit yang mempunyai reperkusi-reperkusi serius menyusul kegagalan Gerakan 30 September seperti kita ketahui. Lihat karangan kami, "Indonesia in China's Foreign Policy 1949-1977: A Perspective from Jakarta," dalam *China: Development and Challenge: Proceedings of the Fifth Leverhulme Conference* (University of Hong Kong, 1979), Vol. III.

³Pada waktu itu hanyutnya Indonesia ke dalam orbit Soviet akan dilihat sebagai yang lebih kecil dari dua hal yang buruk.

Seperti Indonesia dan India, Birma menganut kebijaksanaan satu Cina yang mengakui RRC sebagai satu-satunya Pemerintah Cina yang sah dan secara konsisten menolak untuk bergabung dengan SEATO. Dengan demikian selama Perang Dingin Amerika Serikat tidak senang dengan Birma sedangkan sebaliknya RRC dapat dikatakan puas karena kebijaksanaan Birma ini memenuhi kebutuhan keamanan *minimumnya*, dalam arti bahwa tetangga-tetangga Cina tidak boleh bersekutu dengan musuh utamanya Amerika Serikat. Akan tetapi ini tidak mencegah Cina *sampai tingkat tertentu* mendukung unsur-unsur komunis lokal -- khususnya yang pro-Beijing -- dan lain-lain yang ada harapannya mampu memenuhi *keinginan maksimum* Cina, yaitu terciptanya suatu Birma komunis yang pro-Beijing.¹

Akhirnya mengenai Vietnam dapat dikatakan bahwa ikatan bersama nasionalisme Asia, anti-kolonialisme dan ideologi komunis menjadikan orang-orang komunis Cina dan Vietnam kawan alamiah. Lagi pula permusuhan Cina-Amerika -- menyusul Perang Korea seperti diisyaratkan di atas -- dan komitmen Amerika pada Vietnam Selatan, tidak memberikan pilihan kepada RRC selain mendukung Vietnam Utara Ho Chi-minh kalau ia tidak menginginkan bahwa musuh utamanya mengetuk pintunya lagi, kali ini di Selatan. Oleh sebab itu Cina mendukung Vietnam Utara Ho Chi-minh sampai pemulihan hubungan Cina-Amerika pada tahun-tahun pertama 1970-an membuatnya tidak perlu lagi.²

Untuk meringkas, hubungan Cina dengan bangsa-bangsa Asia Tenggara selama Perang Dingin terutama ditentukan oleh hubungan mereka dengan musuh utamanya Amerika Serikat. Di mana mungkin RRC memberikan dukungan penuh kepada kegiatan-kegiatan anti pemerintah partai-partai komunis setempat dan lain-lain unsur subversif di negara-negara yang dianggapnya melaksanakan kebijaksanaan pro Barat (Muangthai, Pilipina, Malaysia dan Singapura); di lain pihak ia juga memberikan dukungan penuh kepada Vietnam Utara komunis karena negara ini berfungsi sebagai suatu penyangga terhadap musuh utamanya di perbatasan selatannya. RRC juga memberikan dukungan terbatas kepada partai komunis di Birma yang memberikan harapan bahwa akan tercipta suatu Birma komunis; di lain pihak

¹Cina memberikan dukungan penuh kepada partai-partai komunis dan lain-lain unsur anti-pemerintah di Muangthai dan Pilipina bilamana mungkin karena *segala perubahan adalah suatu perbaikan*. Tidaklah demikian halnya di Birma dan oleh sebab itu Cina harus lebih berhati-hati agar pemerintah tidak menganut garis yang lebih keras atau diganti oleh suatu pemerintah "pro-Amerika."

²"Merasa dikhianati," Vietnam Utara berpaling kepada Uni Soviet untuk mendapatkan senjata yang diperlukannya untuk memenangkan Perang Vietnam, yang dimenangkannya pada tahun 1975; akan tetapi ini memancing permusuhan Cina yang sementara itu melihat Uni Soviet sebagai musuh utama resminya.

ia juga harus berhati-hati untuk tidak memancing permusuhan pemerintah Birma yang kebijaksanaannya memenuhi kebutuhan keamanan minimumnya. Mengenai Indonesia, kesalahan besar RRC ialah identifikasi penuh dengan PKI-Aidit, suatu kenyataan yang memancing permusuhan saingan PKI, yaitu TNI yang muncul sebagai kekuatan dominan dalam percaturan politik Indonesia dalam era sesudah Soekarno.

SESUDAH PEMULIHAN HUBUNGAN CINA-AMERIKA

Pemulihan hubungan Cina-Amerika yang dilambangkan oleh komunike Shanghai tahun 1972, secara radikal mengubah pola dasar percaturan politik dunia, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Seperti kita lihat, waktu belakangan ini terjadi suatu perkembangan di mana kebijaksanaan pembendungan global Amerika terhadap komunisme (Soviet dan Cina) digantikan suatu kebijaksanaan baru menyeimbangkan Uni Soviet -- yang muncul sebagai suatu kekuatan nuklir global dengan suatu Angkatan Laut yang semakin kuat -- *dan RRC yang sejauh itu merupakan musuh utama Amerika di kawasan Asia-Pasifik.*

Menurut laporan RRC telah menyibukkan sekitar limapuluh divisi Soviet -- yang dalam keadaan lain bisa dikerahkan ke front Eropa dan/atau front Timur Tengah -- di sepanjang perbatasan Cina-Soviet, sedangkan kekuatan ekonomi raksasa Jepang didorong untuk memainkan peranan yang semakin besar dalam bidang politik dan pertahanan, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Dalam konteks yang terakhir itu, Jepang didesak agar meningkatkan usahanya membangun kembali kekuatan lautnya -- khususnya kemampuan anti kapal selamnya -- yang akan memungkinkannya mengambil alih sebagian peranan Armada ke-7 yang sejak dasawarsa 1970-an terpaksa semakin memperhatikan krisis-krisis yang berulang kali timbul di kawasan Timur Tengah dan Samudera Hindia. Di sini kami ingin menegaskan bahwa hubungan kekuatan baru antara Amerika Serikat, Uni Soviet dan RRC yang muncul pada dasawarsa terakhir mempunyai dampak yang sangat mendalam atas kawasan Asia-Pasifik.

Maksudnya, kebijaksanaan Cina terhadap tetangga-tetangga Asianya setelah hubungan Cina-Amerika dipulihkan dan Uni Soviet menggantikan Amerika Serikat sebagai musuh utamanya, dapat dibatasi sebagai berikut: hubungan baik atau bahkan suatu aliansi dengan Amerika Serikat bukan lagi merupakan suatu hambatan untuk hubungan baik dengan RRC seperti sangat baik terungkap dalam hubungan Cina-Jepang dan Cina-Muangthai yang sangat baik sekarang ini; di lain pihak, menjadi sekutu Uni Soviet merupakan racun yang mematikan untuk persahabatan suatu negara dengan RRC seperti

terlihat dalam memburuknya hubungan Cina-Vietnam. Atau dengan kata lain, biarpun asas yang sama tetap menguasai hubungan Cina dengan tetangga-tetangganya di Asia dan Asia Tenggara, manifestasinya sama sekali bertolak belakang dengan manifestasinya selama Perang Dingin.

ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967 -- ketika permusuhan Cina-Amerika masih menguasai percaturan politik Asia-Pasifik -- dan terdiri dari lima bangsa anti komunis (yaitu: dua bangsa SEATO, dua anggota Perjanjian Pertahanan Lima Negara, dan Indonesia yang mengalami suatu gelombang anti komunis umumnya dan gelombang anti Cina khususnya menyusul kegagalan G-30-S/PKI), mula-mula dicurigai sebagai suatu SEATO baru; akan tetapi ketika hal itu ternyata tidak benar dan RRC mengetahui pada waktunya bahwa ASEAN juga tidak mau bergabung dengan Blok Soviet, ia mengubah sikapnya dan kenyataannya menjadi negara besar pertama pada tahun-tahun awal 1970-an yang menunjukkan persetujuannya dengan organisasi regional baru ini.¹ Alasannya jelas. Berlawanan dengan strategi Perang Dingin dasarnya untuk menggagalkan kebijaksanaan pembendungan Amerika, strategi dasar baru Cina yang muncul pada akhir dasawarsa 1960-an ialah menangkis kebijaksanaan pengepungan Soviet dari sebelah Utara, lewat India di Barat sampai Asia Tenggara di sebelah selatan Cina.²

Karena sangat takut akan kebijaksanaan pengepungan Soviet yang seperti pembendungan Amerika di masa lampau, mengancam eksistensinya sebagai suatu negara ini, RRC tidak dapat melaksanakan suatu kebijaksanaan yang keras karena hal ini hanya akan memancing permusuhan bangsa-bangsa ASEAN dan mungkin mendorong mereka ke pelukan Uni Soviet yang merayu

¹Pada permulaan Amerika Serikat menginginkan agar ASEAN menjadi suatu SEATO baru -RRC masih merupakan musuh utamanya di kawasan Asia-Pasifik pada waktu itu. Oleh sebab itu ia tidak menaruh minat ketika organisasi regional baru ini tidak memenuhi harapan para pemimpin Perang Dingin; akan tetapi ia mulai mengubah pendapatnya menyusul kealahannya di Indocina dan setelah melihat daya hidup ASEAN. Jepang, yang masih mengikuti kebijaksanaan Asia-Pasifik dasar Amerika sebelum kejutan-kejutan Nixon, mula-mula diam; akan tetapi sejak itu ia maju dengan pesat dan kini merupakan investor terbesar di ASEAN dengan Amerika sebagai investor terbesar kedua yang jauh di belakangnya. Uni Soviet, seperti Cina pada permulaan, mencurigai ASEAN sebagai suatu SEATO baru; biarpun kecurigaannya agak berkurang setelah melihat bahwa ASEAN mempunyai kebijaksanaan independennya sendiri, ia masih kritis karena ASEAN lebih erat bekerja sama dengan Barat dan Jepang dalam pembangunan nasional mereka. Bagi Uni Soviet, ASEAN harus dirayu agar menjauhkan diri dari Barat, secara langsung atau lewat sekutunya Vietnam.

²Penulis masih ingat akan wawancaranya dengan Kuo Mo-jo, waktu itu Presiden Academia Sinica, ke mana ia dikirim oleh pemerintah Indonesia sebagai seorang ahli riset pertukaran untuk enam bulan dari bulan September 1965 sampai Maret 1966. Dari tiga jam wawancara, Kuo berbicara lebih dari dua jam mengenai pengepungan Soviet yang mengancam RRC. Ketakutan akan pengepungan Soviet ini paling besar pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, tetapi kini agak berkurang.

mereka.¹ Lagi pula, dewasa ini RRC tidak dapat bermusuhan dengan Barat khususnya Amerika Serikat dan Jepang yang mempunyai kepentingan-kepentingan politik strategis di Asia Tenggara dan diandalkannya untuk modernisasinya dan menghadapi Uni Soviet.²

Dengan latar belakang pemikiran inilah, RRC berusaha memperbaiki hubungannya dengan tetangga-tetangga selatannya di Asia Tenggara dan sampai batas-batas tertentu hal itu ditanggapi oleh bangsa-bangsa yang merasa ditinggalkan kalau tidak "dikhianati" oleh Amerika Serikat dan cemas karena membuat RRC memusuhi mereka selama lebih dari dua dasawarsa.³ Seperti kita lihat pada dasawarsa terakhir, RRC berhasil menjalin hubungan diplomasi dengan Muangthai,⁴ Malaysia⁵ dan Pilipina, biarpun hubungan dengan Indonesia masih harus dipulihkan.⁶ Hubungan baik dengan Birma juga dipulihkan menyusul periode buruk selama Revolusi Kebudayaan.

Berlawanan dengan membaiknya hubungannya dengan bangsa-bangsa ASEAN dan Birma, hubungan RRC dengan sekutu-sekutu komunisnya di semenanjung Indocina khususnya Vietnam memburuk. Seperti dikatakan

¹RRC tidak bisa tidak menyadari bahwa adalah pemulihan hubungannya dengan Amerika Serikat -- musuh bebuyutan Vietnam Utara yang meningkatkan pemboman strategisnya -- di puncak Perang Vietnam yang mendorong Vietnam ke pelukan Uni Soviet yang diperlukannya secara mutlak untuk memenangkan peperangan di Vietnam Selatan.

²Penalaran ini tetap sah selama RRC memandang Uni Soviet sebagai musuh utamanya -- biarpun dewasa ini hubungan Cina-Amerika memburuk akibat maksud Amerika menjual senjata kepada Taiwan yang oleh Cina ditafsirkan sebagai suatu tanda itikad buruk dan suatu pelanggaran terhadap semangat komunike Shanghai.

³Mungkin harus ditegaskan bahwa Muangthai dan Pilipina merasa diabaikan kalau tidak dikhianati oleh perubahan dasar mendadak kebijaksanaan Asia-Pasifik Amerika. Selama lebih dari dua dasawarsa kedua negara itu dikerahkan dalam kebijaksanaan pembendungan Cina-Amerika, untuk mengetahui bahwa mereka ditinggalkan dalam kesulitan dan harus memperbaiki hubungan mereka dengan Cina. Tidak perlu dikatakan bahwa kredibilitas Amerika mendapat pukulan dan tidak dapat pulih lagi seperti sebelumnya di negara-negara ini.

⁴Secara tradisional hubungan Muangthai dengan raksasa tetangga utaranya adalah baik dan bertolak belakang dengan hubungannya dengan tetangga-tetangganya di sebelah timur dan baratnya, yaitu: Vietnam, suatu ketika juga Kamboja, dan Birma.

⁵Politik dalam negeri mendorong Malaysia, yang mempunyai penduduk etnis Cina sekitar 35%, untuk memperbaiki hubungannya dengan RRC; sebaliknya Singapura -- yang penduduknya sebagian terbesar etnis Cina -- yang sensitif terhadap tetangga Melayunya Malaysia dan Indonesia, menunggu sampai Indonesia memulihkan hubungan diplomasinya dengan RRC. Akan tetapi Singapura telah menjalin hubungan *de facto* di segala bidang dengan RRC.

⁶Identifikasi RRC dengan PKI-Aidit menghadapkannya dengan TNI yang tampil sebagai kekuatan dominan dalam periode sesudah Soekarno. Banyak di antara pemimpin-pemimpin Angkatan Darat yakin bahwa PKC dan/atau RRC di belakang G-30-S; ini bersama adanya perasaan anti-Cina yang laten yang mudah dimanfaatkan oleh politisi yang tak bertanggung jawab dan keragu-raguan umum mengenai loyalitas keturunan Cina, merupakan alasan mengapa Indonesia tidak mau didorong ke arah normalisasi.

sebelumnya, Vietnam merasa "dikhianati" oleh pemulihan hubungan Cina-Amerika yang terjadi pada puncak Perang Vietnam ketika Amerika Serikat meningkatkan pemboman strategisnya atas Vietnam Utara,¹ dan merasa tidak mempunyai pilihan selain berpaling kepada Uni Soviet untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan -- terutama senjata-senjata paling modern seperti peluru kendali SAM-6 -- untuk memenangkan peperangan.

Pada gilirannya ini membuat marah Cina yang merasa bahwa Vietnam tidak boleh membalas bantuannya -- Deng Hsiao-ping menyebutkan jumlah US\$ 10 milyar yang cukup besar untuk suatu negara miskin seperti RRC -- dengan mengizinkan Uni Soviet membuka front kedua dan mengancam RRC dari selatan. Dan seperti kita lihat waktu belakangan ini, sebagai akibat memburuknya hubungan itu Cina melancarkan suatu "ekspedisi penghukuman" terhadap Vietnam pada bulan Februari 1979 dan dalam konteks itu secara penuh mendukung rezim Pol Pot dan Khieu Sampan yang sama sekali bermusuhan dengan Hanoi. .

PENUTUP

Kalau analisa di atas ini tidak salah sama sekali, maka kami ingin mengisyaratkan bahwa tidaklah tepat berbicara tentang suatu perubahan fundamental dalam kebijaksanaan Cina terhadap bangsa-bangsa Asia Tenggara di sebelah selatan perbatasannya; yang tepat dan terjadi ialah suatu perubahan dalam manifestasi kebijaksanaan ini sebagai akibat berubahnya situasi internasional yang menggantikan Amerika Serikat dengan Uni Soviet sebagai musuh utama Cina.

Manifestasi baru kebijaksanaan Cina ini terungkap dalam membaiknya hubungan Cina dengan bangsa-bangsa anti komunis Asia Tenggara yang sebelumnya bermusuhan dan memburuknya hubungan Cina dengan bekas sekutu-sekutu komunisnya di semenanjung Indocina khususnya Vietnam. Akan tetapi membaiknya hubungan Cina dengan bangsa-bangsa ASEAN dan Birma itu tidak boleh ditafsirkan sebagai petunjuk adanya hubungan bersahabat tanpa reservasi karena alasan-alasan berikut.

Pertama, banyak orang Asia Tenggara merasa bahwa kendati membaiknya hubungan seperti tersebut di atas, RRC sebagai pengganti Cina Kekaisaran yang secara tradisional memandang Asia Tenggara sebagai daerah pengaruhnya -- seperti negara-negara besar lainnya -- tidak pernah dapat menindas sama sekali keinginan alamiahnya untuk menarik tetangga-tetangga

¹Jumlah bom yang dijatuhkan atas Vietnam Utara adalah lebih besar dari jumlah bom yang dijatuhkan atas medan perang di Eropa, Afrika dan Asia selama Perang Dunia II.

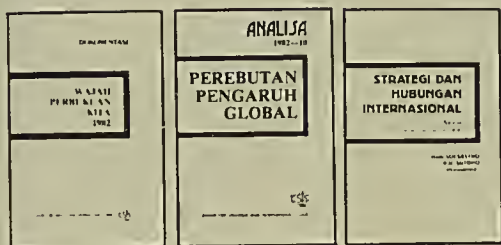
yang lebih kecil ke dalam orbitnya. Sebaliknya nasionalisme Asia Tenggara ingin "menjadi tuan di rumahnya sendiri" dan tidak mau menjadi embel-embel atau suatu pion negara-negara lain termasuk Cina.

Kedua, perasaan tidak enak kalau bukan kecurigaan terhadap sasaran akhir kebijaksanaan raksasa tetangga mereka ini menjadi lebih kuat akibat: (a) kebijaksanaan umum RRC untuk mendukung kaum komunis lokal Asia Tenggara dan lain-lain unsur anti pemerintah atau subversif; (b) garis propaganda Perang Dingin "bahwa kaum komunis Cina di belakang setiap kejadian buruk yang bisa dibayangkan di kawasan Asia-Pasifik", yang kemudian diambil alih oleh Uni Soviet biarpun negara ini lebih kecil kredibilitasnya di Asia Tenggara daripada Barat; (c) adanya masalah etnis Cina yang khususnya di Malaysia dan Indonesia menentukan hubungan mereka dengan RRC. Tanpa memperinci masalah ini yang telah dibahas sebelumnya,¹ di sini kami ingin menegaskan bahwa masalah etnis Cina itu akan terus memainkan peranan yang sangat penting dalam hubungan bangsa-bangsa ini dengan tetangga raksasa mereka selama *kebijaksanaan nation building* mereka terhadap warga negara keturunan Cina mereka belum dipandang berhasil karena ramifikasi dan implikasinya di bidang keamanan. Citra negatif Cina yang merupakan warisan masa lampau ini masih terdapat di kebanyakan negara Asia Tenggara dan tidak mudah diganti dengan suatu citra yang lebih positif. Selain itu, tidak sedikit orang Asia Tenggara belum mampu menyesuaikan diri secara psikologis dengan "Cina baru" yang lebih positif terhadap tetangga-tetangga Asia Tenggara selama bangsa-bangsa ini tidak mau masuk ke dalam orbit Soviet.

Ketiga, dalam kerangka pemikiran ini banyak orang Asia Tenggara curiga bahwa alasan Cina sebenarnya untuk mendukung Khmer Merah pimpinan Pol Pot dan Kieu Samphan -- di samping melawan Vietnam dan mencegah Uni Soviet mendapatkan suatu pangkalan di sebelah selatan perbatasan Cina -- adalah sasaran jangka panjang untuk membangun suatu tempat berpijak di Asia Tenggara yang bisa digunakan di masa mendatang bila terjadi suatu perubahan dalam situasi internasional yang membenarkan kalau bukan memaksakannya (paling tidak dari sudut pandangan Cina). Bangsa-bangsa Asia Tenggara tidak akan pernah dapat memaafkan ini karena ini akan *menjamin* intervensi Soviet untuk membantu Vietnam, dan secara demikian menggagalkan aspirasi bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk menjadi "tuan di rumah mereka sendiri" dan menentukan nasib mereka sendiri.

¹Lihat misalnya karangan-karangan Moehtar Kusumaatmadja, Gung-wu Wang, Goh Cheng-teik dan Lie Tek-tjeng mengenai masalah ini dalam *Masalah-masalah Internasional Masakini* (7) (Lembaga Research Kebudayaan Nasional - LIPI, 1977); lihat juga Lie Tek-tjeng, "The Chinese Problem in Indonesia," dalam *International Spectator*, Jaargang XXIV, No. 12, 22 Juni 1970 dan "Indonesia in China's Foreign Policy: 1949-1977" dalam *China: Development and Challenges* (Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, 1979), Vol. III.

Keempat, dan akhirnya mengenai Vietnam, kita dapat mengatakan bahwa sesudah periode bulan madu selama Perang Dingin ketika kepentingan-kepentingan Cina dan Vietnam bertemu, hubungan Cina-Vietnam kembali menjadi hubungan permusuhan tradisional seperti terlihat dalam sejarah. Berbeda dengan Korea yang mengandalkan Cina melawan musuh tradisionalnya Jepang, Vietnam -- yang menerima kebudayaan Cina -- selalu berjuang melawan dominasi Cina seperti dilambangkan oleh pahlawan-pahlawan nasionalnya dan ''periode seribu tahun dominasi Cina''-nya. Ini dan nasionalisme Vietnam yang memungkinkannya melakukan Perang Vietnam selama 30 tahun, merekomendasikan Vietnam kepada banyak pemimpin politik dan strategi -- paling tidak di Indonesia -- sebagai penyangga terbaik terhadap kemungkinan gerak maju Cina ke jurusan selatan di masa mendatang.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

THE INDOONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-35.